



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, terukur guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa guna memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk daerah kabupaten perlu dilakukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka Panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Handwritten initials in blue ink, possibly "A F" and "B Y".

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2045.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati;
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Katingan;
6. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan yang untuk selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Kabupaten Katingan Tahun 2024-2045 yang dituangkan dalam program lima (5) tahunan pembangunan kependudukan;
10. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan;
11. Penduduk adalah warga Katingan dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Katingan;
12. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
13. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk dalam seluruh dimensi;
14. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan;

* }
9 12 14

15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
16. Kualitas Penduduk adalah Kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak;
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya;
18. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang dalam lingkungan yang sehat;
19. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
20. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '9' and several initials.

26. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat;
27. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin;
28. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
29. Penataan persebaran penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
30. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan;
31. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa;
32. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan;
33. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk;
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
35. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pasal 2 Arahan Kebijakan

Arah kebijakan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan;
- b. Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan;
- c. Pembangunan kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan;
- d. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan;

t
y
4

- e. Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka Panjang nasional dan daerah.

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap strategi, arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Katingan pada periode 2024-2025 secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah;
- b. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
- c. Mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- d. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan daerah;
- e. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- g. mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan terintegrasi dan terpercaya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan kependudukan meliputi :

- a. pengendalian kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. pembangunan Keluarga;
- d. penataan pesebaran dan pengarahan mobilitas Penduduk; dan
- e. Penataan data dan informasi Kependudukan serta administrasi kependudukan.

BAB III PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN Pasal 5

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pasal (4) huruf a dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas pemerintah daerah melakukan :
 - a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.

+
9/1/24

- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program keluarga berencana.
- (3) Program keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang di inginkan;
 - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. penggunaan alat, obat dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
 - g. peningkatan pendidikan dan peran Wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui Upaya pembudayaan norma keluarga kecil, Bahagia dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui :
 - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b pemerintah daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk dibidang Kesehatan, Pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
 - b. peningkatan status gizi dengan cara melajukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas penduduk di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan daerah; dan
 - c. pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.

- (4) Peningkatan kualitas penduduk dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dengan mengurangi pengangguran; dan
 - b. Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni pemerintah daerah melakukan :
 - a. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. Pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi pada masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - d. Pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (2) Pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga sebagai berikut :
 - a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 8

- (1) Untuk penataan pesebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d pemerintah daerah melakukan :
 - a. Pengarahannya mobilitas penduduk yang mendukung pemerintah daerah yang berkeadilan;
 - b. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan daerah yang berkelanjutan;
 - c. Pengarahannya persebaran penduduk sesuai kebutuhan setiap wilayah;
 - d. Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
 - e. Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
- (2) Penataan pesebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan strategi sebagai berikut :
 - a. Mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan

A
K
9 4

- b. Mengurangi mobilitas penduduk keperkotaan.

Pasal 9

Untuk penataan administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e pemerintah daerah melakukan :

- a. Penataan dan pengelolaan *database* kependudukan; dan
- b. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Pasal 10

Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 11

Tim Koordiansi Pelaksanaan GDPK di Bentuk Oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim Koordiansi Pelaksanaan GDPK mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Kabupaten Katingan;
- (2) Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan TIM Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan GDPK di Kabupaten Katingan.
- (2) Tugas tim koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kebijakan dan program, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan GDPK di Kabupaten Katingan.
 - b. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK;
 - c. melakukan mensinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan, dan perangkat daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Pembentukan tim koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

[Handwritten signatures and initials]

BAB IV
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK
KABUPATEN KATINGAN
Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan GDPK di bentuk Tim Koordiansi pelaksana sebagai berikut :

- a. Bupati sebagai pengarah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Sebagai Ketua;
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan sebagai Wakil Ketua;
- d. Sekretaris oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan;
- e. Anggota Kepala perangkat daerah yang membidangi 5 pilar GDPK.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Tim pelaksana GDPK Kabupaten Katingan sebagaimana yang dimaksud pasal 14 huruf e terdiri dari kepala perangkat daerah terkait meliputi :
 - a. Pejabat Eselon II, Administrasi/Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan untuk menyusun arah kebijakan dan strategi pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. Pejabat Eselon II, Administrasi/Fungsional pada Perangkat Daerah yang membawahi urusan Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan ketahanan pangan dan pertanian yang untuk menyusun arah kebijakan dan strategi dalam peningkatan kualitas penduduk;
 - c. Pejabat Eselon II, Administrasi/Fungsional pada Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Sosial Lanjut Usia, dan Administrasi Perkawinan yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah terkait berdasarkan kompetensinya untuk menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan keluarga;
 - d. Pejabat Eselon II, Administrasi/Fungsional pada Perangkat Daerah yang membawahi urusan Ketenagakerjaan, Pemukiman dan Tata Ruang, serta Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyusun arah kebijakan dan strategi Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk;
 - e. Pejabat Eselon II, Administrasi/Fungsional pada BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan, serta urusan Komunikasi dan Informasi untuk menyusun arah kebijakan dan strategi Penataan Data Basis Penduduk dan Administrasi Kependudukan;

t
g
g
g

- f. Pejabat Eselon II, Administrasi/Fungsional pada Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan, dalam rangka perencanaan dan anggaran pelaksanaan GDPK Kabupaten Katingan;
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim pelaksanaan GDPK sebagaimana dalam pasal 15 ayat (1) maka dibentuklah tim koordinasi.

BAB V
SISTEMATIKA DOKUMEN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
Pasal 16

- (1) Sistematika Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045 sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan;
 - Bab III : Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kabupaten Katingan 2024-2045;
 - Bab IV : Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan;
 - Bab V : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan;
 - Bab VI : Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan 2024-2045
 - Bab VII : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai sistematika dokumen GDPK tahun 2024-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Tim koordinasi pelaksanaan melakukan monitoring dan evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan GDPK 5 Pilar dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi jadwal dan pelaksanaan GDPK 5 Pilar;
 - b. menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan GDPK 5 Pilar;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan GDPK 5 Pilar;
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada instansi pelaksana.

✱
9 13 17

Pasal 18
Pelaporan

- (1) Dalam rangka pengawasan evaluasi pelaksanaan maka dilakukan Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 Pilar.
- (2) Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala daerah kemudian di laporkan kepada Sekretariat Nasional GDPK 5 Pilar.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 19

Pembiayaan atas pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, seluruh percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 2 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

DEDDY FERRAS



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2045

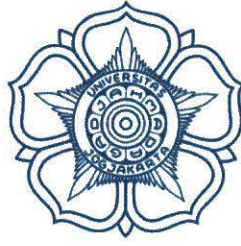


GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2045

A

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan 2024-2045

Handwritten signature or initials



Universitas Gadjah Mada
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
2024

[Handwritten signature]

Kata Pengantar

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK merupakan arahan kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan yang dituangkan dalam program lima tahunan.

Perpres Nomor 153 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menyusun dokumen GDPK. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Katingan, menyusun dokumen GDPK Kabupaten Katingan Tahun 2024-2045. Sistematika dokumen GDPK mengacu pada Panduan Penyusunan GDPK 5 Pilar yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan, dalam buku ini disajikan dan dianalisis sejumlah data dan informasi kependudukan terkini maupun kondisi ideal di masa depan, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan pembangunan jangka panjang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi arah strategi kebijakan dalam rangka pembangunan kependudukan sehingga dapat mewujudkan sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam hal pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

Penyusunan dokumen GDPK Kabupaten Katingan 2024-2045 ini melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Katingan.

Katingan, Mei 2024



Daftar Isi

Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
Daftar Tabel.....	xxiii
Daftar Gambar.....	xxvii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Sasaran	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.3.1 Lingkup Wilayah.....	3
1.3.2 Lingkup Materi.....	3
1.4 Pendekatan Pengembangan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan.....	4
Bab 2 Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan	9
2.1 Kuantitas Penduduk.....	9
2.1.1 Tingkat Kelahiran	9
2.1.2 Struktur dan Laju Pertumbuhan Penduduk	11
2.1.3 Kelahiran pada Kelompok Umur Muda	13
2.1.4 Median Usia Kawin Pertama	15
2.1.5 Prevalensi Kontrasepsi Jangka Panjang	16
2.2 Kualitas Penduduk	17

2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	18
2.2.2	Aspek Pendidikan	19
2.2.3	Aspek Kesehatan	21
2.2.4	Aspek Ekonomi	27
2.3	Pembangunan Keluarga	32
2.3.1	Pemberdayaan Gender	35
2.3.2	Perkawinan.....	37
2.3.3	Perceraian	38
2.3.4	Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	39
2.4	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	40
2.4.1	Penduduk Pindah Datang dan Pindah Keluar	41
2.4.2	Migrasi Netto	43
2.4.3	Migrasi Internal.....	44
2.4.4	Daerah Tujuan Migrasi Keluar	45
2.4.5	Kepadatan Penduduk dan Daya Dukung.....	48
2.5	Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	49
Bab 3	Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kabupaten Katingan 2024-2045.....	53
3.1	Kuantitas Penduduk.....	53
3.2	Kualitas Penduduk	58
3.3	Pembangunan Keluarga	65
3.4	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	68
3.5	Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	69

f
g
h

Bab 4	Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan.....	73
4.1	Visi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan.....	73
4.2	Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan.....	75
4.2.1	Kuantitas Penduduk	75
4.2.2	Kualitas Penduduk	77
4.2.3	Pembangunan Keluarga	80
4.2.4	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	84
4.2.5	Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan.....	89
Bab 5	Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan.....	91
5.1	Kuantitas Penduduk.....	91
5.2	Kualitas Penduduk	94
5.3	Pembangunan Keluarga	97
5.4	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	100
5.5	Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	102
Bab 6	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan 2024-2045	105
6.1	Peta Jalan Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	105
6.2	Peta Jalan Peningkatan Kualitas Penduduk	108
6.2.1	Peningkatan Kualitas Pendidikan.....	108
6.2.2	Peningkatan Kualitas Kesehatan	110
6.2.3	Peningkatan Kualitas Ekonomi	112

6.3	Peta Jalan Pembangunan Keluarga	114
6.4	Peta Jalan Pengarahan Mobilitas	115
6.5	Peta Jalan Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan	116
Bab 7	Penutup.....	119
Referensi	121

Handwritten signature and initials in blue ink.

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2018-2023.....	19
Tabel 2.2	Angka Kematian Bayi, Balita, Neonatal, dan Ibu di Kabupaten Katingan, 2018-2023.....	23
Tabel 2.3	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Katingan, 2021-2022	24
Tabel 2.4	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Katingan, 2019-2022	26
Tabel 2.5	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2018-2023	28
Tabel 2.6	PDRB berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Kabupaten Katingan, 2019-2023	29
Tabel 2.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Katingan, 2018-2023.....	31
Tabel 2.8	Cakupan Kepesertaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kabupaten Katingan, 2019-2022	33
Tabel 2.9	Indeks Kebahagiaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia, 2014, 2017, 2021	34
Tabel 2.10	Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender, Kabupaten Katingan, 2018-2023.....	36
Tabel 2.11	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Kabupaten Katingan, 2018-2022	39
Tabel 2.12	Jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Migrasi menurut Kecamatan, Kabupaten Katingan, 2019	42
Tabel 2.13	Daerah Asal Migran Risen, Kabupaten Katingan, 2023.....	45

Tabel 2.14	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el, Kepala keluarga yang Memiliki KK, dan Anak yang Memiliki KIA, Kabupaten Katingan, 2019-2023	51
Tabel 3.1	Skenario Proyeksi TFR 2020-2045	55
Tabel 3.2	Kondisi Ideal Pembangunan Pendidikan Kabupaten Katingan, 2025-2045.....	59
Tabel 3.3	Kondisi Ideal Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Katingan, 2025-2045.....	61
Tabel 3.4	Kondisi Gizi dan Morbiditas Kabupaten Katingan, 2025-2045.....	62
Tabel 3.5	Kondisi Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi yang Ideal di Kabupaten Katingan, 2025-2045	63
Tabel 3.6	Kondisi Ideal Pembangunan Ekonomi Kabupaten Katingan, 2025-2045.....	64
Tabel 3.7	Hasil Proyeksi Indikator Pilar Pembangunan Keluarga.....	66
Tabel 3.8	Target Indikator Administrasi dan Data Kependudukan	70
Tabel 4.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan.....	81
Tabel 4.2	Persentase Keterlibaran Perempuan di Parlemen (Persen)	82
Tabel 4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin	82
Tabel 4.4	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	82
Tabel 6.1	<i>Road Map</i> Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk	107
Tabel 6.2	<i>Road Map</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan	109
Tabel 6.3	<i>Road Map</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan.....	111
Tabel 6.4	<i>Road Map</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi.....	113

Tabel 6.5	Penahapan dalam Pembangunan Keluarga	115
Tabel 6.6	Road Map Data Kependudukan Katingan 2025-2045	117



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Kedudukan dan Jalur Formasi GDPK.....	6
Gambar 2.1	Tren TFR Kabupaten Katingan, 2019-2023	10
Gambar 2.2	TFR berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022.....	10
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Katingan (persen), 2019-2023	11
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Kabupaten Katingan, 2023	12
Gambar 2.5	Rasio Ketergantungan Kabupaten Katingan, 2020-2023	13
Gambar 2.6	ASFR Kabupaten Katingan, 2022-2023	14
Gambar 2.7	ASFR menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022.....	14
Gambar 2.8	Median Usia Kawin Pertama Kabupaten Katingan, 2019-2023	15
Gambar 2.9	Median Usia Kawin Pertama menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022	15
Gambar 2.10	Prevalensi Kontrasepsi Modern menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022.....	16
Gambar 2.11	Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Katingan, 2019-2022	17
Gambar 2.12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Katingan, 2018-2023 [Metode Baru].....	18
Gambar 2.13	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥ 15 Tahun dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Katingan, 2018-2023	19
Gambar 2.14	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP Kabupaten Katingan, 2018-2023	20

Gambar 2.15	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Metode Baru) Kabupaten Katingan, 2018-2023	22
Gambar 2.16	Prevalensi Balita dengan <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i> Kabupaten Katingan, 2018-2023	24
Gambar 2.17	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (%) di Kabupaten Katingan, 2019-2022	25
Gambar 2.18	Perkembangan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular di Kabupaten Katingan, 2019-2023	26
Gambar 2.19	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Katingan, 2018-2023	27
Gambar 2.20	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan/Orang/ Tahun) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan, 2018-2023	27
Gambar 2.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kabupaten Katingan, 2018-2023	28
Gambar 2.22	Rasio Gini Kabupaten Katingan, 2018-2023.....	30
Gambar 2.23	Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Katingan, 2018-2023	30
Gambar 2.24	iBangga Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2022.....	33
Gambar 2.25	Jumlah Perkawinan yang Tercatat di Kabupaten Katingan, 2018-2023	37
Gambar 2.26	Jumlah Perceraian di Kabupaten Katingan, 2018-2023	38
Gambar 2.27	Migrasi Netto di Kabupaten Katingan, 2018-2023	43
Gambar 2.28	Daerah Tujuan Migrasi Keluar dari Kabupaten Katingan, 2020	46
Gambar 2.29	Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, Kabupaten Katingan 2023.....	48
Gambar 2.30	Persentase Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan, 2023	49

Gambar 2.31	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Kabupaten Katingan 2019-2023	50
Gambar 3.1	Proyeksi Penduduk Katingan Tahun 2020-2045	54
Gambar 3.2	Proyeksi TFR Katingan Tahun 2020-2045	55
Gambar 3.3	Proyeksi MKJP Kabupaten Katingan Tahun 2020-2045	55
Gambar 3.4	Proyeksi Median Usia Kawin Pertama, Tahun 2022-2045.....	56
Gambar 3.5	Proyeksi ASFR, Tahun 2023-2045.....	57
Gambar 3.6	Proyeksi Rasio Ketergantungan Kab. Katingan, 2020-2045.....	58
Gambar 3.7	Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan, 2025-2045	58
Gambar 3.8	Target Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Katingan 2025-2045	60
Gambar 3.9	Target Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> Kabupaten Katingan 2025-2045	61

(Handwritten marks)

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penduduk dan pembangunan saling terkait erat. Variabel kependudukan seperti jumlah, struktur, pertumbuhan, dan persebaran penduduk mempunyai dampak signifikan terhadap aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, pangan, lingkungan, dan aspek pembangunan lainnya. Demikian sebaliknya, berbagai aspek pembangunan tersebut berpengaruh terhadap situasi kependudukan.

Pembangunan kependudukan Kabupaten Katingan yang telah berlangsung semenjak dibentuk pada tahun 2002 cukup dinamis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hal pengendalian kuantitas penduduk, Kabupaten Katingan belum mencapai *replacement level*, yakni angka TFR pada 2023 sebesar 2,41. Saat ini, Kabupaten Katingan juga berada pada fase bonus demografi, yang perlu dikelola dengan benar agar memberikan manfaat secara signifikan bagi kesejahteraan penduduk. Perubahan struktur penduduk di Katingan juga tidak lepas dari adanya peningkatan mobilitas penduduk, yang memberikan tantangan tersendiri bagi proses pembangunan. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Katingan pada 2023 berada pada level tinggi dengan angka 70,28, yang menunjukkan capaian pembangunan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun demikian, masih dijumpai sejumlah persoalan, seperti masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk (rata-rata lama sekolah kurang dari 9 tahun), masih terjadinya kasus kematian ibu dan anak serta *stunting*, dan belum meratanya akses dan kesempatan kerja. Pembangunan manusia ini tidak lepas dari peran keluarga sebagai unit terkecil dan paling dasar untuk mencetak SDM (sumber daya manusia) yang unggul di masa depan. Namun pembangunan keluarga untuk menciptakan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Katingan masih menjumpai beberapa persoalan, seperti tingginya kasus perceraian, terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada perempuan dan anak, serta masih terjadi perkawinan dini.

Atas berbagai dinamika dan kompleksitas persoalan kependudukan, World Population Day (2021) membawa pesan bagi seluruh *stakeholders* untuk lebih serius memperhatikan dan mengelola persoalan kependudukan. Pembangunan kependudukan hendaknya direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, komprehensif, dan sinergis. Dalam pelaksanaannya, memerlukan keterlibatan dan koordinasi semua pihak secara efektif, bersifat lintas level dan sektor. Di samping itu, data kependudukan yang valid, terintegrasi, dan

termutakhirkan sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan.

Grand design pembangunan kependudukan dinilai cukup potensial sebagai landasan penanganan persoalan kependudukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan). Hal ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, bahwa pembangunan kependudukan harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai level dan lintas sektor. *Grand design* pembangunan kependudukan (GDPK) mencakup lima pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, serta pembangunan *database* kependudukan. GDPK diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah dalam penetapan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, yang dituangkan dalam program lima tahunan. GDPK selanjutnya juga sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kependudukan.

Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Katingan menyusun dokumen GDPK tahun 2024-2045. Melalui penyusunan dan pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya visi pembangunan jangka panjang, yaitu Kabupaten Katingan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan pada akhir periode 2045.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Sebagai salah satu rencana induk, dokumen GDPK bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Katingan pada periode 2024-2045 secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Dalam dokumen ini disajikan dan dianalisis kondisi kependudukan terkini serta program dan kegiatan sehingga dapat menjadi arah kebijakan dan keterkaitan antara program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, *grand design* pembangunan kependudukan bertujuan untuk mencapai kualitas penduduk yang tinggi untuk mencapai kemajuan bangsa, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan secara khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:

- a) penduduk tumbuh seimbang,
- b) penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi,

- c) keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni,
- d) keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan,
- e) administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka strategi pelaksanaan GDPK meliputi pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta penataan data dan informasi serta administrasi kependudukan.

1.2.2 Sasaran

Pelaksanaan pembangunan kependudukan Kabupaten Katingan menasar pada terwujudnya pembangunan daerah berwawasan kependudukan dengan pendekatan hak asasi, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan kependudukan berkelanjutan di Kabupaten Katingan diharapkan dapat mencapai bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Di samping itu, ke depan juga diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pembangunan kependudukan di Kabupaten Katingan juga menasar pada terbangunnya *database* kependudukan melalui sistem informasi data kependudukan yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah penyusunan GDPK ini adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan.

1.3.2 Lingkup Materi

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, maka materi penyusunan GDPK Kabupaten Katingan melingkupi lima pilar.

Handwritten notes and initials in blue ink, including a vertical line, a circled '9', and other scribbles.

- a. Pilar pertama adalah pengelolaan kuantitas penduduk yang dilakukan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk, melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.
- b. Pilar kedua adalah peningkatan kualitas penduduk agar setiap penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dengan lebih baik, sehingga tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, dan sejahtera. Peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui peningkatan kualitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
- c. Pilar ketiga terkait dengan penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk yang dilaksanakan melalui peningkatan mobilitas penduduk yang tidak tetap.
- d. Pilar keempat adalah pembangunan keluarga berkualitas. Pembangunan keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa, berdasarkan perkawinan yang sah, memiliki ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan dapat berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Keluarga berkualitas juga mampu merencanakan sumber daya keluarga dengan baik.
- e. Pilar kelima adalah penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan. Tujuan utama pilar kelima ini adalah terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan penyediaan pelayanan publik.

Dalam penyusunannya, secara teknis mengikuti Panduan Penyusunan GDPK 5 Pilar yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020.

1.4 Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan¹

Pembangunan yang berbasis pada rakyat menempatkan penduduk sebagai pusat pembangunan, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat atau penduduk. Pembangunan yang berbasis pada penduduk memiliki visi untuk mewujudkan sebuah kondisi penduduk tumbuh seimbang yang akan mewujudkan kesejahteraan rakyat atau penduduk. Oleh karena itu, pembangunan yang berbasis kependudukan hendaknya menyesuaikan potensi dan kondisi penduduk serta lebih berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya

¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2020. Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar. Jakarta: Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN.

manusianya. Artinya, penduduk menjadi titik sentral, yaitu sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Sebagai subjek, penduduk didorong untuk dapat terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan. Pembangunan harus memperhitungkan kapasitas penduduk, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara bersamaan, setiap warga negara, sebagai objek pembangunan, berhak mendapatkan manfaat atau dampak positif dari hasil pembangunan. Dengan demikian, pembangunan akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

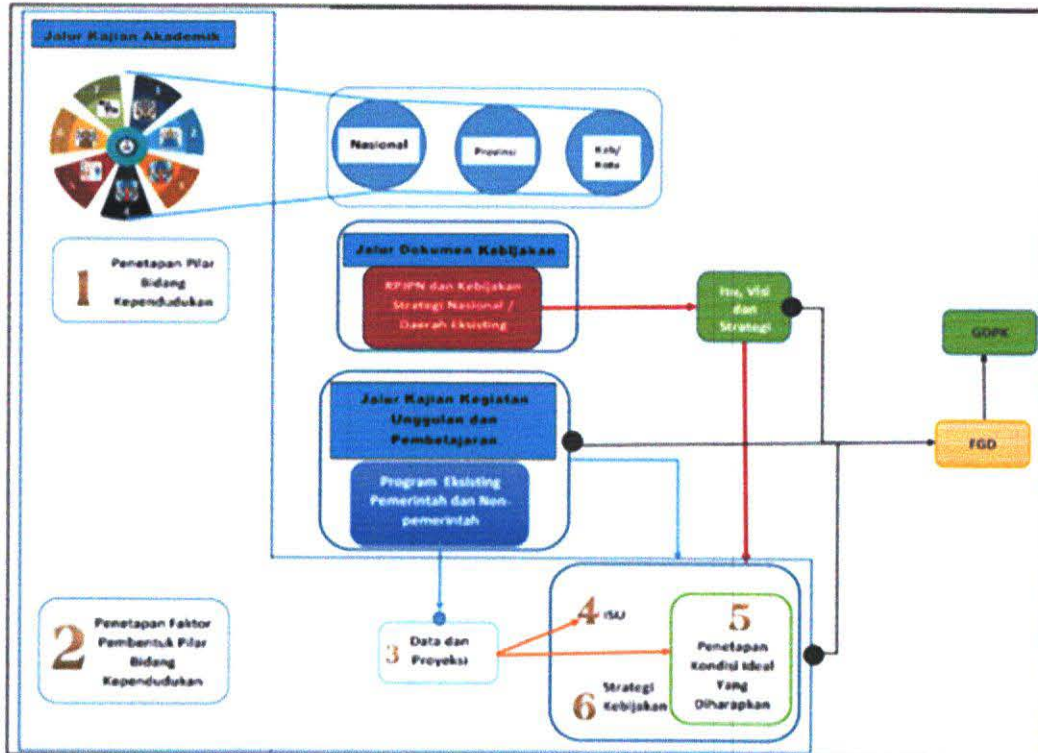
Pembangunan berwawasan kependudukan hendaknya memperhatikan prinsip partisipasi, *pro poor*, keberlanjutan, serta terintegrasi. Melalui keempat prinsip ini, diharapkan pembangunan dapat berlangsung dengan melibatkan peran aktif penduduk, berorientasi pada penghilangan kemiskinan (*poverty eradication*), memerhatikan aspek lingkungan hidup, serta terintegrasi secara kewilayahan dan lintas sektor.

Dalam proses pembangunan yang berwawasan kependudukan, perlu adanya integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan. Melalui integrasi tersebut, diharapkan akan terjadi harmonisasi antara dinamika kependudukan dan kondisi sosial ekonomi lainnya serta memperkuat penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan. *Grand design* pembangunan kependudukan diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Penyusunan *grand design* menggunakan pendekatan hak asasi manusia untuk mencapai keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam prosesnya, menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan sekaligus penikmat pembangunan. Oleh karena itu, harus mengakomodasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan di setiap level pemerintahan. Sebagai arah kebijakan pembangunan, maka *grand design* pembangunan kependudukan tidak lepas dari rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun panjang, baik pada level nasional maupun daerah.

Pada level daerah, berdasarkan kedudukan GDPK, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) berperan sebagai rujukan utama sumber derivasi. Hal ini merujuk pada panduan penyusunan GDPK yang disusun nasional (BKKBN, 2020). Kedudukan dokumen GDPK dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Penyusunan GDPK Kabupaten Katingan perlu memperhatikan tiga hal. Pertama, dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan pembangunan kependudukan, baik pada level nasional maupun daerah. Yang dimaksud di sini adalah kebijakan dan strategi pembangunan bidang kependudukan, seperti strategi kelanjutusiaan, penurunan *stunting*, pendidikan, lingkungan hidup, penataan ruang wilayah, dan lainnya. Kedua, program-program yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam pembangunan kependudukan. Ketiga, peran atau kinerja organisasi nonpemerintah yang memberi dampak positif terhadap pembangunan kependudukan di daerah, sesuai dengan fokus kerja mereka.



Gambar 1.1 Kedudukan dan Jalur Formasi GDPK

Sumber: BKKBN, 2020

Proses penyusunan dilakukan melalui tahap berikut.

1. Mengkaji dokumen kebijakan pembangunan di level nasional, seperti Indonesia Emas 2045, RPJPN (rencana pembangunan jangka panjang nasional), strategi nasional penurunan *stunting*, strategi nasional pendidikan, strategi nasional kesejahteraan lanjut usia, strategi nasional tata ruang, panduan GDPK, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pada tahapan ini juga mengkaji kebijakan pembangunan di level daerah, seperti RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) atau kebijakan tata ruang daerah. Dengan demikian dapat diidentifikasi isu, visi, dan strategi pembangunan kependudukan, yang akan menjadi sumber derivasi.
2. Menganalisis data capaian yang menggambarkan kondisi terkini sekaligus juga mengkaji program pembangunan kependudukan untuk mengetahui pengaruh kinerja program terhadap kondisi kependudukan terkini. Data capaian maupun program yang dimaksud adalah sesuai dengan lima pilar dalam *grand design* pembangunan kependudukan.
3. Berdasarkan analisis data dan program di atas, maka dilakukan analisis permasalahan kependudukan di lima pilar GDPK, dengan memperhatikan beberapa aspek. Pertama, kondisi yang terjadi melalui data capaian

indikator GDPK saat ini. Kedua, target indikator GDPK untuk mengetahui kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Ketiga, kebijakan serta program daerah, termasuk program/kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja program-program tersebut berpengaruh terhadap kondisi kependudukan terkini.

Beberapa indikator dalam dokumen GDPK, utamanya pilar pengelolaan kuantitas dan pengarahannya disesuaikan dengan hasil sensus penduduk 2020 (SP 2020). Sementara untuk pilar lainnya, yaitu peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan data dan informasi serta administrasi kependudukan, dilakukan analisis kecenderungan di masa mendatang dengan menggunakan kombinasi teknik proyeksi (memperhatikan histori) dan atau target (memperhatikan target nasional dan daerah).

Identifikasi masalah didasarkan pada adanya *gap* atau kesenjangan antara target sebagai cerminan kondisi yang diharapkan dengan capaian atau kondisi saat ini serta kinerja program yang ada. Berangkat dari situasi ini, analisis diperluas dan dikombinasikan dengan kondisi eksternal, mencakup demografi, sosial, ekonomi, dan politik, sehingga didapat pokok atau isu-isu strategis pembangunan kependudukan.

4. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dokumen GDPK Kabupaten Katingan 2024-2045 dengan memperhatikan hasil analisis sebelumnya, mencakup permasalahan dan isu strategis, indikator kinerja dan target untuk menyelaraskannya. Arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam dokumen GDPK ini diselaraskan dengan kondisi terkini.

9 B 1

Bab 2

Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan

Bagian ini menjelaskan dua hal, yaitu kondisi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan. Kondisi kependudukan adalah situasi terkini mengenai kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, keluarga, dan data kependudukan. Sementara capaian pembangunan kependudukan menggambarkan hasil dari proses program dan kebijakan yang telah berjalan. Untuk mengetahui capaian Pembangunan bidang kependudukan, analisis dilakukan pada perubahan kondisi (kependudukan) dari tahun ke tahun yang dikaitkan program kebijakan. Dengan demikian situasi kependudukan yang tergambar pada narasi, tidak akan lepas dari konteks program kebijakan yang pernah dilakukan di Kabupaten Katingan.

2.1 Kuantitas Penduduk

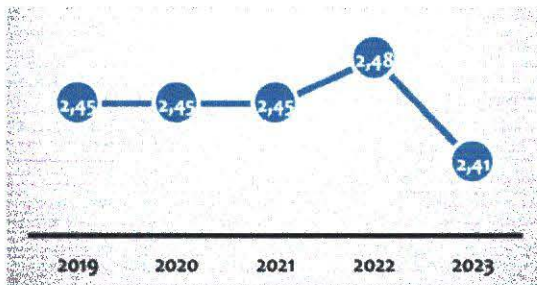
Penduduk merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi pembangunan di Katingan. Perubahan yang terjadi, baik dari sisi komposisi ataupun strukturnya, dapat memberi manfaat positif apabila dikelola dengan benar. Oleh karenanya, informasi mengenai perubahan penduduk dan variabel-variabel yang memengaruhinya penting untuk dianalisis.

Perubahan struktur dan komposisi penduduk sendiri berkaitan dengan tingkat kelahiran yang dipengaruhi oleh variabel langsung dan variabel antara. Variabel langsung yang dimaksud adalah variabel yang secara langsung berkontribusi pada terjadinya konsepsi dan kehamilan, seperti pemakaian kontrasepsi dan usia kawin pertama. Variabel tidak langsung adalah variabel yang tidak secara langsung memengaruhi kelahiran, seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, pengetahuan dan keterpaparan informasi kesehatan reproduksi. Sayangnya tidak semua data tersedia secara memadai untuk menjelaskan perubahan struktur penduduk yang terjadi, sehingga pembahasan dibatasi pada tingkat kelahiran, usia kawin pertama, pemakaian alat atau obat kontrasepsi.

2.1.1 Tingkat Kelahiran

Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Katingan telah mengalami kemajuan yang semakin baik seperti terlihat dari angka kelahiran. Tren angka kelahiran di Katingan mengalami penurunan dari 2,45 di 2019 menjadi 2,41 di 2023. Penurunan yang relatif lambat ini berkaitan dengan angka kelahiran yang

semakin mendekati 2,1. Upaya menekan angka kelahiran umumnya akan semakin sulit manakala angkanya sudah relatif rendah. Berbeda dengan angka kelahiran yang masih di kisaran 4-3 anak per perempuan, upaya untuk menurunkannya melalui berbagai program kebijakan terlihat lebih efektif. Sebagaimana tampak pada angka kelahiran di tingkat nasional yang mengalami penurunan secara nyata dari 4-5 anak di tahun 1980 menjadi 2 anak di 2000, tetapi sejak tahun 2000 hingga 2020 angka kelahiran masih berada di kisaran angka 2. Ini menandakan bahwa menurunkan angka kelahiran yang sudah rendah ke tingkat lebih rendah lagi akan lebih sulit.



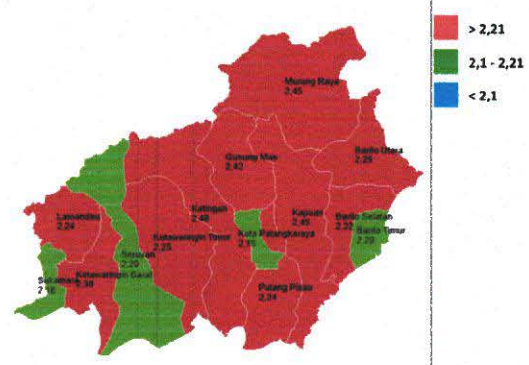
Gambar 2.1 Tren TFR Kabupaten Katingan, 2019-2023

Sumber: DPPKB Kab. Katingan, 2024

Demikian pula yang terjadi di Katingan, angka kelahiran selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang relatif lambat, meski program-program terkait terus dijalankan dengan intensif. Salah satunya adalah layanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan. Program ini merupakan program yang dijalankan secara konsisten dan terus diperluas cakupannya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain program tersebut, Katingan juga menerapkan

program sosialisasi dan edukasi tentang perencanaan keluarga berencana kepada pasangan usia subur. Tujuannya agar pasangan dalam merencanakan kelahirannya melalui pengaturan jarak kehamilan, menghindari kehamilan di usia yang terlalu muda, terlalu tua, dan terlalu sering. Program tersebut tidak hanya berpengaruh pada semakin rendahnya jumlah anak yang dilahirkan, tetapi pada kesehatan reproduksi yang semakin berkualitas.

Meski angka kelahiran di Kabupaten Katingan terus mengalami penurunan, tetapi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Sukamara, Seruyan, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya yang angka kelahirannya di kisaran 2,1-2,2. Angka kelahiran Kabupaten Katingan masih di atas 2,21 atau belum mencapai *replacement level*, sebagaimana diharapkan dalam dokumen perencanaan kependudukan nasional. Kabupaten Katingan, bersama-sama dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah di luar Sukamara, Seruyan, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya masih harus menurunkan angka kelahirannya pada angka 2,1. Tingkat kelahiran 2,1, diasumsikan akan



Gambar 2.2 TFR berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Sumber: Buku Parameter Kependudukan, BKKBN

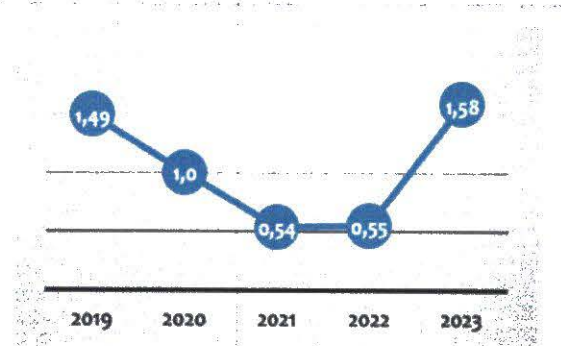
Handwritten signatures and initials in blue ink.

berdampak pada terciptanya penduduk tumbuh seimbang, yang apabila diikuti oleh keberhasilan pembangunan sosial ekonomi, maka akan berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan.

2.1.2 Struktur dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Tren angka kelahiran yang semakin menurun membawa konsekuensi pada laju pertumbuhan penduduk yang semakin terkendali. Sebagaimana tampak pada Gambar 2.3, selama periode 2019-2022 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Katingan semakin menurun dari 1,49 persen menjadi 0,55 persen. Penurunan itu berkaitan dengan dua hal, yaitu (1) dampak jangka panjang dari kebijakan pengendalian penduduk, dan (2) pandemi COVID-19.

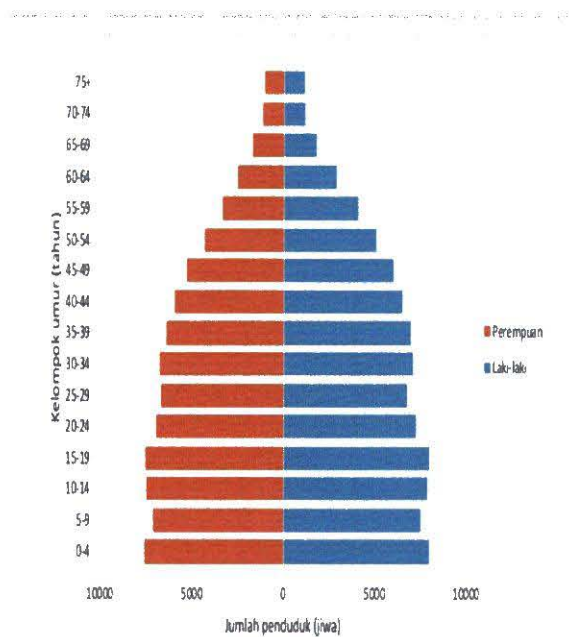
Kebijakan pengendalian penduduk melalui Program Keluarga Berencana telah berhasil menurunkan rata-rata kelahiran menjadi 2 anak per perempuan usia subur, sedangkan pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020-2022 meningkatkan angka kematian. Kedua hal itu turut menyumbang terjadinya penurunan laju pertumbuhan penduduk. Berikutnya pada tahun 2022-2023 pertumbuhan penduduk Kabupaten Katingan justru meningkat menjadi 1,58 persen. Apabila merujuk pada angka kelahiran pada periode tersebut yang menurun, maka penambahan penduduk di Katingan bisa jadi berkaitan dengan adanya migrasi masuk.



Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Katingan (persen), 2019-2023

Sumber: Katingan dalam Angka, BPS

Handwritten notes in blue ink, including a large '9' and some illegible scribbles.



**Gambar 2.4 Piramida Penduduk
Kabupaten Katingan, 2023**

Sumber: BPS

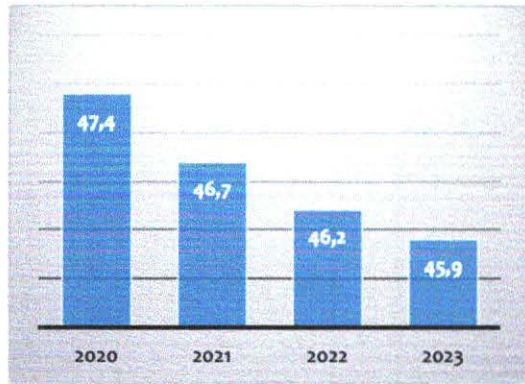
ekonomi. Saat ini, Kabupaten Katingan sudah mencapai struktur tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh gambar piramida penduduk (Gambar 2.4). Pada piramida tersebut tampak bagian tengah yang menggelembung ke samping sebagai penanda proporsinya lebih tinggi dibandingkan dengan bagian atas (64+ tahun).

Tingginya kelompok umur 15-64 tahun dapat dimaknai sebagai potensi demografi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan status pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Pendidikan dan keterampilan akan membekali kelompok usia produktif dengan pengetahuan dan keahlian bidang tertentu, sehingga akan meningkatkan daya saingnya di pasar kerja. Lebih dari itu, status pendidikan yang lebih baik akan menjadikan penduduk lebih produktif melalui ide, gagasan, dan juga produk (inovasi) yang mampu dihasilkannya (Simanjutak, 2006)³. Dari sisi kesehatan, penduduk usia produktif yang status kesehatannya bagus akan mampu berpartisipasi di pasar kerja dengan lebih optimal. Situasi tersebut merupakan manfaat jangka panjang dari situasi dan perubahan struktur demografi yang terjadi di Katingan. Salah satu ciri Katingan sedang mengalami fase tersebut adalah rasio ketergantungan antara penduduk usia produktif (15-

² Lucas, D. (2006). *The Beginning of Population Studies*. Australia: ANU

³ Simanjutak, P. (2006). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI

64 tahun) terhadap penduduk usia anak (<15 tahun) dan usia tidak produktif (64+ tahun) kurang dari 50 persen.



Gambar 2.5 Rasio Ketergantungan Kabupaten Katingan, 2020-2023

Sumber: BPS

Gambar 2.5 menjelaskan tentang tren rasio ketergantungan di Kabupaten Katingan selama empat tahun terakhir, 2020-2023. Tahun 2020, rasio ketergantungan tercatat sebesar 47,4 persen kemudian menurun menjadi 46,7 di tahun 2021 dan 46,2 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023, rasio ketergantungan Katingan menunjukkan penurunan kembali pada angka 45,9 persen. Rasio ketergantungan yang nilainya kurang dari 50 persen tersebut menunjukkan bahwa Katingan sedang berada pada fase bonus

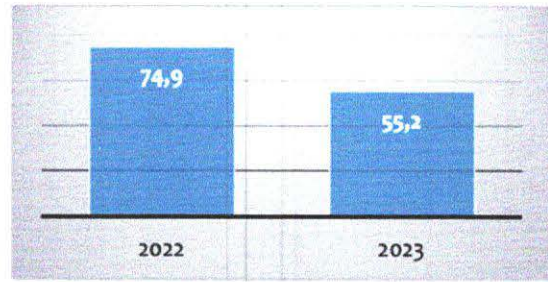
demografi. Situasi ini dapat memberikan manfaat sosial ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan apabila dikelola dengan benar.

2.1.3 Kelahiran pada Kelompok Umur Muda

Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Katingan berikutnya ditunjukkan oleh rata-rata tingkat kelahiran yang terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun yang semakin menurun. Tingkat kelahiran pada kelompok ini sering disebut sebagai ASFR (*Age Spesific Fertility Rate*), yaitu menggambarkan persoalan fertilitas dan kesehatan reproduksi. Pada kelompok ini, tidak diharapkan terjadi kelahiran karena berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan. Organ reproduksi kelompok umur 15-19 tahun belum cukup siap untuk mengalami kehamilan maupun persalinan. Apabila kehamilan terjadi pada kelompok ini, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kondisi ibu maupun bayi, seperti ditandai pendarahan bahkan kematian bayi, kematian ibu serta persoalan tumbuh kembang bayi dan *stunting*. Oleh karenanya, dalam rencana aksi Kairo 1994 yang berlanjut hingga ICPD 25 New York, kelahiran pada usia kurang dari 19 tahun harus mendapatkan perhatian luas (UNFPA, 2019)⁴.

⁴ UNFPA. (2019). Sexual and Reproductive Health and Rights, Background document for National Summit on ICPD25. UNFPA

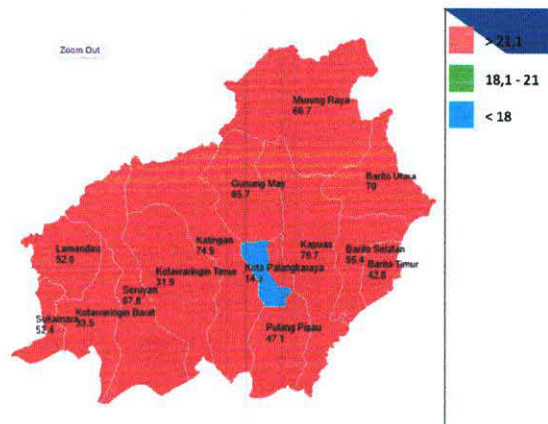
Pada kelompok umur ini, Pemerintah Kabupaten Katingan telah melakukan sosialisasi dan edukasi melalui sekolah ataupun kelompok kegiatan masyarakat (Bina Keluarga Remaja/BKR), sehingga mampu menurunkan angka ASFR dari 74 per 1.000 perempuan di tahun 2022 menjadi 55 di tahun 2023. Penurunan ini merupakan hal yang sangat baik, meski kasus kelahiran yang terjadi pada kelompok 15-19 masih ditemukan. Menghadapi kasus yang ada, Pemerintah Kabupaten Katingan tidak tinggal diam, mereka memberikan perhatian serius pada bayi-bayi yang terlahir dari ibu berumur 15-19 tahun. Pemerintah memantau tumbuh kembang bayi melalui posyandu dan puskesmas, mengedukasi pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan pada bayi usia 6+ bulan, dan layanan dapur sehat untuk mengatasi (risiko) *stunting*.



Gambar 2.6 ASFR Kabupaten Katingan, 2022-2023

Sumber: Long Form SP 2020, BPS

Kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun di Katingan apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah, maka terlihat tidak ada perbedaan signifikan. Sebagaimana tampak pada Gambar 2.7, seluruh wilayah di Kalimantan Tengah berwarna merah yang menunjukkan bahwa tingkat ASFR-nya sama-sama di atas 21,1 persen. Hanya di Kota Palangkaraya yang ASFR-nya kurang dari 18 per 1.000 perempuan. Situasi menyiratkan bahwa ASFR Katingan maupun kabupaten lain di Kalimantan Tengah pada level nasional masih tergolong tinggi. Dengan demikian, upaya untuk terus menurunkan angka ASFR perlu dilakukan secara menyeluruh dari tingkat kabupaten dan provinsi.



Gambar 2.7 ASFR menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Sumber. Buku Parameter Kependudukan, BKKBN

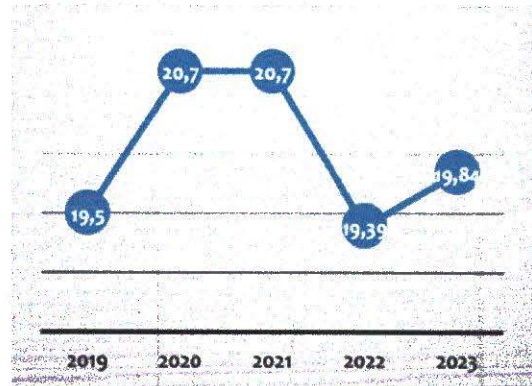
Handwritten marks: a vertical line, a large '9', and a signature.

2.1.4 Median Usia Kawin Pertama

Kemajuan pembangunan kependudukan lainnya di Kabupaten Katingan ditunjukkan oleh usia kawin pertama yang sudah mencapai standar ketentuan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Dengan peraturan tersebut, maka perkawinan di bawah umur 19 tahun tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan, meski tidak menutup kemungkinan perkawinan masih dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi.

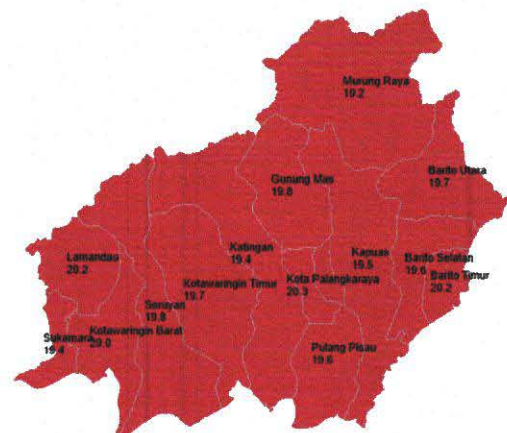
Di Katingan, pemerintah setempat berkomitmen terhadap pencapaian perkawinan minimal pada usia 19 tahun melalui sosialisasi dan edukasi secara luas. Sebagai hasilnya, median usia kawin pertama sejak 2019 sudah menjadi 19 tahun. Dari sisi tren angkanya, terlihat bahwa median usia kawin pertama di Katingan fluktuatif di kisaran 19-20 tahun.

Sementara itu, di tingkat regional terlihat bahwa posisi Kabupaten Katingan tidak berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah. Median usia kawin pertama Katingan maupun kabupaten/kota lainnya masih kurang dari 21 tahun. Hal ini menandakan bahwa pendewasaan usia kawin pertama menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Pola dan kecenderungan yang sama ini bisa jadi berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang tidak jauh berbeda. Salah satunya adalah pengetahuan yang kurang memadai tentang pernikahan



Gambar 2.8 Median Usia Kawin Pertama Kabupaten Katingan, 2019-2023

Sumber. DP3AP2KB Kab. Katingan



Gambar 2.9 Median Usia Kawin Pertama menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Sumber. Buku Parameter Kependudukan, BKKBN

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large '9' and other illegible marks.

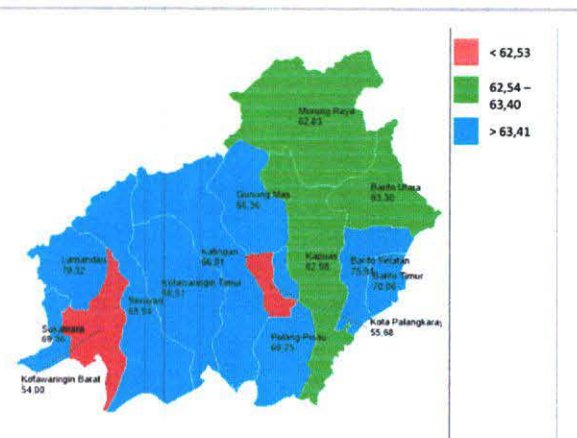
di usia dini (Peni, Lestari, dan Prasida, 2022)⁵. Pengetahuan yang tidak memadai menyebabkan seseorang dapat memutuskan untuk menikah lebih awal, termasuk ketidaktahuan tentang risiko dan potensi persoalan yang muncul.

2.1.5 Prevalensi Kontrasepsi Jangka Panjang

Keberhasilan pembangunan kependudukan di Katingan selanjutnya ditunjukkan oleh prevalensi pemakaian kontrasepsi modern yang sudah di kisaran 67 persen pada 2023. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih di kisaran angka 66 persen. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Tengah, Katingan dan beberapa kabupaten lain sudah tergolong tinggi, yaitu Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau, Sukamara, Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, dan Pulang Pisau. Prevalensi kontrasepsi modern di wilayah tersebut sudah di atas 62 persen, sedangkan di Kota Palangkaraya dan Kotawaringin Barat prevalensinya masih di bawah 62 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Katingan khususnya, cukup berhasil mengupayakan perencanaan kelahiran di antara Pasangan Usia Subur (PUS). Pemerintah Katingan mendorong penyediaan layanan kontrasepsi di layanan kesehatan dasar sehingga mudah diakses PUS, memfokuskan layanan kontrasepsi modern dibandingkan dengan tradisional, dan memprioritaskan layanan pada PUS miskin dan di kecamatan terluar. Sebagai implikasinya, prevalensi kontrasepsi modernnya mampu mencapai 67 persen, bahkan mengungguli Kota Palangkaraya.

Pemakaian kontrasepsi untuk merencanakan kehamilan memang menjadi fokus kebijakan dan program pemerintah nasional dan daerah. Demikian juga dengan di Kabupaten Katingan yang secara kontinu menjadikannya sebagai prioritas program. David dan Blake sebagaimana dikutip oleh Mantra (2000)⁶ menyebutkan pentingnya peran pemakaian kontrasepsi dalam mencegah terjadinya konsepsi sehingga dapat menekan



Gambar 2.10 Prevalensi Kontrasepsi Modern menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

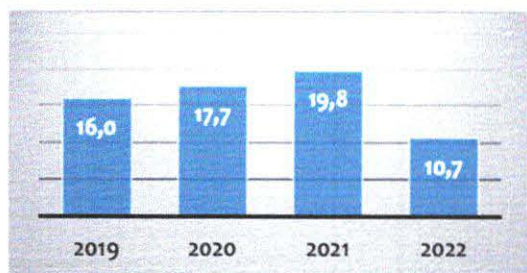
Sumber: Buku Parameter Kependudukan, BKKBN

⁵ Peni, G., Lestari, R.M., Prasida, D.W. (2022). "Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja terhadap Kejadian Pernikahan Dini di Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai, Palangkaraya". *Jurnal Surya Medika*. journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/jsm.

⁶ Mantra, I.B. (2000). *Pengantar Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

t
g B

angka kelahiran. Faktanya tidak semua alat atau obat kontrasepsi mampu mencegah konsepsi secara efektif karena ada risiko kegagalan di dalamnya. Umumnya kontrasepsi tradisional dikenal lebih rendah efektivitasnya dibandingkan dengan kontrasepsi jangka panjang, seperti IUD, tubektomi, dan vasektomi.



Gambar 2.11 Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Katingan, 2019-2022

Sumber: DP3AP2KB

Atas pertimbangan efektivitas itu, maka Pemerintah Katingan mendorong PUS untuk beralih dari metode tradisional ke metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Pemerintah menyediakan layanan konseling untuk memperluas pengetahuan PUS tentang MKJP. Di sisi lain, pemerintah juga bekerja sama dengan BPJS kesehatan, rumah bersalin, rumah sakit swasta dalam menyediakan layanan kontrasepsi jangka panjang, sehingga PUS

dapat mengaksesnya dengan baik. Sebagai hasilnya, persentase PUS yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terlihat meningkat dari 15,97 persen di tahun 2019 menjadi 19,79 persen di tahun 2021. Namun, di tahun 2022 prevalensi MKJP tampak menurun menjadi 10,66. Penurunan ini disinyalir berkaitan dengan adanya kasus *drop-out* karena alasan tertentu, seperti gangguan kesehatan. Dalam konteks ini, diperlukan studi lebih lanjut untuk mendalami penyebab menurunnya prevalensi MKJP di Katingan.

2.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk dalam dokumen ini dilihat dari tiga bidang pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; yang ketiganya saling terkait. Tingkat pendidikan masyarakat yang memadai diharapkan dapat mendorong pengetahuan dan praktik kesehatan penduduk yang lebih baik sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan kondisi kesehatan yang baik, maka penduduk juga dapat mengakses layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Sementara, tingkat pendidikan yang tinggi dan kondisi kesehatan yang baik akan memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Demikian sebaliknya, faktor ekonomi juga mendorong peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan. Kondisi ekonomi yang lebih baik akan memudahkan setiap individu untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dengan baik.

9 0 t

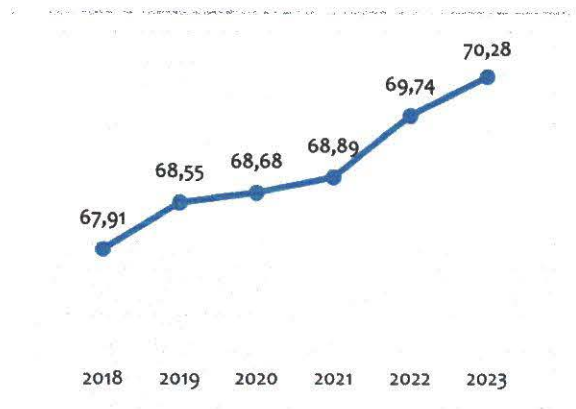
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Banyak negara menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) untuk menggambarkan kinerja pembangunan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM mengasumsikan bahwa kemajuan ekonomi akan memberi dampak pada semakin luasnya pilihan individu untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Kemajuan di salah satu komponen pembangunan ini akan berdampak kepada komponen lainnya. Pada aspek pendidikan, IPM mengukur rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah, sedangkan pada aspek kesehatan mengukur angka harapan hidup dan pada aspek ekonomi, indeks ini mengukur produk nasional bruto per kapita.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator pembangunan jangka panjang. IPM Kabupaten Katingan menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 2018-2023, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Peningkatan IPM ini menggambarkan upaya pembangunan manusia yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Katingan semakin membaik. Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan status capaian, pada kurun waktu 2018-2022, IPM Kabupaten Katingan termasuk pada level sedang (antara 60-70), sedangkan IPM tahun 2023 termasuk pada level tinggi (antara 70-80). Peningkatan status dari level sedang pada 2022 ke level tinggi pada 2023 menjadi bukti kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menyejahterakan rakyatnya.

Tabel 2.1 memperlihatkan capaian IPM kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Dibandingkan dengan angka provinsi, capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Katingan lebih rendah dibandingkan angka provinsi. Demikian halnya, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, capaian Kabupaten Katingan termasuk relatif rendah, yaitu berada pada posisi 10 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah. Dari 14 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, tiga kabupaten dengan angka tertinggi adalah Palangka Raya, Kotawaringin Barat, dan Barito Timur.



Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Katingan, 2018-2023 [Metode Baru]

Sumber: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/26/42/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>

A
G
t

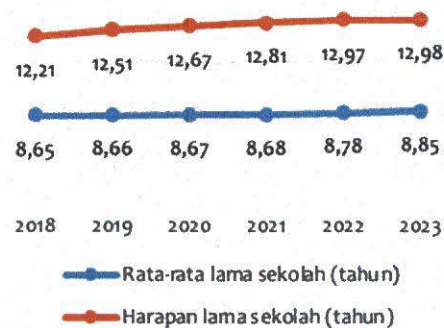
Tabel 2.1 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kotawaringin Barat	72,5	72,9	72,9	73,1	73,4	74,0
Kotawaringin Timur	70,6	71,2	71,3	71,4	71,7	72,2
Kapuas	68,7	69,4	69,5	69,6	70,0	70,8
Barito Selatan	69,7	70,1	70,2	70,5	71,0	71,7
Barito Utara	69,7	70,5	70,6	70,8	71,2	71,8
Sukamara	67,5	68,0	68,0	68,3	68,9	69,4
Lamandau	69,7	70,5	70,5	70,6	71,1	71,8
Seruyan	67,0	67,6	67,6	67,7	68,2	68,7
Katingan	67,9	68,6	68,7	68,9	69,7	70,3
Pulang Pisau	67,5	68,3	68,5	68,5	69,0	69,6
Gunung Mas	70,2	70,7	70,8	71,0	71,4	72,1
Barito Timur	70,8	71,3	71,4	71,5	72,1	72,7
Murung Raya	67,6	67,9	68,0	68,1	68,6	69,4
Palangka Raya	80,3	80,8	80,8	80,8	81,2	81,7
Kalimantan Tengah	70,4	70,9	71,1	71,3	71,6	72,2

Sumber: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/26/42/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>

2.2.2 Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan dalam pengukuran IPM dilihat dari dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah menunjuk pada jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah menunjuk pada lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui



Gambar 2.13 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥ 15 Tahun dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

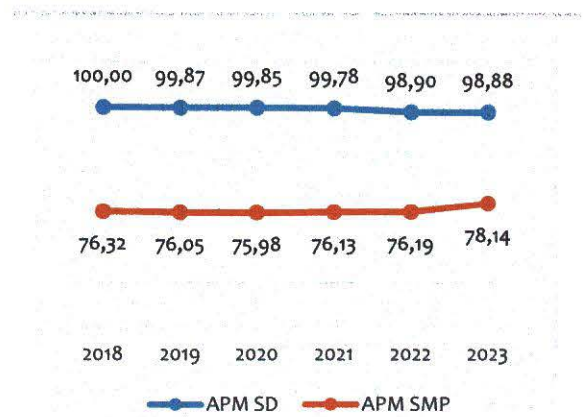
Handwritten signature/initials

kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada dimensi ini, kemajuan atau keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditandai dengan semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Gambar 2.13 memperlihatkan tren kedua indikator tersebut di Kabupaten Katingan periode 2018-2023. Pada 2018-2021, tidak terjadi perubahan rata-rata lama sekolah penduduk usia ≥ 15 tahun, yaitu sekitar 8,7 tahun. Pada kurun waktu 2021-2023, peningkatannya 0,1 tahun setiap tahunnya. Dari 8,68 tahun pada 2021 menjadi 8,78 tahun pada 2022, dan meningkat menjadi 8,85 tahun pada 2023. Peningkatan tren ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Katingan yang terus dilakukan guna meningkatkan akses layanan pendidikan formal di sekolah sesuai dengan kewenangannya, di antaranya adalah pemberian bantuan sosial pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin. Namun pada sisi lain, capaian hingga tahun 2023 menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Katingan baru menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP. Artinya, kinerja pemerintah selama ini belum berhasil memenuhi kebutuhan pendidikan dasar 9 tahun. Di Kabupaten Katingan masih dijumpai kasus putus sekolah dengan tren yang terus menurun. Pada tahun 2021 terdapat 195 siswa putus sekolah pada jenjang SD dan 146 siswa putus sekolah pada jenjang SMP (Dinas Pendidikan, 2023⁷).

Data Gambar 2.14 juga memperlihatkan tren indikator harapan lama sekolah di Kabupaten Katingan pada 2018-2023. Trennya dapat dikatakan relatif stagnan, meskipun angkanya naik. Pada 2018, rata-rata lama sekolah adalah 12,21 tahun dan meningkat 0,3 tahun menjadi 12,51 tahun pada 2019. Angka ini naik menjadi 12,67 tahun pada 2020 dan 12,81 tahun pada 2021. Pada 2022 meningkat menjadi 12,97 tahun dan cenderung tidak berubah pada 2023 (12,98 tahun). Data ini menunjukkan bahwa kesempatan anak-anak di Kabupaten Katingan untuk bersekolah dan menamatkan pendidikan hingga jenjang Diploma I.

Selain kedua indikator di atas, kemajuan pembangunan kependudukan di bidang pendidikan juga ditunjukkan oleh semakin meningkatnya partisipasi masyarakat



Gambar 2.14 Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

⁷ Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan. 2023. *Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026*. Katingan: Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

di setiap jenjang pendidikan. Partisipasi tersebut dapat dilihat dari banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang dan usianya, yang dikenal dengan angka partisipasi murni (APM). APM ini menggambarkan proporsi anak usia sekolah yang dapat sekolah tepat waktu.

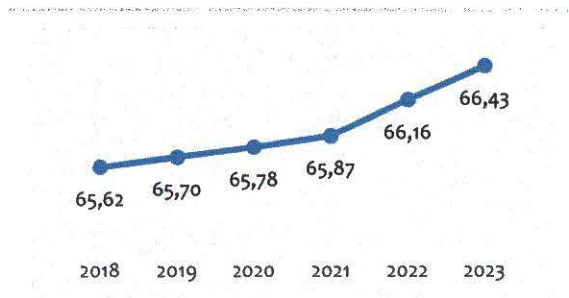
Pada jenjang sekolah dasar, terjadi penurunan APM, dari 100,00 persen pada 2018 menjadi 99,87 persen dan 99,85 persen pada 2019-2020. Pada 2021 turun menjadi 99,78 persen dan turun lagi menjadi 98,90 persen pada 2022. Pada 2023, APM jenjang SD Kabupaten Katingan sebesar 98,99 persen. Angka partisipasi murni SMP pada tahun 2018 sebesar 76,32 persen. Tahun selanjutnya mengalami penurunan sedikit 0,4 persen menjadi 76,05 persen pada 2019, kemudian menjadi 75,98 persen pada 2020 dan naik kembali menjadi 76,13 persen pada 2021. Pada 2022, angka partisipasi berada pada angka 76,19 persen. Pada 2023 naik 1,9 persen pada 2023 menjadi 78,14 persen. Data APM tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi tingkat SD/ sederajat selama 2018-2023 menurun, sementara tren angka partisipasi SMP meningkat. Peningkatan ini tidak lepas dari kinerja pemerintah dan seluruh komponen terkait untuk Pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan pertama (SMP/ sederajat) angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan sekolah dasar.

Pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota, yaitu pelayanan pendidikan dasar meliputi layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP). Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan telah melakukan beberapa program untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap layanan pendidikan. Di antaranya adalah pemberian bantuan sosial dan biaya personel pendidikan untuk peserta didik dari keluarga miskin/ rentan miskin, serta penyediaan bantuan operasional satuan pendidikan. Di samping itu, Pemerintah juga meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur/ sarana prasarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan sehingga terjadi transfer pengetahuan yang lebih baik ke peserta didik dalam rangka mempersiapkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2.2.3 Aspek Kesehatan

Indikator kesehatan penyusun IPM adalah angka harapan hidup yang menunjuk pada perkiraan lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. Hingga 2023, angka harapan hidup Katingan dapat dikatakan masih relatif rendah, berada di bawah angka provinsi (70,27) dan nasional (72,13). Angka ini pun masih di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Umur harapan hidup penduduk Katingan dalam enam tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang terlalu signifikan, (Gambar 2.15). Pada 2018, angka harapan hidup adalah 65,62 tahun dan meningkat menjadi 65,70 tahun pada 2019 dan 65,78 tahun pada 2020. Pada 2021, meningkat

menjadi 65,87. Tahun 2022, umur harapan hidup meningkat cukup signifikan menjadi 66,16 tahun dan naik lagi menjadi 66,43 tahun pada 2023. Peningkatan umur harapan hidup tidak terlepas dari peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Katingan, program preventif dan promotif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, perilaku hidup sehat yang semakin baik, termasuk juga peningkatan taraf hidup masyarakat.



Gambar 2.15 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Metode Baru) Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/26/43/2/-metode-baru-umur-harapan-hidup-menurut-kabupaten-kota.html>

Meskipun trennya naik dalam tiga tahun terakhir, namun capaian angka harapan hidup Kabupaten Katingan dapat dikatakan masih relatif rendah, dan masih di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Rendahnya angka harapan hidup ini merupakan salah satu permasalahan di Kabupaten Katingan.

Selain umur harapan hidup, ukuran penting untuk menggambarkan kemajuan pembangunan kependudukan pada aspek kesehatan adalah angka kematian ibu, bayi, dan balita. Kemajuan

pembangunan dikatakan baik, apabila di setiap 1.000 kelahiran bayi hidup tidak ditemukan kematian atau dengan angka kematian serendah-rendahnya. Kematian yang terjadi di masa kehamilan dan persalinan merupakan kondisi riskan dan rentan. Oleh karena itu, pencatatan angka kematian cukup penting untuk memantau kinerja pembangunan kesehatan. Namun, pencatatan angka kematian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat terbatas cakupannya. Akibatnya, *monitoring* dan evaluasi dalam proses pembangunan kesehatan sering kali tidak dapat maksimal.

Di Kabupaten Katingan masih ditemui kasus kematian ibu dan bayi. Tabel 2.2 memperlihatkan data angka kematian bayi, balita, neonatal, dan kematian ibu yang tercatat di Kabupaten Katingan pada 2018-2023. Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan tren fluktuatif. Pada 2018, AKB Kabupaten Katingan berada pada angka 10,61 dan naik menjadi 13,32 pada 2019. Angka ini menurun cukup signifikan menjadi 6,17 pada 2020. Pada 2021 menunjukkan peningkatan sangat tajam menjadi 9,8 dan turun lagi menjadi 8,5 pada 2022. Namun pada 2023, terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 12,7. Sedangkan angka kematian neonatal pada 2019 berada pada angka 13,0; kemudian turun sangat signifikan menjadi 5,6 pada 2020. Namun pada 2022 meningkat lagi menjadi 7,5, dan naik lagi menjadi 8,4 pada 2023.

A
Q
K

Tabel 2.2 Angka Kematian Bayi, Balita, Neonatal, dan Ibu di Kabupaten Katingan, 2018-2023

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH	10,61	13,32	6,17	20,10	8,57	12,69
Angka kematian balita per 1.000 KH	10,61	15,39	6,78	51,30	0,68	0,35
Angka kematian neonatal per 1.000 KH	9,4	13,0	5,55	16,30	7,51	8,40
Angka kematian ibu per 100.000 KH	121,29	207,16	92,50	152,0	171,41	176,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Indikator kematian lainnya yang penting untuk mengukur kemajuan pembangunan kependudukan adalah kematian ibu. Tingkat kematian ibu yang tinggi menggambarkan tidak berjalannya sistem dan layanan kesehatan ibu, baik dalam perawatan, pengobatan, maupun saat persalinan. Angka kematian ibu per 100.000 KH pada 2018 berada pada 121,3 dan meningkat pada 2019 sebesar 207,2 dan turun cukup signifikan sebesar 92,5 pada 2020. Lalu naik cukup signifikan menjadi 152,0 pada 2021, naik lagi menjadi 171,4 pada 2022, dan naik lagi menjadi 176,0 pada 2023.

Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi menjadi isu strategis sektor kesehatan di Kabupaten Katingan. Kematian bayi banyak disebabkan oleh bayi berat lahir rendah (BBLR) atau prematuritas dan asfiksia. Bayi dengan kondisi seperti ini rentan, mudah sakit, dan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan bayi lahir prematur atau BBLR. Sedangkan penyebab kematian ibu hamil umumnya adalah pendarahan dan eklamsia. Sementara, kasus kematian pada balita, biasanya disebabkan oleh pneumonia, penyakit bawaan, dan diare. Tidak jarang juga dijumpai kematian pada anak ini merupakan risiko dari kondisi lingkungan yang buruk.

Tingkat kematian ibu, bayi, dan balita mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemberian layanan. Tabel 2.3 memperlihatkan cakupan layanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita pada 2021-2022. Meskipun angkanya meningkat, namun cakupan layanan kesehatan ibu bersalin dan balita masih relatif rendah, yaitu sekitar 60 persen. Sementara cakupan layanan kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, serta layanan kesehatan bayi baru lahir justru menurun di tahun 2022. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan intervensi dalam berbagai program kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Katingan, baik yang bersifat preventif maupun promotif. Pemerintah perlu terus mendorong ibu hamil memeriksakan kesehatannya secara rutin melalui berbagai media yang ada, program pemberian tablet tambah darah, dan program pemberian makanan tambahan pada ibu kondisi KEK (kurang energi kronik). Untuk mengatasi kasus kematian balita, salah satunya adalah mendorong perilaku hidup sehat.

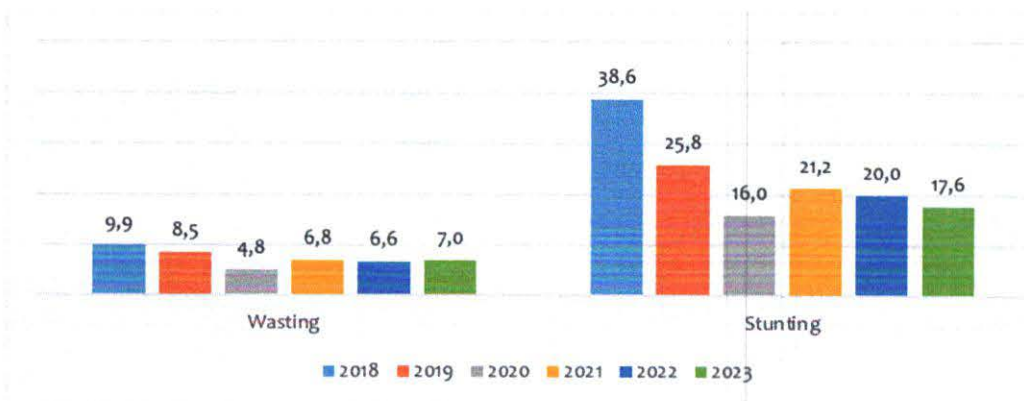
(Handwritten signature/initials)

Tabel 2.3 Cakupan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Katingan, 2021-2022

Jenis Pelayanan Kesehatan	Cakupan (%)	
	2021	2022
Pelayanan kesehatan ibu hamil	87,4	83,7
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	52,2	61,3
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	85,0	78,5
Pelayanan kesehatan balita	53,5	62,9
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	8,4	4,9
Cakupan pelayanan ibu nifas	82,2	79,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Persoalan kesehatan anak selanjutnya adalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi dapat berupa *wasting* dan *stunting*. *Wasting* (gizi kurang dan gizi buruk) adalah kondisi anak sangat kurus yang disebabkan oleh tidak memadainya asupan nutrisi anak, baik secara kualitas maupun kuantitas. Anak dengan *wasting* mudah terkena infeksi dan memiliki risiko kematian yang cukup tinggi. Sedangkan kondisi anak dengan kasus *stunting* ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, umumnya diakibatkan kekurangan gizi dalam jangka panjang (kronik), dialami sejak dari dalam kandungan hingga usia dua tahun (1000 hari pertama kehidupan).



Gambar 2.16 Prevalensi Balita dengan Stunting dan Wasting Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Gambar 2.16 menampilkan prevalensi balita dengan *wasting* dan *stunting*. Pada 2018, prevalensi *wasting* sebesar 9,9 persen dan turun 14 persen menjadi 8,5 persen pada 2019. Tahun 2020 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 4,8 persen. Namun tahun 2021 naik lagi sebesar 41,3 persen menjadi 6,8 persen.

Tahun 2022, turun sedikit menjadi 6,6 persen. Tahun 2023, prevalensi *wasting* Kabupaten Katingan berada pada angka 7,0 persen.

Stunting merupakan permasalahan global karena dampak *stunting* sangat signifikan terhadap tumbuh kembang anak yang akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan saat dewasa. WHO mengamanatkan negara-negara untuk menekan angka *stunting* sebesar 40 persen dari angka *baseline*. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menargetkan penurunan prevalensi *stunting* pada anak di bawah usia dua tahun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Pada 2018, angka *stunting* sangat tinggi, yaitu 38,6 persen, lalu turun cukup signifikan menjadi 25,8 persen pada 2019. Angka ini turun lagi sebesar 38 persen menjadi 16,0 persen pada 2020. Namun naik 32,6 persen menjadi 21,2 persen pada 2021. Di tahun 2023, angka *stunting* Kabupaten Katingan berada pada angka 17,6 persen. Harapannya, ke depan semakin turun, sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahwa prevalensi *stunting* Kabupaten Katingan pada 2024 sebesar 14 persen.

Terjadinya *stunting* disebabkan oleh multifaktor. Pada tataran individu, aspek pengetahuan dan perilaku menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, pemerintah terus menggalakkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan *stunting*. Faktor penyebab yang lain di antaranya adalah rendahnya asupan zat gisi, pola pengasuhan balita yang kurang baik, buruknya sanitasi lingkungan dan ketersediaan air bersih. Mengingat kompleksnya kasus *stunting*, maka perlu sinergitas dalam penanganannya.

Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan pada anak adalah melalui program imunisasi, baik program rutin maupun program tambahan. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR. Salah satu indikator untuk melihat capaian program imunisasi adalah cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* (UCI). Desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan yang 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Gambar 2.17 memperlihatkan cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, terdapat 71,4



Gambar 2.17 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (%) di Kabupaten Katingan, 2019-2022

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan

persen, meningkat menjadi 75,2 persen pada 2020. Pada 2021, angkanya naik lagi menjadi 78,3 persen dan naik cukup signifikan menjadi 85,3 persen pada 2022.

Tabel 2.4 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Katingan, 2019-2022

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Persentase rumah tangga dengan sumber air utama untuk minum (air kemasan, air isi ulang & leding)	36,7	41,0	52,8	40,3
Persentase rumah tangga dengan fasilitas air minum bersih	72,8	80,6	78,1	62,2
Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri	81,8	82,3	83,7	82,8
Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama dengan tangki septik	67,2	61,6	63,2	72,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Terkait dengan kesadaran masyarakat untuk penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi di Kabupaten, tampaknya masih perlu ditingkatkan lagi (Tabel 2.4). Dalam hal penyediaan air yang layak untuk diminum (baik dalam bentuk air kemasan, isi ulang, dan leding), cakupannya sangat rendah, yakni pada tahun 2022 hanya sekitar 40 persen. Sementara penyediaan fasilitas air minum bersih, trennya cenderung turun, dan angka terakhir sebesar 62,2 persen. Tren yang menurun juga terjadi pada penyediaan fasilitas tempat buang air besar sendiri, tahun 2022 sebanyak 82,8 persen. Sedangkan persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar, baik sendiri maupun bersama, sebesar 72,3 persen.



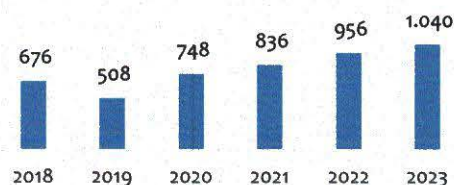
Gambar 2.18 Perkembangan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular di Kabupaten Katingan, 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Morbiditas juga menjadi isu strategis pembangunan di Kabupaten Katingan. Jumlah kasus penyakit menular menunjukkan tren fluktuatif. Pada 2019, jumlah kasus penyakit menular sebanyak 2.391, yang kemudian naik 115 persen menjadi 5.149 pada 2020. Pada 2021 menurun menjadi 3.333 kasus, turun lagi menjadi 2.334. Di tahun 2023, jumlahnya naik lagi menjadi 2.401. Sedangkan jumlah kasus penyakit tidak menular menunjukkan tren menurun pada dua tahun terakhir, yaitu 105.998 kasus pada 2022, dan menurun menjadi 74.177 pada tahun 2023. Di

tahun 2013, Dinas Kesehatan mencatat ada sepuluh jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk Kabupaten Katingan, yaitu hipertensi, ISPA/infeksi saluran pernapasan akut, karies gigi, gastritis, infeksi kulit, diare, ISBA/infeksi saluran napas bawah akut, konjungtivitas, dan gastroenteritis. Tiga jenis penyakit dengan jumlah penderita paling banyak adalah hipertensi (2.259), disusul kemudian ISPA/infeksi saluran pernapasan akut (2.253), dan karies gigi (1.181).

Pemerintah Kabupaten Katingan terus berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik guna mengatasi berbagai persoalan di atas. Hal ini tampak dari bertambahnya jumlah tenaga kesehatan tiap tahunnya, baik dokter, perawat, maupun bidan. Dalam 6 tahun terakhir, ada peningkatan 54 persen, dari 676 personel pada 2018 menjadi 1.040 personel pada 2023. Jika dilihat tren per tahunnya, sempat terjadi penurunan jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2019. Dengan semakin bertambahnya jumlah tenaga kesehatan, diharapkan layanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik.

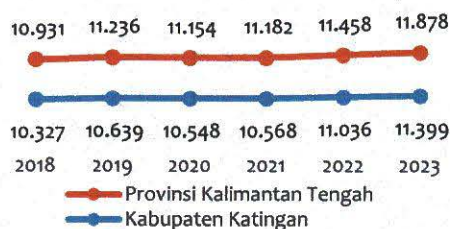


Gambar 2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: BPS, Kabupaten Katingan dalam Angka

2.2.4 Aspek Ekonomi

Indikator pembangunan ekonomi yang digunakan untuk mengukur IPM adalah pengeluaran per kapita. Melalui indikator ini, dapat diketahui tingkat kelayakan hidup seseorang. Gambar 2.20 menampilkan pengeluaran per kapita disesuaikan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan. Tampak bahwa dalam kurun waktu 2018-2023, tren keduanya sama, yakni relatif naik setiap tahunnya. Penurunan pengeluaran per kapita terjadi pada kurun waktu 2019-2020. Data juga menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Katingan berada di bawah



Gambar 2.20 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan/Orang/Tahun) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: BPS, <https://kalteng.bps.go.id/indikator/26/544/1-metode-baru-pengeluaran-per-kapita-yang-disesuaikan-menurut-kabupaten-kota.html>

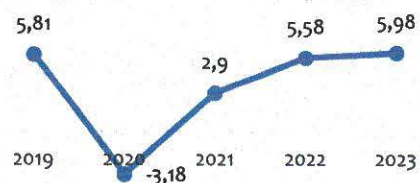
angka Provinsi. Di antara 14 kabupaten yang ada, Kabupaten Katingan menempati posisi 9.

Tabel 2.5 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kotawaringin Barat	12.788	13.175	13.109	13.117	13.352	13.798
Kotawaringin Timur	11.556	11.905	11.854	11.866	12.048	12.546
Kapuas	10.738	11.063	11.015	11.148	11.377	11.829
Barito Selatan	11.242	11.582	11.486	11.492	11.780	12.067
Barito Utara	9.357	10.010	9.936	9.951	10.182	10.720
Sukamara	8.482	8.738	8.674	8.773	9.225	9.494
Lamandau	10.996	11.278	11.190	11.234	11.559	12.050
Seruyan	9.110	9.385	9.370	9.420	9.821	10.157
Katingan	10.327	10.639	10.548	10.568	11.036	11.399
Pulang Pisau	9.807	10.104	10.047	10.082	10.273	10.752
Gunung Mas	10.504	10.822	10.793	10.809	10.990	11.462
Barito Timur	11.000	11.333	11.319	11.322	11.710	12.083
Murung Raya	10.164	10.471	10.419	10.449	10.697	11.053
Palangka Raya	13.677	14.091	14.055	14.070	14.345	14.727

Sumber: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/26/544/1/-metode-baru-pengeluaran-per-kapita-yang-disesuaikan-menurut-kabupaten-kota.html>

Peningkatan pengeluaran per kapita penduduk ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Katingan meningkat. Hal ini mengindikasikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Katingan. Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat ini juga tidak lepas dari berbagai program perlindungan sosial pemerintah, baik dalam bentuk bantuan sosial ataupun subsidi.



Gambar 2.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: BPS, Kabupaten Katingan dalam Angka

Tren laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif, yang tampak dari laju pertumbuhan PDRB (Gambar

2.21). Pada 2020, LPE Kabupaten Katingan masih berada pada angka 5,81 persen, terkonstraksi secara mendalam sebesar 8,99 persen menjadi -3,18 pada tahun 2021. Pelambatan yang sangat signifikan ini sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi pascapandemi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan, salah satunya melalui *government spending strategy* yang dilakukan pemerintah dan peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Perbaikan kondisi ini tampak dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan PDRB menjadi 2,90 persen pada 2021 dan naik lagi menjadi 5,58 persen pada 2022. Pada 2023, juga masih menunjukkan tren yang menggembirakan menjadi 5,98 persen.

Secara rinci, kapasitas sumber daya, struktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah dilihat dari PDRB (produk domestik regional bruto) berdasarkan harga berlaku dan harga konstan 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Data Tabel 2.6 mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian daerah Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan.

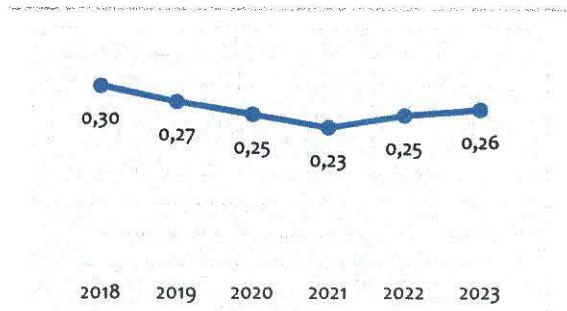
Tabel 2.6 PDRB berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Kabupaten Katingan, 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (ADHB)	8.223,7	8.306,5	9.079,2	9.968,6	10.755,9
PDRB (ADHK)	5.110,2	4.944,3	5.087,5	5.375,0	5.696,6
PDRB per kapita (ADHB)	48,4	51,1	55	59,7	63,5
PDRB per kapita (ADHK)	30,1	30,5	31	32,2	33,6

Sumber: BPS, Kabupaten Katingan Dalam Angka

Komoditas yang cukup penting di Kabupaten Katingan adalah sawit, yang memberikan kontribusi sebesar 26,51 persen pada PDRB tahun 2022. Komoditas unggulan lainnya yang menjadi potensi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Katingan di antaranya adalah rotan serta hasil hutan bukan kayu dan paludikultur. Di samping itu, pemerintah juga terus mengembangkan ekowisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

g B t



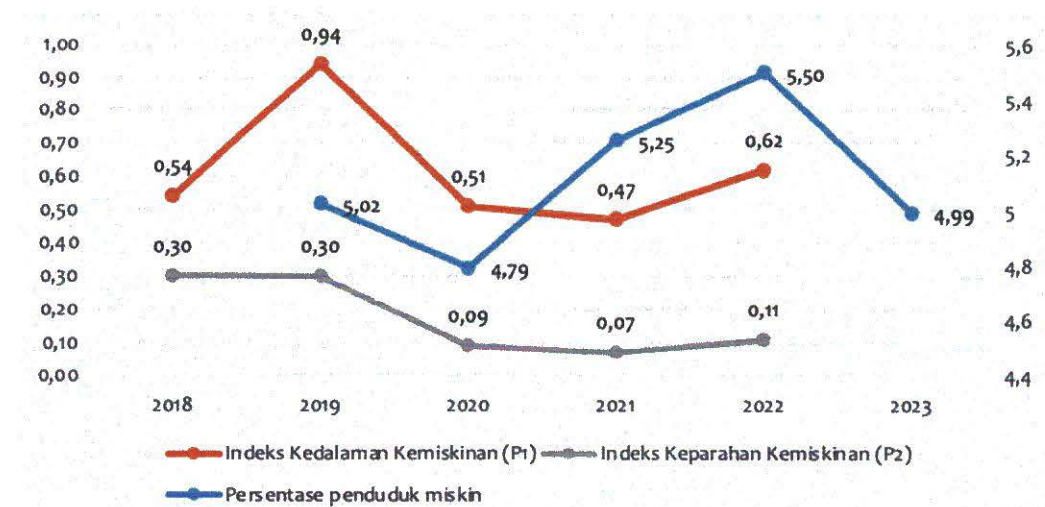
Gambar 2.22 Rasio Gini Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: BPS

Namun disadari bahwa keberhasilan pembangunan bidang ekonomi masih diperhadapkan pada persoalan ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan ekonomi penduduk dapat dilihat dari rasio gini, dengan nilai antara 0 dan 1. Angka rasio mendekati satu berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk suatu wilayah. Gambar 2.22 memperlihatkan bahwa rasio gini

Kabupaten Katingan relatif rendah dengan tren fluktuatif. Pada 2018, rasio gini sebesar 0,30 dan turun 0,03 poin pada 2019. Tren yang sama terjadi hingga 2021 dengan angka sebesar 0,23. Namun rasio gini kembali ke angka 0,25 pada 2022 dan naik lagi 0,26 pada 2023.

Kemiskinan menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan. Setidaknya, ada tiga indikator terkait dengan isu kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).



Gambar 2.23 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: Susenas dalam Rencana Pembangunan Daerah

Gambar 2.23 memperlihatkan persentase penduduk miskin pada 2019 sebesar 5,02 persen dan turun menjadi 4,79 persen pada 2020. Namun pada 2021, terjadi peningkatan 0,46 persen menjadi 5,25 dan naik lagi menjadi 5,50 persen pada 2022. Tahun 2023 menurun cukup signifikan menjadi 4,99 persen. Indeks

t
g
g

kedalaman kemiskinan (P1) menunjukkan tren yang fluktuatif. Indeks PI pada 2018 tercatat sebesar 0,54 dan naik cukup signifikan pada 2019 menjadi 0,94. Pada 2020-2021 menunjukkan tren yang menurun, yaitu menjadi 0,51 dan 0,47. Namun pada 2022 naik lagi menjadi 0,62. Sementara indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada 2018-2019, indeks P2 Kabupaten Katingan sebesar 0,30, lalu turun cukup signifikan 0,09 pada 2020. Pada 2021, turun menjadi 0,07, namun pada 2022 naik menjadi 0,11. Dari ketiga indikator ini menunjukkan bahwa (1) angka kemiskinan Kabupaten Katingan cukup rendah, lebih rendah dibanding angka provinsi (5,11 persen pada 2023) dan nasional (9,36 persen pada Maret 2023), (2) adanya perbaikan kesejahteraan penduduk miskin, (3) ketimpangan di antara penduduk miskin semakin berkurang.

Keberhasilan pembangunan ekonomi juga dapat dilihat dari kemampuan pasar dalam menyerap penduduk usia kerja. Tabel 2.7 memperlihatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Katingan. Ketersediaan tenaga kerja (*labor supply*) potensial di Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir pada kisaran 60-70 persen, dengan tren yang cukup fluktuatif. Tren menurun ditunjukkan pada periode 2018-2021, yaitu 69,49 persen pada 2018 menjadi 64,38 persen pada 2021. Pada 2022 naik menjadi 65,9 persen, namun turun lagi menjadi 64,42 pada 2023. Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, seperti struktur umur, tingkat upah, dan tingkat pendidikan.

Tabel 2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Katingan, 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,49	66,80	64,55	64,38	65,94	64,42
TPAK Laki-laki	85,49	89,41	83,15	84,11	86,33	85,74
TPAK Perempuan	51,34	49,20	43,65	42,25	43,11	41,32
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,78	5,45	5,69	5,50	5,33	4,96
- TPT Laki-laki	3,38	4,84	6,08	5,78	4,53	4,41
- TPT Perempuan	7,08	6,11	4,86	4,87	7,14	6,20

Sumber: BPS dalam Rencana Tenaga Kerja Daerah

Pemerintah Kabupaten Katingan dapat dikatakan cukup berhasil dalam menekan angka pengangguran. Pada 2018, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,78 persen. Angka ini naik pada masa pandemi, yaitu 5,45 persen pada 2019 dan 5,69 persen 2020. Meningkatnya TPT ini mengingat banyak penduduk usia kerja yang kehilangan pekerjaan saat pandemi. Seiring dengan masa pemulihan ekonomi pascapandemi, tingkat pengangguran terbuka di

t
9 2

Kabupaten Katingan juga mengalami penurunan. Tren TPT pada kurun 2020-2023 terus menurun, dari 5,69 pada 2020 menjadi 5,50 pada 2021, turun lagi menjadi 5,33 pada 2022. Pada 2023, TPT Kabupaten Katingan sebesar 4,96 persen. Pascapandemi, roda aktivitas ekonomi mulai bergerak, baik pada sektor maupun informal, sehingga dapat menyerap tenaga kerja kembali. Keberhasilan menurunkan angka TPT ini tidak lepas dari beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Katingan, yaitu (1) kebijakan yang mewajibkan perusahaan besar swasta untuk menyertakan tenaga kerja lokal ketika berinvestasi di Kabupaten Katingan, (2) penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan warga, dan (3) penyelenggaraan event *job fair*.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase TPAK laki-laki hampir dua kali lipat dibanding perempuan. Tren kedua kelompok ini cukup fluktuatif dengan pola yang berbeda. Namun sebaliknya, TPT perempuan lebih banyak dibanding laki-laki dengan pola tren yang juga berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan akses terhadap pekerjaan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Katingan.

2.3 Pembangunan Keluarga

Secara legal formal, konsep keluarga di Indonesia adalah adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, atau adopsi (UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan regulasi tersebut, keluarga berkualitas dicirikan oleh beberapa aspek, yaitu dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, sejahtera, sehat, maju, ulet dan tangguh, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, mampu mengembangkan diri dan keluarganya, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Guna meningkatkan kualitas keluarga, pemerintah terus berupaya mewujudkan pembangunan keluarga. Salah satunya melalui program Tri Bina, yaitu program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran dan kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Tri Bina memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita maupun remaja, serta mengedepankan kesejahteraan lansia.

Tabel 2.8 memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan keluarga meningkat. Cakupan keluarga dalam pembinaan Tri Bina menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 25,61 persen

pada 2019 meningkat sangat signifikan pada 2022 menjadi 67,04 persen (meningkat hingga 162 persen). Demikian halnya dengan cakupan remaja dalam program PIK (Pusat Informasi dan Konseling) juga mengalami peningkatan sangat signifikan, dari 27,87 persen pada 2019 menjadi 63,09 persen pada 2022 (meningkat 126 persen). Jumlah bina keluarga, baik balita, remaja, maupun lansia juga bertambah meskipun tidak terlalu signifikan.

Peningkatan partisipasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus praktik baik dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam (a) mencetak balita yang sehat dan memiliki tumbuh kembang yang baik, (b) membentuk remaja yang memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional, serta (c) membentuk lansia produktif, aktif, mandiri, sehat, dan bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat.

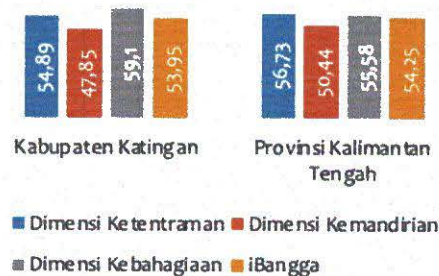
Tabel 2.8 Cakupan Kepesertaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kabupaten Katingan, 2019-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Keluarga dalam Pembinaan Tri Bina (%)	NA	25,61	39,42	60,95	67,04	NA
Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) (%)	NA	27,87	43,43	58,77	63,09	NA
Jumlah Bina Keluarga Balita	26	31	34	34	30	53
Jumlah Bina Keluarga Remaja	16	16	17	17	18	21
Jumlah Bina Keluarga Lansia	13	16	16	16	19	19

Sumber: Renstra DP3AP2KB

Untuk melihat keberhasilan kinerja pembangunan keluarga, BKKBN (2020) mengembangkan iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga yang lebih luas. iBangga mengukur kualitas keluarga dari 11 indikator, yang dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi ketenteraman (4 indikator), kemandirian (5 indikator), dan kebahagiaan keluarga (2 indikator). iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan.

Dengan melihat status pembangunan keluarga ini, maka pemerintah daerah



Gambar 2.24 iBangga Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Sumber: BKKBN, 2023

dapat merumuskan kebijakan/program/kegiatan yang lebih tepat. Gambar 2.24 memperlihatkan bahwa (a) iBangga Kabupaten Katingan termasuk dalam kategori cukup baik (berkembang), (b) pada tahun 2022, capaian iBangga Kabupaten Katingan belum memenuhi target nasional (56,99) dan masih di bawah angka provinsi; (c) paling rendah dimensi kemandirian, paling tinggi dimensi kebahagiaan.

Dimensi kebahagiaan merupakan elemen penting bagi kesejahteraan individu. Pada awalnya pemerintah memakai Produk Domestik Bruto sebagai indikator utama kesejahteraan dan pertumbuhan negara⁸. Dengan berjalannya waktu, penerapan Produk Domestik Bruto ini dianggap sebagai strategi yang kurang pas karena ada ketidaksinambungan antara Produk Domestik Bruto dan pendapatan serta kesenjangan antara pendapatan dan kebahagiaan. Selain itu, Produk Domestik Bruto bisa terus berkembang sekalipun pendapatan per kapita mayoritas penduduk mengalami penurunan⁹. Tambahan pula pendapatan hanyalah satu penentu kebahagiaan dan kesejahteraan¹⁰. Ada banyak faktor yang menentukan kebahagiaan, seperti hubungan personal, kesehatan, pendidikan distribusi pendapatan dan lain-lain, sekalipun peran faktor-faktor tersebut dalam membentuk kebahagiaan bervariasi dari satu orang ke orang lainnya, atau dari satu budaya ke budaya lainnya¹¹. Beberapa negara sudah memakai indeks kebahagiaan, selain Produk Domestik Bruto, untuk mengukur kesejahteraan rakyatnya.¹²

Terkait dengan indeks kebahagiaan, tidak ditemukan data Kabupaten Katingan. Sebagai gambaran, Tabel 2.9 menampilkan indeks kebahagiaan pada level provinsi dan nasional. Angka provinsi dan nasional menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2014, 2017, dan 2021. Indeks kebahagiaan di tahun 2017 dan 2021 diukur berdasarkan tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*affection*) dan makna hidup (*eudaimonia*). Sementara metode

Tabel 2.9 Indeks Kebahagiaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia, 2014, 2017, 2021

Wilayah	2014	2017	2021
Kalimantan Tengah	70,01	70,85	73,13
Indonesia	68,28	70,69	71,49

Sumber: Badan Pusat Statistik. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan, 2014, 2017, 2021.

⁸ Ovaska, T., & Takashima, R. 2006. Economic policy and the level of self-perceived well-being: An international comparison. *The Journal of Socio-Economics*, 35, 308–325. doi:10.1016/j.socec.2005.11.054

⁹ Layard, R. 2005. *Happiness: Lessons from a new science*. Penguin.

¹⁰ Diener, E., Tay, L., & Oishi, S. 2013. Rising income and the subjective well-being of nations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 104, 267–276. doi:10.1037/a0030487

¹¹ Ovaska, T., & Takashima, R. 2006. Ibid.

¹² Ovaska, T., & Takashima, R. 2006. Ibid.

sebelumnya (tahun 2014) hanya diukur dengan kepuasan hidup (*life satisfaction*).

Dimensi kepuasan hidup diukur dengan subdimensi kepuasan hidup personal dan subdimensi kepuasan hidup sosial. Subdimensi kepuasan hidup personal terdiri dari (a) pendidikan dan keterampilan, (b) pekerjaan/usaha/kegiatan utama, (c) pendapatan rumah tangga, (d) kesehatan, (e) rumah dan fasilitas rumah. Sementara itu, subdimensi kepuasan hidup sosial terdiri dari (a) keharmonisan keluarga, (b) ketersediaan waktu luang, (c) hubungan sosial di lingkungan, (d) keadaan lingkungan, dan (e) kondisi keamanan. Dimensi perasaan (*affect*) diukur berdasarkan perasaan senang, tidak khawatir dan tidak tertekan. Sementara itu makna hidup atau *eudaimonia* dilihat dari (a) penerimaan diri, (b) tujuan hidup, (c) pengembangan diri, (d) kemandirian, (e) penguasaan lingkungan, dan (e) hubungan positif dengan orang lain

Apabila ditelaah lebih lanjut, indeks kebahagiaan merangkum beberapa aspek dari *grand design* pembangunan kependudukan, terutama kualitas penduduk dan pembangunan keluarga, sekalipun indeks kebahagiaan mengukur kesejahteraan penduduk secara subjektif. Indeks kebahagiaan melengkapi gambaran tentang kondisi penduduk suatu daerah yang telah dipotret dengan ukuran yang sifatnya objektif melalui berbagai tren demografis.

2.3.1 Pemberdayaan Gender

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga adalah mewujudkan kesetaraan gender. Adanya kesetaraan relasi dalam keluarga berdampak positif bagi pembangunan keluarga dan pembangunan manusia secara lebih luas. Ada tiga tolok ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia), tetapi menjelaskan lebih jauh ketidakadilan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) melihat peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berfokus pada kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

g G t
h

**Tabel 2.10 Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender,
Kabupaten Katingan, 2018-2023**

Jenis Indeks	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	85,7	85,6	85,4	85,4	86,2	86,6
Indeks Pemberdayaan Gender	73,3	66,6	66,4	67,7	66,8	66,8
Indeks Ketimpangan Gender	NA	0,6	0,6	0,6	0,6	NA

Sumber: Renstra DP3AP2KB

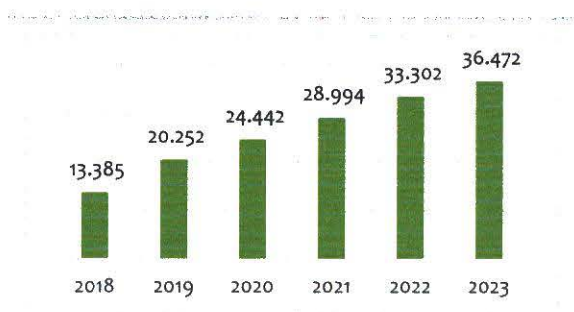
Apabila dilihat dari IPG, maka pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Katingan semakin setara. Namun, berdasarkan tren IDG, peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan politik di Katingan cenderung menurun. Data BPS memperkuat hal tersebut bahwa keterwakilan perempuan di bidang politik di Katingan masih belum optimal. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Katingan beranggotakan 25 orang, terdiri dari 21 laki-laki dan 4 orang perempuan.¹³ Padahal semua partai politik dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota mempunyai komitmen untuk mencalonkan 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif di setiap daerah perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas calon legislatif perempuan di bidang politik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan *workshop* tentang *capacity building* di bulan Juli, 2023¹⁴.

Tabel 2.10 juga memperlihatkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam kesehatan reproduksi, pasar kerja, dan pemberdayaan masih cukup tinggi. Sebagaimana dipaparkan pada Pilar Kualitas Penduduk, persentase TPAK laki-laki hampir dua kali lipat dibanding perempuan. Artinya, ada ketimpangan akses perempuan terhadap pasar kerja. Pemerintah, dalam hal ini DP3AP2KB, telah mengupayakan berbagai program pemberdayaan perempuan, khususnya program pelatihan.

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS) Katingan. 2024. *Kabupaten Katingan Dalam Angka 2024*. Katingan: BPS Kabupaten Katingan.

¹⁴ <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/41537/upaya-dinas-p3appkb-prov-kalteng-tingkatkan-keterwakilan-perempuan-di-lembaga-legislatif-periode-2024-2029>

2.3.2 Perkawinan



Gambar 2.25 Jumlah Perkawinan yang Tercatat di Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: Renstra DP3AP2KB

tren meningkat sebesar 172 persen (Gambar 2.25). Fenomena ini mengindikasikan semakin tingginya peristiwa perkawinan sebagai salah satu peristiwa penting kependudukan, sekaligus menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Perkawinan yang tidak tercatat pada akhirnya tidak akan menguntungkan bagi perempuan. Tingginya jumlah perkawinan ini harus terus diiringi dengan upaya pembangunan keluarga agar terbentuk keluarga yang tangguh, harmonis, dan sejahtera.

Pernikahan usia dini di Katingan merupakan masalah yang dilematis bagi Pengadilan Agama Kasongan. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa syarat usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tambahan pula, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga melarang pernikahan dini. Di sisi lain, permohonan dispensasi dari orang tua calon pengantin terus meningkat. Salah satu alasan permintaan dispensasi adalah kekhawatiran terhadap kemungkinan terjerumusnya anak dalam pergaulan bebas. Tidak jarang ketika permohonan dispensasi pernikahan ditolak oleh pengadilan agama, orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya secara siri.

Untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia, persyaratan pengajuan permohonan dispensasi pernikahan semakin ketat. Beberapa persyaratan itu meliputi surat bukti pemeriksaan kesehatan dan konseling tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau puskesmas. Selain itu, orang tua juga diberi masukan tentang berbagai dampak pernikahan dini yang merugikan anak. Dampak itu terdiri dari terputusnya pendidikan anak dan belum matangnya psikologi anak sehingga mereka rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Tambahan pula, pertumbuhan organ reproduksi dari kalangan anak perempuan belum sempurna, sehingga kelahiran di kalangan mereka mengandung risiko tinggi. Pernikahan dini juga rawan

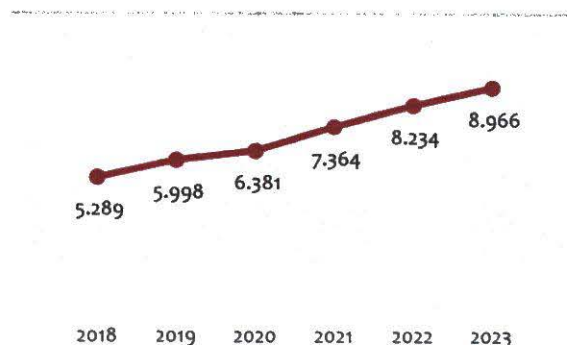
terhadap perceraian. Selain itu risiko *stunting* di kalangan bayi yang dilahirkan anak perempuan juga tinggi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kasongan telah menandatangani kerja sama dengan Dinas Kesehatan Katingan berkaitan dengan dispensasi pernikahan usia dini untuk memberikan pendidikan tentang pencegahan *stunting* dan risiko gangguan kehamilan.

Upaya pencegahan pernikahan dini bukanlah kewajiban Pengadilan Agama saja, melainkan tanggung jawab berbagai pemangku kebijakan. Perlu ada kerja sama dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru agama untuk menekan angka pernikahan dini. Kesadaran mereka tentang dampak pernikahan dini bagi masa depan orang muda perlu ditingkatkan sehingga mereka lebih bijak dalam menyikapi keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun¹⁵.

2.3.3 Perceraian

Secara lebih khusus, pembangunan keluarga bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Adanya kasus perceraian yang dialami pasangan mengindikasikan “kegagalan” pembangunan keluarga. Data kasus perceraian di Kabupaten Katingan menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan karena jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya (Gambar 2.26). Pada 2018, terdapat 5.289 kasus dan meningkat 13,4 persen menjadi 5.998 kasus pada 2019. Pada 2020, bertambah 6,4 persen menjadi 6.381 kasus dan meningkat cukup signifikan sebesar 15,4 persen pada 2021 menjadi 7.363 kasus. Jumlah ini bertambah lagi 11,8 persen menjadi 8.234 kasus pada 2022, dan di tahun 2023 naik 8,9 persen menjadi 8.966 kasus.

Ada beberapa penyebab perceraian di Katingan, yaitu masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran, suami menunjukkan penyimpangan sosial (memakai narkoba, sering mabuk, terlibat (perjudian atau sedang di penjara). Di kalangan Muslim, perceraian bisa diajukan oleh suami (cerai talak) atau oleh istri (cerai gugat). Gugat cerai mendominasi masalah perceraian di Pengadilan Agama Kelas Dua Kasongan¹⁶.



Gambar 2.26 Jumlah Perceraian di Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: Renstra DP3AP2KB

¹⁵ <https://exposkalteng.com/ketua-pengadilan-agama-kelas-ii-kasongan-awal-2023-permohonan-dispensasi-pernikahan-dini-di-katingan-tinggi/>

¹⁶ <https://www.antarane.ws.com/berita/2910769/perceraian-di-katingan-meningkat-hingga-30-persen-selama-pandemi>

Tingginya gugat cerai ini merupakan kecenderungan yang berlaku di tingkat nasional. Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tren kasus gugat cerai terus meningkat sejak pandemi Covid-19. Kasus cerai talak juga mengalami lonjakan, akan tetapi kenaikannya tidak sebesar cerai gugat¹⁷. BPS mendefinisikan berbagai penyebab perceraian, seperti zina, mabuk alkohol, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan atau persetujuan terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi, dan lain-lain. Identifikasi penyebab perceraian secara lebih tepat akan membantu menentukan strategi pembangunan keluarga secara lebih tepat.

2.3.4 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan besarnya potensi kerentanan keluarga. Mereka yang mendapatkan kekerasan akan mengalami persoalan, tidak hanya fisik tapi juga psikologis dan sosial. Pembangunan keluarga diarahkan untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.11 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Kabupaten Katingan, 2018-2022

Kasus Kekerasan	2018	2019	2020	2021	2022
Kekerasan terhadap perempuan	2	3	5	1	7
Kekerasan terhadap anak	9	11	10	15	20

Sumber: Renstra DP3AP2KB

Tabel 2.11 memperlihatkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi Kabupaten Katingan. Tampak bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada kurun waktu 2018-2022 meningkat. Kasus kekerasan terhadap anak jumlahnya jauh lebih banyak. Data ini kembali mengkonfirmasi bahwa anak-anak sangat berisiko mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang di sekitarnya. Data kekerasan menunjukkan fenomena gunung es, di mana banyak kasus yang tidak dilaporkan, terlebih jika hal tersebut terjadi di lingkup keluarga.

Sementara itu, rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Kabupaten Katingan berada pada nilai rasio maksimum, yaitu 17,5 pada tahun 2022. Data ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat meningkat, korban ataupun keluarga berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Peningkatan

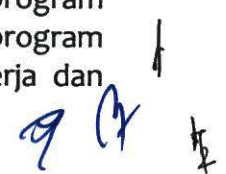
¹⁷ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi-2022.html>

kesadaran ini tidak lepas dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang regulasi yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan. Yang saat ini juga menjadi perhatian seluruh dinas maupun *stakeholders* lainnya adalah terjadinya pelecehan seksual; yang dalam pencegahan dan penanganan kasusnya memerlukan kolaborasi dari berbagai elemen.

2.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk merupakan salah satu komponen yang memengaruhi perkembangan Kabupaten Katingan dan sekaligus menjadi kunci yang mendukung pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*). Mobilitas yang sifatnya permanen akan memberikan tantangan tersendiri bagi pembangunan Katingan. Demikian pula dengan mobilitas nonpermanen seperti ulang alik atau mobilitas sirkuler yang akan memberikan tantangan yang berbeda. Hal penting yang perlu diingat dalam diskusi mobilitas adalah faktor kesenjangan pembangunan antarwilayah. Migrasi terjadi pada daerah-daerah dengan tingkat pembangunan rendah-terbatas ke daerah-daerah yang lebih maju. Dalam konteks *rural-urban*, migrasi terjadi dari daerah desa menuju daerah kota. Dengan kata lain, wilayah dengan pembangunan pesat yang memiliki sarana prasarana transportasi, komunikasi, memiliki fasilitas umum, ada kegiatan ekonomi, industri, bisnis, dan lain sebagainya akan menarik penduduk di sekitarnya untuk bermigrasi.

Peningkatan mobilitas penduduk membawa dampak positif bagi daerah tujuan. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang mendukung kegiatan ekonomi setempat, apabila migran tergolong usia produktif maka akan menambah jumlah pasokan penduduk usia kerja, dan ekonomi yang semakin tumbuh. Namun peningkatan mobilitas juga berdampak kurang baik bagi daerah tujuan, seperti tekanan terhadap lahan, menurunnya daya dukung lingkungan, konversi lahan, dan berbagai persoalan sosial ikutan lainnya. Kondisi tersebut akan menghambat kemajuan dan pembangunan apabila tidak dikelola dan tidak ditangani dengan benar. Sayangnya, mobilitas penduduk melibatkan individu yang di dalamnya terkandung niat dan keinginan berpindah untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini berbeda dengan kondisi kependudukan lainnya, seperti kelahiran dan kematian yang lebih banyak berkaitan dengan faktor nonpersonal, sehingga kebijakan ataupun program dapat dilakukan untuk mengendalikannya. Adapun migrasi yang lebih berkaitan dengan faktor preferensi personal, tidaklah mudah untuk mengintervensinya melalui kebijakan program. Oleh karena itu, sulit menemukan kebijakan atau program yang berkaitan langsung dengan mobilitas penduduk, kecuali program transmigrasi di tingkat nasional-daerah serta pengiriman tenaga kerja dan magang ke luar negeri.



Kebijakan transmigrasi pernah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sejak era orde baru. Fokusnya adalah pengiriman penduduk dari daerah Jawa ke luar Jawa. Pertimbangan luar Jawa sebagai daerah tujuan program adalah karena jumlah dan pertumbuhan penduduk yang rendah serta ketersediaan lahannya masih sangat memadai. Kabupaten Katingan juga menjadi salah satu daerah tujuan program transmigrasi pada waktu itu. Namun seiring dengan menurunnya program transmigrasi, Kabupaten Katingan tidak lagi menerima transmigran. Migrasi masuk yang terjadi murni berasal dari migrasi internal untuk tujuan ekonomi ataupun faktor perkawinan. Sementara itu, karakter wilayah Kabupaten Katingan yang terbatas industrialisasi, bisnis, dan kegiatan investasi skala besarnya, kemungkinan migrasi masuk untuk tujuan ekonomi tidak akan signifikan jumlahnya. Terlebih dalam konstelasi regional, Katingan berada di antara wilayah potensial seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, Kawasan Industri Surya Borneo, Kawasan Kapuas, Tanah Kuning-Bulungan dan lain-lain yang mungkin mendorong terjadinya migrasi keluar. Apabila migrasi keluar lebih banyak dibandingkan dengan migrasi masuk, maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kemajuan Kabupaten Katingan.

2.4.1 Penduduk Pindah Datang dan Pindah Keluar

Kabupaten Katingan masih menghadapi tantangan dalam aspek mobilitas penduduk. Tabel 2.12 menunjukkan dinamika kependudukan tingkat kecamatan di Kabupaten Katingan. Di Kecamatan Katingan Kuala, tercatat 12.981 KTP dan 5.556 KK dengan jumlah migrasi masuk sebanyak 171 orang dan migrasi keluar mencapai 414 orang. Kondisi ini menunjukkan penurunan populasi bersih cukup signifikan. Sementara itu, Kecamatan Mendawai menunjukkan kondisi yang lebih stabil dengan 2.857 KTP dan 1.257 KK, migrasi masuk sebanyak 54 orang dan keluar 35 orang.

Kecamatan Kamipang menarik perhatian dengan angka migrasi masuk yang tinggi yaitu 308 orang dibandingkan dengan migrasi keluar hanya 49 orang, dari total 4.815 KTP dan 2.143 KK yang diterbitkan, menandakan pertumbuhan populasi. Di sisi lain, Kecamatan Tasik Payawan mengalami penurunan populasi bersih dengan 66 migrasi masuk dan 82 migrasi keluar. Katingan Hilir, sebagai kecamatan terbesar, mencatatkan 25.278 KTP dan 11.440 KK dengan migrasi yang hampir seimbang, yaitu 1.023 masuk dan 970 keluar.



Tabel 2.12 Jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Migrasi menurut Kecamatan, Kabupaten Katingan, 2019

Kecamatan	Jumlah KTP, KK, dan Migrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan			
	KTP (Kartu Tanda Penduduk)	KK (Kartu Keluarga)	Pindah Datang	Pindah Keluar
	2019	2019	2019	2019
Katingan Kuala	12.981	5.556	171	414
Mendawai	2.857	1.257	54	35
Kamipang	4.815	2.143	308	49
Tasik Payawan	5.354	2.369	66	82
Katingan Hilir	25.278	11.440	1.023	970
Tewang Sangalang Garing	9.124	4.033	189	166
Pulau Malan	6.664	2.917	103	81
Katingan Tengah	17.713	7.648	430	431
Sanaman Mantikei	6.763	2.758	95	102
Petak Malai	2.249	911	11	46
Marikit	4.421	1.796	49	38
Katingan Hulu	4.972	2.139	97	108
Bukit Raya	1.670	887	91	34
Katingan	104.861	45.854	2.687	2.556

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan

Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan keduanya menunjukkan kecenderungan positif dalam migrasi dengan Tewang Sangalang Garing memiliki 189 orang masuk dan 166 orang keluar, sementara Pulau Malan dengan 103 masuk dan 81 keluar. Katingan Tengah mencatatkan jumlah yang seimbang dengan 430 orang masuk dan 431 orang keluar. Kecamatan lain seperti Sanaman Mantikei, Petak Malai, dan Marikit juga menunjukkan variasi dalam migrasi yang mencerminkan kondisi sosio-ekonomi yang berbeda.

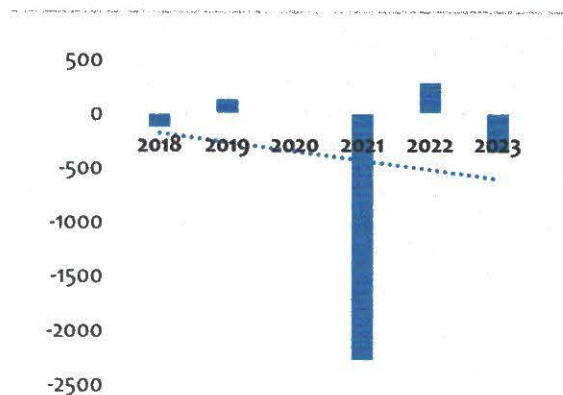
Kecamatan Marikit, meskipun lebih kecil, menunjukkan peningkatan populasi dengan 49 orang masuk dan 38 orang keluar. Sebaliknya, Katingan Hulu dan Bukit Raya menunjukkan dinamika migrasi yang beragam, dengan Katingan Hulu mengalami sedikit penurunan populasi dan Bukit Raya menunjukkan peningkatan signifikan dengan 91 orang masuk dibandingkan hanya 34 orang yang keluar.

Secara keseluruhan, data dari Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa ada kecenderungan yang berbeda dalam migrasi antarkecamatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Total KTP yang diterbitkan di seluruh kabupaten mencapai 104.861 dan KK sebanyak 45.854

dengan total migrasi masuk 2.687 dan keluar 2.556, mencerminkan dinamika populasi yang aktif dan beragam di kabupaten ini. Dinamika ini penting untuk dipahami dalam konteks perencanaan pembangunan regional dan alokasi sumber daya yang efektif.

2.4.2 Migrasi Netto

Migrasi *netto* menggambarkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi *netto* yang ideal adalah yang bernilai positif, yaitu jumlah migrasi masuk lebih tinggi dibandingkan dengan migrasi keluar. Pada tahun 2023, migrasi *netto* di Kabupaten Katingan menunjukkan nilai negatif, sedangkan di tahun 2022 migrasi *netto* sempat mengarah positif. Situasi ini menunjukkan bahwa migrasi di Kabupaten Katingan cukup dinamis. Ada kalanya, migrasi masuk ke Katingan lebih tinggi dibandingkan dengan migrasi keluar dan ada kalanya juga migrasi masuk lebih rendah dibandingkan dengan migrasi keluar. Pada tahun 2018, 2020, dan 2022 sebagaimana tampak dalam Gambar 2.26 misalnya, migrasi keluar jumlahnya melebihi migrasi masuk, sehingga menyebabkan migrasi *netto*-nya negatif. Dari sisi jumlah, migrasi keluar tertinggi terjadi di tahun 2021, yakni sekitar 2.300 penduduk.



Gambar 2.27 Migrasi Netto di Kabupaten Katingan, 2018-2023

Sumber: BPS

Migrasi keluar dapat terjadi karena adanya faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik adalah hal-hal yang menarik di luar Kabupaten Katingan yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk meninggalkan Kabupaten Katingan. Adapun faktor pendorong adalah faktor internal di Kabupaten Katingan yang mendorong seseorang untuk bermigrasi ke luar.

Faktor penarik migrasi keluar Katingan salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dan layanan pendidikan yang memadai. Sementara itu, faktor pendorong migrasi keluar Katingan adalah perubahan iklim dan bencana banjir. Fenomena global perubahan iklim mulai terjadi di Katingan dalam satu dekade terakhir yang ditandai oleh bencana banjir. Sebagian wilayah Katingan yang berada di kontur rendah mengalami banjir di musim hujan ketika intensitasnya tinggi. Banjir bertahan hingga beberapa minggu menyebabkan gagal panen, akses jalan terputus, menyulitkan pemenuhan air bersih, dan menghambat kegiatan sehari-hari penduduk.

Handwritten signature and initials.

Faktor pendorong migrasi keluar berikutnya adalah situasi global seperti pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan orang. Ketika pandemi Covid-19 mulai berangsur berakhir, migrasi *netto* tahun 2021 sangat negatif di angka -2270. Penduduk yang pada dua tahun sebelumnya tidak dapat melakukan mobilitas mulai berpindah ke daerah lain untuk bekerja dan mendapatkan kestabilan ekonomi. Pada tahun 2022, migrasi *netto* +285 yang sedikit menandakan pemulihan dari dampak negatif tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemungkinan pemulihan ekonomi atau peningkatan dalam pengelolaan krisis kesehatan yang membuat penduduk merasa lebih aman untuk kembali atau bermigrasi ke Katingan. Namun tahun 2023 kembali ke situasi *netto* negatif pada -357, yang mungkin disebabkan oleh ketidakstabilan sosial ekonomi atau kebijakan daerah yang kurang mendukung terhadap kebutuhan penduduk.

Selanjutnya faktor yang mendorong terjadinya migrasi keluarga adalah kebijakan lokal dan nasional yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti perubahan dalam peraturan tanah, pajak, atau layanan publik, dapat memengaruhi keputusan migrasi. Terakhir, migrasi keluar dapat disebabkan oleh faktor fasilitas dan infrastruktur. Kualitas infrastruktur seperti jalan, kesehatan, dan pendidikan juga memengaruhi keputusan migrasi. Perbaikan dalam aspek-aspek ini dapat meningkatkan migrasi masuk.

Dari analisis ini terlihat bahwa Kabupaten Katingan mengalami perubahan signifikan dalam migrasi *netto* dari tahun ke tahun yang mencerminkan respons terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Untuk mengelola migrasi ini secara efektif, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan strategi yang berfokus pada peningkatan ekonomi lokal, stabilitas sosial, dan peningkatan infrastruktur dan layanan. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu stabilisasi migrasi *netto* tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan daya tarik Kabupaten Katingan sebagai tempat tinggal dan bekerja.

2.4.3 Migrasi Internal

Migrasi internal adalah perpindahan penduduk yang terjadi antarwilayah kabupaten/kota. Untuk mengidentifikasinya, dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tempat tinggal saat ini berbeda dengan tempat tinggal 5 tahun sebelumnya (*migran risen*). Pada tahun 2023 diketahui bahwa *migran risen* di Katingan berasal dari Kota Waringin Timur, sebanyak 745 orang, Palangkaraya sebanyak 680 orang, Kapuas sebanyak 232 orang, Gunung Mas 199 orang, Pulang Pisau 106, dan beberapa kabupaten lainnya. Di sisi lain, tercatat ada sekitar 3.396 *migran risen* yang berasal dari daerah kabupaten/kota di luar Kalimantan Tengah. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan total *migran risen* yang berasal dari kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Hal itu menandakan bahwa migrasi internal di Katingan terjadi pada cakupan wilayah yang relatif luas, yakni antarprovinsi.

Berikutnya, dari tabel daerah asal migran *risen* (Tabel 2.13) juga dapat diketahui perbandingan antara migran yang berasal dari Katingan dan bukan Katingan. Sekitar 96 persen (143.979) migran *risen* berasal dari Katingan dan selebihnya 4 persen berasal dari kabupaten/kota lain. Gambaran ini menunjukkan bahwa intensitas migrasi *risen* di Katingan relatif kecil. Pergerakan antarwilayah ataupun antarpulau relatif sedikit. Sebaliknya, ada kecenderungan pergerakan penduduk terjadi dalam skala jarak teritori yang lebih sempit, yaitu antardesa atau antarkecamatan. Menghadapi situasi ini, Katingan perlu mendukung mobilitas penduduk dengan menyediakan sarana prasarana transportasi memadai, memperluas jaringan jalan, penerangan dan jaringan komunikasi.

Tabel 2.13 Daerah Asal Migran Risen, Kabupaten Katingan, 2023

Daerah Asal	Jumlah
Katingan	143.979
Kotawaringin Barat	93
Kotawaringin Timur	745
Kapuas	232
Barito Utara	8
Lamandau	7
Seruyan	74
Pulang Pisau	106
Gunungmas	199
Murungraya	17
Palangkaraya	680
Lainnya	3.396

Sumber: BPS

2.4.4 Daerah Tujuan Migrasi Keluar

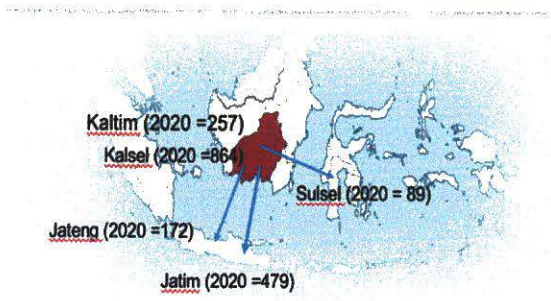
Migrasi keluar Katingan tercatat mengarah pada sejumlah provinsi. Ada lima provinsi utama yang menjadi daerah tujuan migrasi asal Katingan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Jumlah migran keluar ke masing-masing provinsi tersebut adalah sebagai berikut, Kalimantan Selatan 864 orang, Jawa Timur 479 orang, Kalimantan Timur 257 orang, Jawa Tengah 172 orang, dan Sulawesi Selatan 89 orang.

Pada tahun 2020 (Gambar 2.28), migrasi tertinggi ke Kalimantan Selatan sebanyak 864, diikuti kemudian ke Jawa Timur sebanyak 479, Kalimantan Timur sebesar 257, dan Sulawesi Selatan sebanyak 89. Angka migrasi yang tinggi ke Kalimantan Selatan mungkin mencerminkan pergerakan penduduk yang intens ke dan dari Kalimantan Selatan, terutama pada sektor perdagangan dan pertanian. Hal ini bisa berdampak langsung pada Katingan melalui pergerakan penduduk antarprovinsi, khususnya dalam konteks transmigrasi atau mencari lahan pertanian baru.

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi paling padat dan ekonomis aktif di Indonesia, menunjukkan angka migrasi internal yang cukup tinggi. Angka ini mungkin menunjukkan baik imigrasi yang kuat ke kota-kota besar seperti Surabaya untuk peluang kerja, pendidikan tinggi, dan layanan kesehatan yang lebih baik, maupun emigrasi dari daerah pedesaan. Pengaruh terhadap

9 3 t
45

Katingan mungkin terkait dengan migrasi balik penduduk yang mencari peluang kerja sementara di sektor-sektor industri dan perkebunan di Jawa Timur.



Gambar 2.28 Daerah Tujuan Migrasi Keluar dari Kabupaten Katingan, 2020

Sumber: BPS, 2020

Sementara, Kalimantan Timur sebagai salah satu pusat industri ekstraktif, seperti pertambangan telah menarik banyak tenaga kerja dari daerah lain, termasuk dari Kabupaten Katingan. Angka migrasi yang lebih rendah dibandingkan Jawa Timur mungkin mencerminkan konsentrasi pekerjaan di sektor tertentu yang kurang menarik bagi kelompok lain atau keterbatasan dalam lapangan kerja baru.

Angka migrasi yang relatif rendah di Sulawesi Selatan mungkin menunjukkan bahwa provinsi ini kurang menarik atau memiliki ekonomi yang lebih stabil dengan kebutuhan tenaga kerja yang lebih terkendali. Ini menunjukkan bahwa interaksi migrasi antara Sulawesi Selatan dan Katingan mungkin minimal, terbatas pada migrasi individu atau keluarga untuk alasan spesifik seperti pendidikan atau kesehatan.

Data migrasi regional menunjukkan bahwa Kabupaten Katingan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal tetapi juga oleh perubahan dan tren di provinsi lain. Untuk mengelola dampak ini secara efektif, perlu ada strategi komprehensif yang tidak hanya mengatasi kebutuhan internal tetapi juga mengakui dan mengintegrasikan faktor-faktor regional dalam perencanaan pembangunan dan sosial ekonomi Kabupaten Katingan.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi mobilitas penduduk di Katingan. Pertama, kondisi geografis dan demografi. Kabupaten Katingan memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan kondisi geografis berupa daerah dataran rendah yang dilintasi oleh sungai Katingan. Sungai ini tidak hanya menjadi sarana transportasi utama, tetapi juga memengaruhi pola pemukiman dan ekonomi lokal. Dari sisi demografis, Katingan dihuni oleh berbagai suku, termasuk Dayak, Melayu, dan Jawa, yang memiliki kebutuhan mobilitas yang beragam tergantung pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka.

Kedua, faktor ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar. Mobilitas penduduk di Katingan dipengaruhi oleh infrastruktur transportasi yang belum memadai. Meskipun sungai Katingan menjadi sarana utama, kondisi jalan darat yang sering tidak dapat diandalkan terutama selama musim hujan, menimbulkan hambatan serius. Kedua, aksesibilitas yang rendah terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan; banyak warga yang harus

[Handwritten signature]

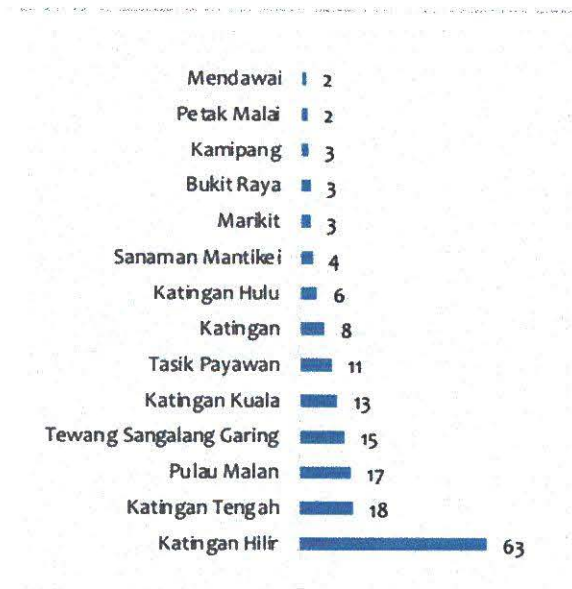
melakukan perjalanan jauh untuk mencapai fasilitas-fasilitas ini. Data dari studi infrastruktur lokal menunjukkan bahwa hanya 60 persen jalan yang berada dalam kondisi baik. Selama musim hujan, lebih dari 30 persen jalan menjadi tidak dapat dilalui, yang berdampak pada peningkatan waktu perjalanan hingga 50 persen dari biasanya.

Pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama untuk meningkatkan mobilitas penduduk di Kabupaten Katingan. Pembangunan jalan dan jembatan perlu semakin diperluas untuk meningkatkan konektivitas antarkecamatan dan desa, yang sangat penting di daerah yang geografisnya didominasi oleh hutan dan wilayah rawa. Penambahan infrastruktur transportasi baru bertujuan untuk mempermudah akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pusat ekonomi, serta mengurangi waktu tempuh yang sebelumnya menjadi penghambat utama mobilitas penduduk. Investasi infrastruktur di Katingan pada tahun 2021 mencapai sekitar 300 miliar rupiah, namun masih terfokus pada pemeliharaan daripada ekspansi. Penelitian terkait mobilitas di daerah ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu tempuh ke fasilitas kesehatan adalah 1,5 jam, dan untuk pendidikan adalah 1 jam.

Dalam upaya meningkatkan infrastruktur untuk mendukung mobilitas, Pemerintah Kabupaten Katingan telah berusaha memperbaiki jaringan jalan dan jembatan yang ada serta mengembangkan transportasi sungai yang lebih aman dan terjadwal. Ini penting untuk memastikan bahwa semua warga, terutama di daerah terpencil, dapat mengakses layanan penting dan peluang ekonomi. Peningkatan infrastruktur transportasi juga diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang selama ini menjadi penghambat utama pengembangan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk mengurangi waktu tempuh, mempermudah transportasi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Efek langsung dari peningkatan infrastruktur ini adalah peningkatan mobilitas penduduk, yang memungkinkan akses yang lebih luas ke peluang ekonomi dan layanan sosial.

Mobilitas yang lebih baik memungkinkan produk lokal, seperti hasil pertanian dan perikanan, mencapai pasar yang lebih luas, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, akses yang lebih baik ke pasar juga berkontribusi terhadap penurunan harga barang dan jasa karena efisiensi logistik yang meningkat. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan yang lebih baik memungkinkan anak-anak mencapai sekolah dengan lebih cepat dan aman. Hal ini berkontribusi pada peningkatan tingkat partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah. Demikian pula, warga kini dapat mengakses fasilitas kesehatan dalam waktu yang lebih singkat, yang sangat penting dalam penanganan keadaan darurat medis dan pengurangan angka mortalitas.

2.4.5 Kepadatan Penduduk dan Daya Dukung



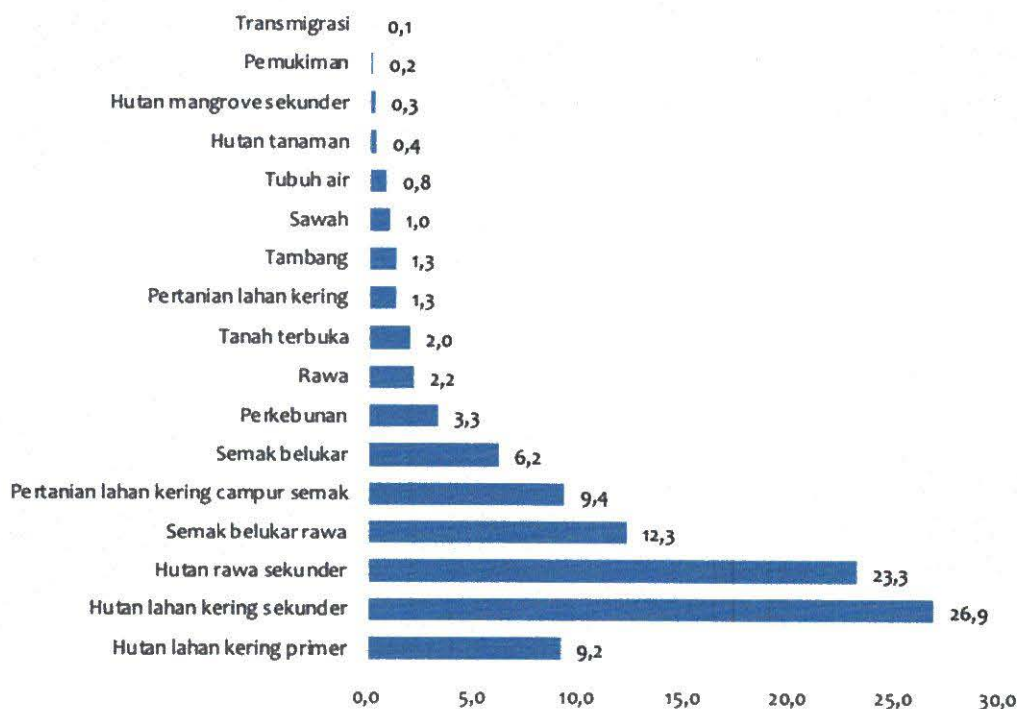
Gambar 2.29 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, Kabupaten Katingan 2023

Sumber: BPS, 2023

Seluruh kecamatan di Katingan, tingkat kepadatannya tergolong rendah, yaitu kurang dari 100 penduduk per km².

Tekanan penduduk terhadap lahan yang rendah juga didukung oleh tingginya lahan terbuka di Katingan. Dari variasi penggunaan lahan yang teridentifikasi, sebanyak 26,9 persen lahan di Katingan berupa hutan lahan kering sekunder, 23,3 persen berupa hutan rawa sekunder, 12,3 persen berupa semak belukar. Lahan terbuka lainnya, seperti kebun, sawah, tambang, tubuh perairan dan lain-lain, juga masih ditemukan di Katingan. Adapun lahan terbangun, yakni berupa permukiman, bangunan, dan kawasan transmigrasi tercatat kurang dari satu persen. Persentase ini sangat kecil dibandingkan dengan tutupan lahan lainnya yang sekaligus menunjukkan bahwa intensitas penggunaan lahan untuk aktivitas ekonomi sangat terbatas. Dengan kata lain bahwa lahan di Katingan sangat mampu untuk mendukung penduduk dan aktivitasnya.

Handwritten signature and initials in blue ink.



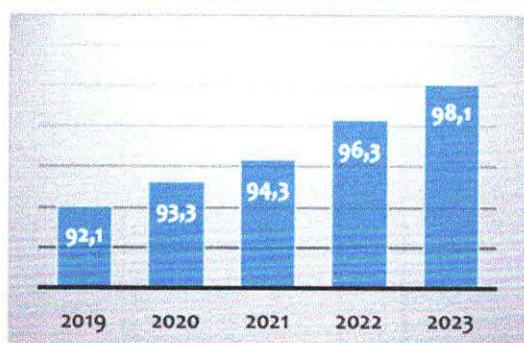
Gambar 2.30 Persentase Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan, 2023

Sumber: BPS, 2023

2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan sering kali disebut sebagai adminduk adalah proses pencatatan peristiwa kependudukan yang mencakup kelahiran, kematian, dan pindah datang ataupun pindah pergi. Adminduk melibatkan dua pihak, yaitu masyarakat sebagai subjek yang harus dicatat dan pemerintah yang mendokumentasikannya. Idealnya kedua pihak harus saling bersinergi untuk menghasilkan data valid dan termutakhirkan. Namun yang terjadi di Indonesia, keduanya belum berjalan beriringan, sehingga ketersediaan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan belum cukup memadai.

99 t



Gambar 2.31 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Kabupaten Katingan 2019-2023

Sumber: Disdukcapil, 2024

Sebenarnya ada tiga sumber data kependudukan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan, yaitu sensus penduduk, survei, dan registrasi penduduk. Dari ketiga sumber data itu, registrasi penduduk merupakan sumber data yang paling baik karena selalu termutakhirkan, sedangkan data sensus tersedia setiap 10 tahun sekali. Demikian juga dengan data survei yang hanya tersedia dalam periode waktu dan hanya mencakup sampel tertentu saja. Sayangnya, data registrasi

penduduk di Indonesia belum cukup memadai dari sisi kualitas karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk mencatatkan peristiwa kependudukan yang dialami, khususnya kematian. Belum semua masyarakat mencatatkan peristiwa kematian yang terjadi dengan segera karena faktor kultur. Suasana duka yang dialami menyebabkan seseorang tidak ingin mencatatkan kematian anggota keluarganya sesegera mungkin. Hal ini akan memengaruhi jumlah penduduk yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Adapun pencatatan kelahiran umumnya tidak terlalu terkendala. Kelahiran merupakan peristiwa bahagia yang ditunggu oleh pasangan. Tidak ada keengganan pasangan untuk segera mencatatkan peristiwa kelahiran yang dialaminya. Terlebih saat ini pemerintah mengambil langkah inovatif dengan menggandeng layanan kesehatan untuk fasilitasi penerbitan akta kelahiran. Dengan demikian, bayi yang lahir di layanan kesehatan akan segera memperoleh dokumen kependudukan sebelum meninggalkan fasilitas kesehatan. Ini merupakan langkah baik karena negara memberi jaminan atau hak kewarganegaraan sejak dini. Sisi lain, peristiwa kelahiran akan tercatat dan hal itu sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, ataupun lainnya. Upaya tersebut telah berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Katingan dari 92,1 persen di 2019 menjadi 98,1 persen 2023.

Sementara itu, pencatatan peristiwa perpindahan di Kabupaten Katingan dapat ditelusur dari kepemilikan dokumen identitas berupa KTP ataupun KIA. Dokumen tersebut merupakan identitas diri yang menunjukkan bukti diri seseorang. Di dalamnya terdapat informasi dasar seperti nama, jenis kelamin, agama, tanggal lahir, dan tempat tinggal. Idealnya setiap perpindahan yang dilakukan oleh individu akan diikuti oleh perubahan data dan informasi di dalamnya, sehingga kepemilikan KTP dapat menggambarkan proses pencatatan.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Tabel 2.14 Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el, Kepala keluarga yang Memiliki KK, dan Anak yang Memiliki KIA, Kabupaten Katingan, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	98,2	99,6	99,6	99,6	98,9
Persentase kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	92,1	89,8	95,7	99,3	99,7
Persentase anak yang memiliki KIA	23,5	33,1	41,6	51,8	58,6

Sumber: Disdukcapil, 2024

Di Katingan, hampir seluruh penduduk telah memiliki identitas diri berupa KTP elektronik. Pada tahun 2023 tercatat penduduk yang telah memiliki KTP elektronik sebanyak 98,9 persen. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2020, 2021, dan 2022. Penurunan tersebut berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program perekaman ke rumah-rumah warga. Saat melakukan perekaman ke rumah, ada sebagian warga yang sedang tidak tinggal di tempat atau sedang pergi ke luar kota.

Berikutnya adalah persentase kepala keluarga yang memiliki dokumen kartu keluarga. Kepemilikan dokumen memiliki arti penting karena menjadi dasar bagi diterbitkannya dokumen identitas, seperti KTP dan KIA. Pada skala luas, dokumen ini bermanfaat untuk mengakses layanan pendidikan, perbankan, dan lain sebagainya. Nilai kemanfaatan ini sudah dipahami dengan baik oleh masyarakat di Katingan. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan edukasi hingga tingkat bawah tentang pentingnya kartu keluarga. Oleh karenanya, hampir semua kepala keluarga di Katingan telah memiliki dokumen tersebut, yakni sebanyak 99,7 persen. Berbeda dengan dokumen KIA, persentasenya masih di kisaran 58,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di Katingan banyak yang belum memiliki dokumen KIA. Beberapa penyebabnya adalah jarak rumah ke kantor layanan yang relatif jauh. Pada saat yang sama, masyarakat menilai bahwa kepemilikan KIA belum begitu prioritas karena anak-anak tidak begitu membutuhkan untuk mengakses layanan tertentu. Meskipun demikian, pemerintah Katingan telah bekerja keras untuk meningkatkan cakupannya. Salah satunya melalui program kerja sama dengan sekolah-sekolah dan menyediakan layanan secara *on-line*. Program tersebut dilakukan sejalan dengan target pemerintah pusat yang menginginkan agar capaian KIA di Katingan lebih dari 40 persen di tahun 2023. Sebagai hasilnya, persentase anak yang memiliki KIA sudah lebih dari 40 persen sejak tahun 2021.

Dari narasi di atas terlihat bahwa dokumen kependudukan sebagai bentuk atau hasil pencatatan peristiwa kependudukan di Kabupaten Katingan sudah baik. Cakupan kepemilikan KTP-el dan akta kelahiran sudah berada di kisaran 98

9 9

persen lebih, menandakan bahwa proses pencatatan kependudukan berjalan baik. Dari sisi pemerintah, pendokumentasian itu menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Pemerintah memfasilitasi dan mendekatkan layanan agar penduduk dapat mencatatkan peristiwa yang dialaminya. Dari sisi masyarakat, dokumen kependudukan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mengakses layanan lainnya. Dokumen KTP-el misalnya dapat dimanfaatkan untuk urusan bisnis, perbankan, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan mengakses bantuan sosial. Hal ini berarti bahwa data-data kependudukan telah terkelola relatif baik, meski belum terintegrasi dengan semua sektor. Lebih dari itu, data kependudukan diharapkan juga dapat menjadi basis data yang mendukung pengambilan keputusan.

Bab 3

Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kabupaten Katingan 2024-2045

Bagian ketiga dokumen pembangunan kependudukan ini berisi hasil proyeksi penduduk. Di sini, penduduk adalah variabel kunci yang dihitung pertumbuhannya sebagai akibat dari adanya proses kelahiran, kematian, dan migrasi. Asumsi bahwa penduduk akan terus bertambah membawa konsekuensi logis pada sejumlah aspek lainnya yang berkaitan. Hal ini tidak terlepas dari peran penduduk sebagai faktor dasar memengaruhi perkembangan komponen pembangunan lainnya, seperti kebutuhan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun hal terpenting dalam pembangunan kependudukan adalah bahwasanya penambahan penduduk secara kuantitas harus sejalan dengan peningkatan kualitas. Di masa depan, jumlah penduduk akan terus bertambah dan apabila didukung oleh kualitas memadai, maka jumlah tersebut tidak akan berdampak buruk pada pembangunan. Justru yang terjadi adalah penduduk akan menjadi modal pembangunan yang menguntungkan karena didukung oleh kualitas yang baik.

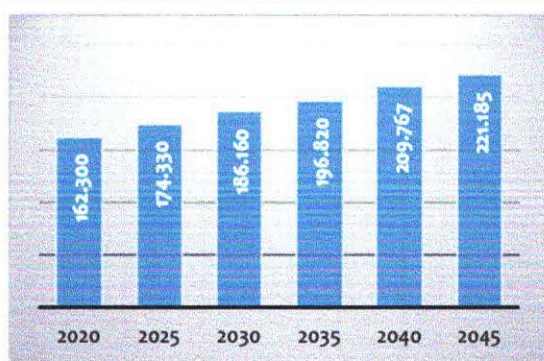
Sejauh ini, penambahan penduduk di masa mendatang dihitung dengan mendasarkan pada tren kenaikan ataupun penurunannya di tahun-tahun sebelumnya. Metode perhitungannya dikenal sebagai proyeksi, yaitu perkiraan jumlah penduduk secara ilmiah dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhinya. Data dasar yang digunakan adalah hasil sensus penduduk 2020. Metode proyeksi hanya digunakan untuk menghitung perkiraan penambahan jumlah penduduk, sedangkan untuk pilar lainnya perhitungan tidak menggunakan teknik yang sama. Oleh karenanya, dokumen ini menyebut pilar lain sebagai kondisi ideal kependudukan yang diinginkan. Pertimbangan faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol ataupun sifat kualitatif indikator melandasi tidak dilakukannya proyeksi dengan teknik yang sama. Pendekatan target dengan memerhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang, situasi dan dinamika yang terjadi di lapangan banyak diterapkan, khususnya pada aspek kualitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan data serta informasi kependudukan.

Proyeksi penduduk dan situasi ideal kependudukan yang diinginkan sejatinya adalah upaya untuk merekayasa kondisi kependudukan di masa depan. Tujuannya agar penambahan penduduk yang terjadi dapat selaras dengan kemajuan-kemajuan lainnya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Oleh karenanya perkiraan atau target yang diinginkan di masa depan tidak akan lepas dari potensi dan dampak yang ditimbulkan. Uraian mengenai potensi dan dampak juga tersaji dalam bab ini sebagai informasi yang bermanfaat untuk menentukan langkah-langkah antisipatif guna mencapai kondisi ideal yang dicita-citakan. Berikut adalah hasil proyeksi penduduk, kondisi ideal kependudukan dan analisisnya di masing-masing pilar.

3.1 Kuantitas Penduduk

Di masa depan, Katingan menginginkan agar penduduknya tumbuh seimbang. Kondisi ini menandakan bahwa kelahiran dan kematian dapat terkontrol dengan baik, sehingga tidak berkontribusi signifikan pada pertumbuhan penduduk. Ada keyakinan yang didasari oleh pendapat Malthus, bahwa pengendalian

pertumbuhan penduduk adalah hal penting. Dasar pertimbangannya yakni kecepatan pertumbuhan penduduk tidak dapat diikuti oleh pertumbuhan sumber daya, sehingga harapan pertumbuhan penduduk stabil menemukan relevansinya. Manfaat yang ingin diperoleh dari tercapainya penduduk tumbuh seimbang adalah peluang untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui perluasan akses layanan pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan skenario tersebut, maka pertumbuhan penduduk yang terjadi adalah pertumbuhan alami, yakni dipengaruhi oleh variabel kelahiran. Pada saat yang sama, perbaikan kualitas layanan kesehatan juga akan menekan angka kematian, sehingga diharapkan tingkat kelahiran akan sama dengan tingkat kematian. Meskipun demikian, pertumbuhan alami yang terjadi tetap akan menambah jumlah penduduk di Katingan dengan batas yang terkontrol yakni 221.185 jiwa di 2045. Di tahun 2020, jumlah penduduk Katingan adalah sebanyak 162.300 jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi 221.185 di tahun 2045.

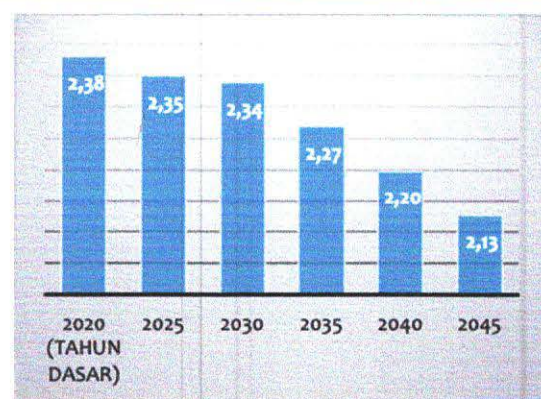


Gambar 3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Katingan Tahun 2020-2045

Sumber: BPS dan Hasil Analisis, 2024

Agar tercapai penduduk tumbuh seimbang, Kabupaten Katingan perlu menurunkan angka kelahirannya hingga di kisaran 2,1. Tingkat kelahiran 2,1 berarti bahwa setiap perempuan rata-rata memiliki dua anak di sepanjang usia reproduksinya. Idealnya dari dua anak yang dilahirkan, masing-masing adalah laki-laki dan perempuan. Unsur jenis kelamin tersebut penting karena berkaitan dengan keberlangsungan generasi. Namun mengingat studi terdahulu yang menyebutkan bahwa

jenis kelamin memicu tingginya kelahiran, maka capaian TFR lebih diutamakan dari pada jenis kelamin. Ini berarti kelahiran sebanyak dua anak pada tiap pasangan harus menjadi perhatian bersama dibandingkan jenis kelaminnya. Pasangan dapat memiliki dua anak dengan jenis kelamin apapun, yakni perempuan saja, laki-laki saja, ataupun laki-laki dan perempuan. Hal itu didukung oleh temuan de Jong (2010)¹⁸ yang menyebutkan bahwa ada kecenderungan pasangan untuk menambah jumlah kelahiran apabila mendapati anak jenis kelamin tertentu. Keputusan itu sangat wajar, mengingat budaya yang berkembang pada kehidupan masyarakat tentang posisi dan peran anak laki-laki ataupun perempuan, seperti anak perempuan akan mengasuh orang tua dan anak laki-laki sebagai penerus usaha keluarga. Tidak heran pasangan akan terus berusaha menambah kelahirannya hingga mendapatkan anak jenis kelamin tertentu yang diinginkan.



9 B⁺ H

¹⁸ De Jong, R. (2010). "Son Targeting and Fertility Behavior Some Consequences and Determinants". *Demography*, 47 (2), pp 521-536.

Dalam konteks kebijakan pengendalian penduduk di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Katingan khususnya, pemerintah telah menggunakan *tag line* khusus untuk mencapai TFR 2,1. *Tag line* tersebut adalah “dua anak cukup” dengan tambahan penjelasan apapun jenis kelaminnya tidak akan menjadi masalah, yakni laki-laki atau perempuan sama saja. *Tag line* tersebut diubah menjadi “dua anak lebih baik” seiring dengan dinamika kebijakan dan politik internasional. Pemerintah ingin menghilangkan kesan pengendalian penduduk sebagai “pemaksaan” dan mengubahnya menjadi lebih terbuka, yakni pasangan bebas menentukan kelahiran secara bertanggung jawab. “Dua anak lebih baik” mengindikasikan bahwa sasaran TFR 2,1 tetap utama, tetapi dengan menghargai hak-hak reproduksi pasangan. Dengan demikian, kebijakan perencanaan keluarga harus terus dijalankan untuk menekan angka kelahiran Katingan yang diproyeksikan semakin menurun dari 2,38 di 2020 menjadi 2,13 di 2045.

Gambar 3.2 Proyeksi TFR Katingan Tahun 2020-2045

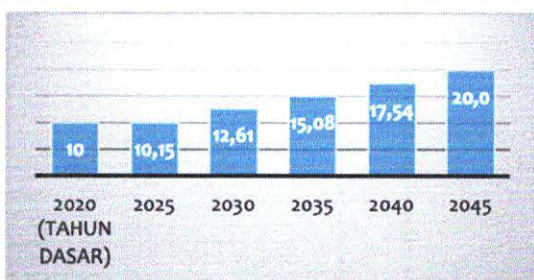
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk berdasarkan Hasil Sensus 2020

Kabupaten Katingan juga memiliki skenario proyeksi lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yakni skenario optimis, moderat dan pesimis. Skenario optimis menginginkan agar kelahiran dapat menyentuh angka 2,0 sehingga berdampak pada penambahan jumlah penduduk yang relatif terkontrol. Sebaliknya, skenario pesimis mengasumsikan penurunan angka kelahiran adalah hal sulit sehingga angka kelahiran akan menurun pada 2,2. Apabila TFR di Katingan sebesar 2,2, maka jumlah penduduk yang dihasilkan pada tahun 2045 adalah 212.087. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan skenario TFR Katingan pada angka 2,0, yang pada skenario tersebut jumlah penduduk Katingan akan mencapai 212.087 jiwa di tahun 2045.

Tabel 3.1 Skenario Proyeksi TFR 2020-2045

Skenario	Tahun dasar 2020	2025	2030	2035	2040	2045
TFR 2,2	162.300	174.240	185.132	195.257	204.314	212.087
TFR 2,1	162.300	174.160	184.831	194.590	203.131	210.230
TFR 2,0	162.300	174.080	184.531	193.924	201.950	208.375

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.3 Proyeksi MKJP Kabupaten Katingan Tahun 2020-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

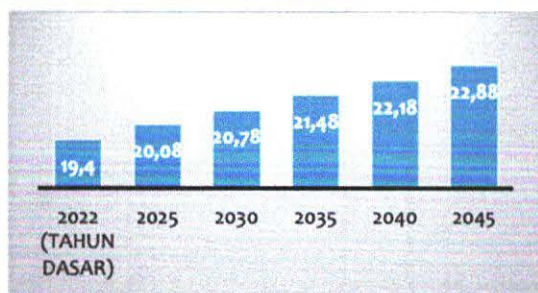
Kondisi penduduk tumbuh seimbang yang dicita-citakan oleh Kabupaten Katingan harus diikuti oleh membaiknya variabel pemengaruh. Menurut Davis dan Black seperti dikutip Tukiran (2014)¹⁹, kelahiran sebagai penyumbang pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh variabel langsung dan tidak langsung. Variabel langsung adalah variabel yang berkontribusi terhadap kelahiran secara langsung, seperti terjadinya

konsepsi. Oleh karenanya, pemerintah mengupayakan untuk memengaruhi variabel ini dengan cara mencegah terjadinya konsepsi melalui pemakaian alat kontrasepsi dan penundaan usia kawin pertama. Sosialisasi, edukasi, dan layanan kontrasepsi di Kabupaten Katingan sudah sangat baik. Pasangan usia subur dapat

¹⁹ Tukiran. 2014. *Kependudukan*. Universitas Terbuka

mengakses informasi dan KB di pusat layanan kesehatan dasar, seperti puskesmas, tempat praktik bidan dan layanan rumah sakit. Hal itu perlu diperkuat dan dipertahankan agar tingkat pemakaian kontrasepsi di antara pasangan usia subur semakin baik. Angka putus pakai diharapkan semakin menurun dan diiringi oleh meningkatnya PUS yang memilih untuk menggunakan kontrasepsi modern dan jangka panjang. Hal itu penting karena kontrasepsi modern dan kontrasepsi jangka panjang efektivitasnya cukup tinggi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dalam konteks ini, Kabupaten Katingan menginginkan agar prevalensi PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang terus meningkat dari kisaran 10 persen di tahun 2020 menjadi 20 persen di tahun 2045.

Di sisi lain, Kabupaten Katingan juga menginginkan agar peningkatan prevalensi kontrasepsi jangka panjang diikuti oleh pendewasaan usia kawin pertama. Pemerintah Kabupaten Katingan telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok remaja untuk merencanakan keluarga. Remaja diedukasi tentang usia aman hamil dan melahirkan. Dengan begitu diharapkan remaja dapat menentukan di usia berapa akan menikah. Remaja diharapkan dapat memutuskan usia kawin pertamanya secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kesehatan reproduksi, kesiapan emosional, mental, dan ekonomi. Tujuannya tidak sekedar menekan angka kelahiran seiring dengan rentang usia reproduksi yang berkurang, tetapi juga menyiapkan generasi mendatang secara berkualitas. Remaja yang menikah di usia memadai cenderung mampu menyiapkan kehamilannya. Bayi yang dilahirkannya pun memiliki risiko yang kecil untuk menghadapi persoalan tumbuh kembang, *stunting*, kesehatan, pendidikan, dan persoalan sosial di kemudian hari. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Katingan menginginkan agar usia kawin semakin meningkat dari 19,4 di tahun 2022 menjadi 22,8 tahun 2025.



Gambar 3.4 Proyeksi Median Usia Kawin Pertama, Tahun 2022-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Meningkatkan usia kawin pertama sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan akan berimplikasi pada tingkat kelahiran kelompok umur 15-19 tahun. Apabila kelompok remaja ini semakin dewasa usia kawin pertamanya, maka potensi kelahiran yang terjadi akan semakin menurun. Ini merupakan kondisi ideal yang diharapkan Katingan untuk menjamin kesehatan reproduksi penduduknya, khususnya kelompok remaja dan meningkatkan kualitas

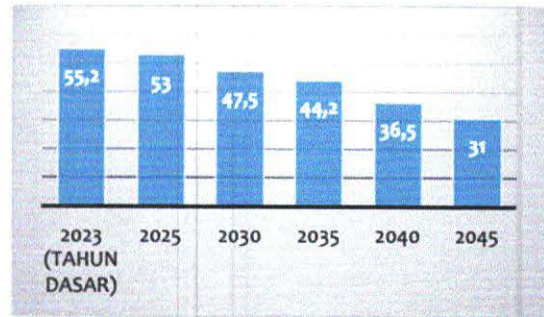
kehidupan keluarga. Keluarga yang terbentuk pada saat pasangan memiliki kesiapan ekonomi, sosial, dan emosional karena usia yang semakin mapan, maka dis-harmonisasi keluarga dapat dihindari. Pasangan akan dapat memahami dan menjalankan perannya secara seimbang, baik dalam pengasuhan anak, pekerjaan domestik dan non domestik.

Sementara itu, potensi kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun diperkirakan akan semakin menurun dari 55,2 per 1.000 kelahiran di tahun 2023 menjadi 31 per 1.000 kelahiran di tahun 2045. Menurunnya kelahiran pada kelompok 15-19 tahun akan berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita. Sebagaimana diketahui bahwa kelahiran yang terjadi pada usia dini memiliki risiko gangguan kesehatan yang tinggi, bahkan berakhir pada kematian. Organ reproduksi tidak cukup siap untuk mendukung proses kehamilan dan kelahiran yang terjadi, sehingga rentan mengalami pendarahan dan gangguan kesehatan lainnya. Ini menjadi latar belakang utama mengapa kelahiran pada kelompok umur 15-19 harus mendapatkan penanganan serius. Tidak hanya menyangkut persoalan tidak harmoninya rumah tangga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah

Handwritten signature and initials in blue ink.

satu pasangan 'minggat', dan perceraian, tetapi juga persoalan risiko kematian yang ditimbulkan.

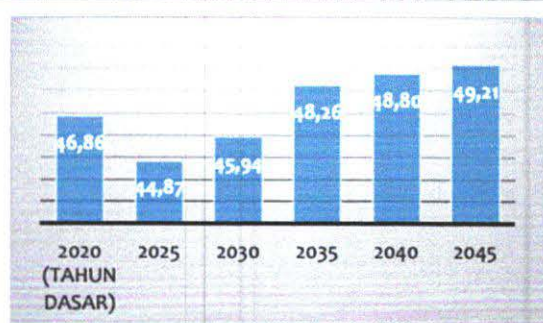
Demikianlah kondisi penduduk di Kabupaten Katingan, dari sisi kuantitas diproyeksikan di masa depan. Tentunya hal itu merupakan situasi yang ideal apabila dapat terwujud atau setidaknya mendekati kondisi yang dicita-citakan. Penduduk tumbuh seimbang dengan angka kelahiran yang menurun dan terkontrol di 2,1 adalah gambaran situasi penduduk Katingan yang ideal. Oleh karenanya, Katingan secara konsisten harus mengupayakan agar kondisi yang memengaruhinya juga terkendali, seperti prevalensi kontrasepsi yang semakin meningkat, usia kawin pertama yang semakin dewasa, dan kelahiran pada kelompok 15-19 tahun dapat ditekan. Namun demikian, kondisi ideal yang dicita-citakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak berupa.



Gambar 3.5 Proyeksi ASFR, Tahun 2023-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

1. Pertumbuhan penduduk yang terkontrol akan menjadikan Katingan memiliki penduduk yang stabil dari tahun ke tahun, kecuali apabila terjadi migrasi masuk secara besar-besaran sebagai akibat dari kebijakan pemindahan penduduk dan ketidakstabilan politik. Jumlah penduduk yang stabil berdampak positif pada alokasi anggaran pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk memaksimalkan upaya peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi dengan lebih baik karena penambahan penduduknya tidak meningkat tajam. Selain itu, pertumbuhan yang stabil dapat meminimalkan persoalan lingkungan akibat tingginya tekanan penduduk terhadap lahan.
2. Tingkat kelahiran yang semakin menurun dan diharapkan menyentuh angka 2,1 akan berdampak pada perubahan struktur penduduk. Katingan akan memiliki struktur penduduk stasioner yang dicirikan oleh tingginya penduduk usia produktif 15-64 tahun. Kondisi ini akan mengantarkan Katingan pada keuntungan demografis yang apabila dapat dioptimalkan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak ekonomi berupa meningkatnya kesejahteraan. Kondisi ini terlihat dari rasio ketergantungan antara penduduk usia produktif terhadap usia anak (<15 tahun) dan usia tidak produktif (65+ tahun) yang masih di bawah 50 persen. Ini merupakan dampak yang ditunggu-tunggu karena menempatkan Katingan pada fase bonus demografi dalam waktu yang relatif panjang, yakni hingga 2045. Setelah itu, Katingan akan memasuki tahap lanjut, yakni penduduk usia produktif akan bertahan hidup hingga usia lanjut, sehingga menciptakan populasi lansia dalam jumlah tinggi.



Handwritten signature and initials in blue ink.

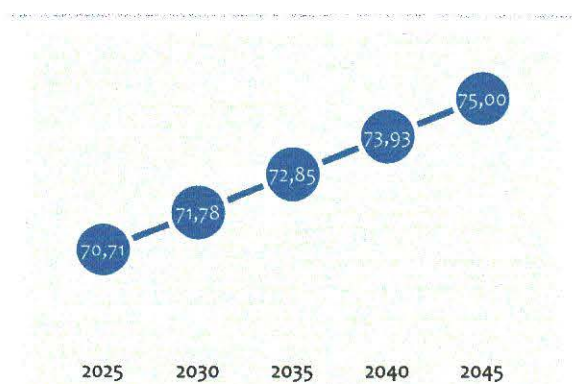
3. Pemakaian kontrasepsi jangka panjang yang terus meningkat akan berdampak pada tingginya permintaan layanan yang juga semakin meningkat. Hal ini berarti layanan penyediaan dan pemasangan kontrasepsi jangka panjang harus terus diupayakan peningkatannya secara kualitas dan kuantitas. Jangkauan layanan perlu diperluas, sehingga seluruh pasangan usia subur di Katingan dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa kendala.
4. Median usia kawin pertama yang diharapkan semakin meningkat akan berdampak pada dewasanya usia melahirkan. Implikasinya, pasangan akan memiliki anak dengan jumlah yang lebih sedikit, sehingga ketahanan keluarga akan semakin kuat. Pasangan menjadi lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, yang mencakup kebutuhan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pasangan juga dapat mengalokasikan waktu lebih lama untuk berinteraksi dengan anak-anaknya, sehingga *bonding* antara orang tua dan anak semakin kuat. Sisi lain, dengan jumlah anak yang dilahirkan lebih sedikit, maka potensi munculnya keluarga kecil di masa depan akan semakin besar. Dari banyak aspek, keluarga kecil banyak memberikan manfaat, seperti peluang investasi sosial, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan. Namun keluarga kecil juga berpotensi memunculkan tantangan atau isu perawatan (*care*) orang tua di masa tua dan perawatan (*care*) anak karena keterlibatan usia produktif di pasar kerja.

Gambar 3.6 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kab. Katingan, 2020-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

3.2 Kualitas Penduduk

Pembangunan kependudukan secara holistik dan komprehensif akan menciptakan manusia berkualitas dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; serta produktivitas yang tinggi. Sejalan dengan visi Kabupaten Katingan tahun 2045, kualitas penduduk Kabupaten Katingan yang ideal di masa depan adalah penduduk yang berdaya saing, sehat, serta sejahtera. Pembangunan manusia Kabupaten Katingan diharapkan terus meningkat. Pada 2023, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Katingan berada pada angka 70,23. Setiap lima tahun, IPM ditargetkan meningkat sekitar 1,5 persen dengan status level tinggi. Pada 2020, IPM ditargetkan sebesar 70,71, naik menjadi 71,78 pada 2030. Pada 2035 ditargetkan menjadi 72,85 dan naik menjadi 73,93 pada 2040. Pada 2045, IPM Kabupaten Katingan mencapai 75,00.



Gambar 3.7 Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan, 2025-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

penduduk yang berdaya saing, yaitu yang terdidik, terampil, dan terlatih.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan manusia, memberikan akses yang lebih baik terhadap pengetahuan dan informasi seseorang; yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Pendidikan yang memadai akan mendorong percepatan pembangunan untuk menciptakan kondisi yang maju, modern, dan sejahtera. Salah satu penekanan pada visi Kabupaten Katingan dalam rencana pembangunan jangka panjangnya adalah mewujudkan

Handwritten signature and initials.

Hingga 2045, seiring dengan penambahan jumlah penduduk Katingan (Gambar 3.1), maka penduduk yang berusia sekolah pada jenjang pendidikan dasar juga akan mengalami pertumbuhan. Ke depannya, mereka harus dipastikan mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan aspek pemerataan akses, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Kondisi ideal yang diharapkan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Katingan hingga 2045 sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.2. Penentuan target ini mempertimbangkan program pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Katingan, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, utamanya yang bertujuan untuk memperluas akses penduduk untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar, seperti pemberian bantuan biaya pendidikan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Pendidikan adalah faktor utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan taraf pendidikan Kabupaten Katingan, rata-rata lama sekolah penduduk diharapkan semakin meningkat. Di tahun 2023, rata-rata lama sekolah Kabupaten Katingan adalah 8,85 tahun. Sesuai dengan kewenangannya, maka target pembangunan pendidikan Kabupaten Katingan hingga tahun 2035 adalah dapat memenuhi wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Di tahun 2025, ditargetkan menjadi 9,20 tahun, naik lagi menjadi 9,90 tahun pada 2030, dan 10,60 tahun pada 2035. Guna menciptakan sumber daya yang lebih berdaya saing di era globalisasi, maka jenjang pendidikan penduduk ditargetkan untuk semakin meningkat di tahun 2045. Pada tahun 2040, rata-rata lama sekolah ditargetkan menjadi 11,30 tahun dan di tahun 2045, diharapkan menjadi 12,00 tahun. Target ini mengasumsikan bahwa penduduk Katingan yang berusia 15+ tahun telah menempuh tingkat pendidikan hingga SMA (sekolah menengah atas) atau sederajat. Salah satu dampak positifnya adalah terdongkraknya tingkat pendidikan angkatan kerja.

Tabel 3.2 Kondisi Ideal Pembangunan Pendidikan Kabupaten Katingan, 2023-2045

Indikator	Tahun dasar (2023)	2025	2030	2035	2040	2045
Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,85	9,20	9,90	10,60	11,30	12,00
Harapan lama sekolah (tahun)	12,98	13,16	13,62	14,07	14,53	14,98
Angka partisipasi murni sekolah dasar (%)	98,88	99,00	99,30	99,60	99,90	100,00
Angka partisipasi murni sekolah menengah pertama (%)	78,14	78,26	78,57	78,88	79,19	79,51
Jumlah siswa putus sekolah	195 (SD) 146 (SMP)	menurun	menurun	menurun	menurun	tidak ada

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Angka harapan lama sekolah juga ditargetkan terus meningkat. Pada 2023, harapan lama sekolah adalah 12,98 tahun. Pada 2025, ditargetkan meningkat menjadi 13,16 tahun dan naik lagi menjadi 13,62 tahun. Target ini diharapkan naik lagi menjadi 14,07 tahun pada 2035. Tahun 2040, target harapan lama sekolah naik menjadi 14,53 tahun dan di tahun 2045 mencapai 14,98 tahun. Artinya, pembangunan pendidikan menargetkan kesempatan anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Katingan untuk dapat menempuh dan menamatkan pendidikannya rata-rata hingga jenjang Diploma 3.

Hingga tahun 2045, pemenuhan terhadap akses pendidikan dasar, sebagai urusan wajib pemerintah kabupaten, diharapkan semakin baik. Angka partisipasi murni (APM) tingkat sekolah dasar (SD) pada tahun 2023 sebesar 98,88 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kondisi ideal yang diharapkan adalah APM SD

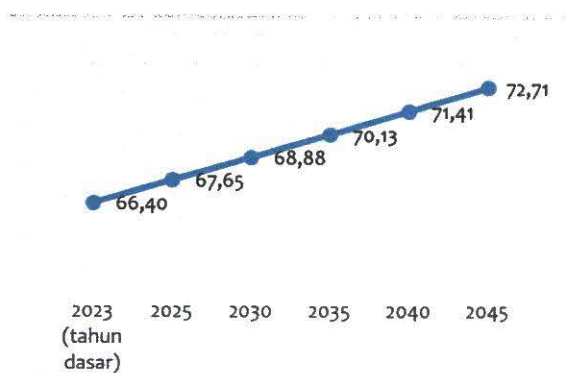
Handwritten signature and initials

terus mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen setiap lima tahun hingga tahun 2040 (Tabel 3.2). Kemudian memasuki 2045, ditargetkan meningkat 0,1 persen mencapai 100 persen. Sementara untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), APM-nya sebesar 78,14 persen pada 2023. Angka ini ditargetkan meningkat sebesar 0,4 persen setiap lima tahun. Hingga 2045, APM SMP ditargetkan mencapai 79,51 persen.

Jumlah siswa yang putus sekolah ditargetkan terus menurun setiap periodenya. Di tahun 2045, diharapkan sudah tidak dijumpai anak putus sekolah. Ada berbagai faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah, seperti faktor ekonomi dan masih rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan di masyarakat. Program bantuan pendidikan menjadi salah satu upaya untuk menekan angka putus sekolah karena persoalan ekonomi.

Aspek yang kedua dalam peningkatan kualitas penduduk adalah kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penduduk yang sehat akan memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi sehingga akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kesejahteraannya. Salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan angka harapan yang semakin tinggi serta angka kematian dan kesakitan yang semakin rendah.

Usia harapan hidup penduduk Katingan didorong untuk terus meningkat dalam 20 tahun mendatang (Gambar 3.8). Tahun 2023, usia harapan hidup adalah 66,40 tahun. Kondisi ideal yang diharapkan selama 20 tahun ke depan adalah mengalami peningkatan sebesar 1,8 persen setiap lima tahunnya. Di tahun 2045, usia harapan hidup penduduk Katingan ditargetkan dapat mencapai 72,71 tahun. Namun, target ini masih di bawah target angka nasional pada 2045, yaitu 80 tahun.



Gambar 3.8 Target Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Katingan 2023-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pembangunan kesehatan yang berhasil juga diindikasikan dengan semakin menurunnya angka kematian. Angka kematian bayi (AKB) ditargetkan mengalami penurunan sebesar 2,5 persen setiap lima tahunnya (Tabel 3.3). Angka kematian bayi pada 2023 adalah 12,69 diharapkan turun menjadi 11,52 pada 2025 lalu turun lagi menjadi 9,04 pada 2030. Pada 2035, angka ini ditargetkan turun menjadi 7,09 pada 2035 dan 5,57 pada 2040. Pada 2045, AKB diharapkan mencapai 4,37. Demikian halnya dengan angka kematian ibu

(AKI), juga ditargetkan mengalami penurunan. Tahun 2023, AKI Kabupaten Katingan sebesar 176. Angka ini ditargetkan turun 3,5 persen menjadi 169 pada 2025 dan turun lagi sebesar 3,6 persen menjadi 163 pada 2030. Lima tahun kemudian (2035) diharapkan turun 3,8 persen menjadi 157. Tahun 2040, AKI ditargetkan menjadi 151 atau turun 3,8 persen dari tahun 2035. Di tahun 2045, kondisi ideal yang diharapkan berada pada angka 145 atau turun 3,9 persen dari tahun 2040. Selain AKB dan AKI, angka kematian neonatal serta balita juga diharapkan terus menurun hingga tidak terjadi kasus kematian pada bayi hingga usia 28 hari pertama (kematian neonatal) maupun anak di bawah lima tahun.

Handwritten signature or initials in blue ink.

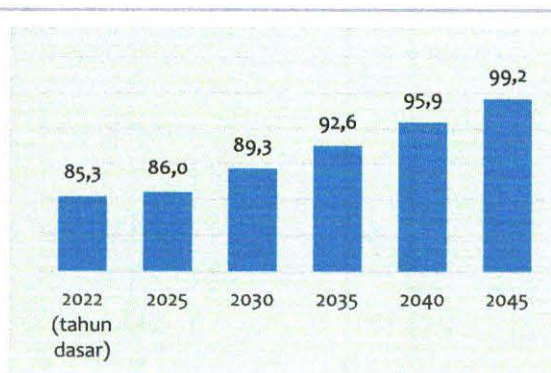
Tabel 3.3 Kondisi Ideal Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Katingan, 2022-2045

Indikator	Tahun dasar	2025	2030	2035	2040	2045
Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH	12,69 (2023)	11,52	9,04	7,09	5,57	4,37
Angka kematian ibu per 100.000 KH	176 (2023)	169	163	157	151	145
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	83,7 (2022)	85,2	88,9	92,6	96,3	100,0
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin (%)	61,3 (2022)	63,0	67,3	71,5	75,8	80,0
Cakupan pelayanan ibu nifas (%)	79,0 (2022)	80,0	82,5	85,0	87,5	90,0
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	78,5 (2022)	79,6	82,2	84,8	87,4	90,0
Cakupan pelayanan kesehatan balita (%)	62,9 (2022)	64,5	68,3	72,2	76,1	80,0

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Penurunan angka kematian pada ibu dan anak tentu saja menuntut semakin baiknya layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Tabel 3.3 memperlihatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil diharapkan meningkat sekitar 4 persen setiap lima tahunnya hingga mencapai 100 persen pada tahun 2045. Artinya, semua ibu hamil ditargetkan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai. Sementara cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin ditargetkan meningkat sekitar 6 persen setiap lima tahun. Kondisi ideal yang diharapkan di tahun 2045 adalah 80 persen ibu bersalin dapat terlayani dengan baik. Yang juga perlu menjadi perhatian adalah periode nifas, yaitu sejak 6 jam setelah melahirkan hingga 42 hari pascakelahiran. Periode ini merupakan masa kritis bagi ibu maupun bayi. Oleh karena itu, pelayanan pada masa tersebut juga perlu terus ditingkatkan. Diharapkan, cakupan layanan ibu nifas meningkat sekitar 3 persen setiap lima tahunnya dengan target 90 persen pada 2045.

Untuk menekan angka kematian neonatal, maka pelayanan kesehatan bayi baru lahir terus ditingkatkan. Kondisi ideal yang diharapkan adalah peningkatan cakupan layanan sekitar 3 persen setiap lima tahunnya, dengan target 90 persen pada tahun 2045. Cakupan pelayanan kesehatan pada anak di bawah lima tahun juga diharapkan semakin membaik. Tabel 3.3 menunjukkan target kenaikan cakupan layanan kesehatan balita adalah antara 5-6 persen setiap lima tahunnya. Pada 2045, diharapkan 80 persen dapat terlayani dengan baik.



Gambar 3.9 Target Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

g R P

Kabupaten Katingan 2022-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Salah satu upaya menjaga kesehatan anak adalah dengan pemberian imunisasi dasar secara lengkap. Pemberian imunisasi ini akan membantu anak-anak membangun pertahanan alaminya sehingga kebal terhadap berbagai penyakit menular yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Salah satu program pemberian imunisasi adalah *Universal Child Immunization (UCI)*, yaitu program yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal yang direkomendasikan, dengan target cakupan imunisasi minimal 90 persen di setiap desa/kelurahan. Tahun 2022, cakupan UCI di Kabupaten Katingan adalah 85,3 persen. Pada 2025 ditargetkan menjadi 86,0 persen. Angka ini diharapkan terus meningkat sekitar 3-4 persen setiap lima tahunnya hingga mencapai 99,2 persen pada tahun 2045.

Tabel 3.4 Kondisi Gizi dan Morbiditas Kabupaten Katingan, 2023-2045

Indikator	Tahun dasar (2023)	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase balita <i>wasting</i> (%)	7,00	6,56	5,58	4,75	4,04	3,44
Prevalensi balita <i>stunting</i> (%)	17,6	15,63	11,63	9,40	8,57	7,74
Jumlah kasus penyakit menular	2.401	menu run	menu run	menu run	menu run	menu run
Jumlah kasus penyakit tidak menular	74.177	menu run	menu run	menu run	menu run	menu run

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Sebagaimana amanat global dan nasional, maka Pemerintah Kabupaten Katingan juga berupaya menekan kasus gizi buruk, baik *wasting* maupun *stunting*. Untuk kasus *stunting*, secara nasional, angkanya coba ditekan hingga 5 persen pada 2045. Tabel 3.4 memperlihatkan target penurunan *stunting* di Kabupaten Katingan dari tahun 2025 hingga 2045. Persentase balita *stunting* di Kabupaten Katingan pada tahun 2023 adalah sebesar 17,6 persen. Pada tahun 2025, diharapkan berada pada angka 15,63 persen. Angka ini ditargetkan turun secara signifikan sebesar 25,63 persen menjadi 11,63 persen pada 2030. Pada 2035, ditekan lagi hingga 9,13 persen menjadi 9,40 persen. Lima tahun berikutnya, yaitu tahun 2040, diharapkan turun sebesar 8,83 persen menjadi 8,57 persen. Kondisi ini diharapkan turun lagi sebesar 9,68 persen menjadi 7,74 persen di tahun 2045. Target penurunan yang cukup signifikan ini memerlukan kerja bersama secara holistik dan komprehensif serta lintas sektor.

Selain menurunnya angka kematian dan menurunnya kekurangan gizi, kondisi kesehatan penduduk Katingan yang ideal di masa depan adalah juga terbebas dari penyakit. Harapan di masa depan, jumlah kasus penyakit menular semakin menurun. Namun disadari bahwa tantangan di masa depan adalah meningkatnya penyakit tidak menular, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, seperti hipertensi, jantung, *stroke*. Tantangan yang lain adalah meningkatnya penyakit degeneratif seiring dengan semakin bertambahnya penduduk lanjut usia yang juga rentan terhadap penyakit tidak menular. Hal ini memerlukan inovasi dalam kebijakan dan program kesehatan di Kabupaten Katingan.

Tabel 3.5 Kondisi Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi yang Ideal di Kabupaten Katingan, 2022-2045

Indikator	Tahun dasar (2022)	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase rumah tangga dengan fasilitas air minum bersih	62,20	63,74	67,59	71,44	75,29	79,14
Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama dengan tangki septik	72,34	74,00	76,76	79,52	82,82	85,04

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat juga ditandai dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas air bersih dan sanitasi. WHO menegaskan bahwa kepemilikan fasilitas air bersih dan sanitasi tidak hanya sebagai prasyarat kesehatan, tapi juga memberikan kontribusi terhadap mata pencaharian, tingkat kehadiran anak di sekolah, serta menciptakan masyarakat berketahanan yang hidup di lingkungan yang sehat. Untuk memenuhi hal tersebut, maka diharapkan terjadi peningkatan persentase rumah tangga di Kabupaten Katingan yang memiliki fasilitas air minum bersih dan tempat buang air besar yang memadai. Kondisi ideal di masa mendatang adalah terjadi peningkatan sebesar 5-6 persen setiap lima tahunnya bagi rumah tangga dengan fasilitas air minum bersih. Pada 2045, ditargetkan sebanyak 79,14 persen rumah tangga di Kabupaten Katingan sudah memiliki fasilitas air minum bersih. Ketersediaan air minum yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit, salah satunya adalah diare. Sementara persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan tangki septik, diharapkan meningkat sekitar 3-4 persen setiap lima tahunnya. Pada 2045, diharapkan ada 85,04 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan tangki septik, baik sendiri maupun bersama. Adanya pengolahan yang memadai akan mengurangi pencemaran air tanah dan air permukaan.

Aspek ketiga dalam peningkatan kualitas penduduk berkaitan dengan upaya menciptakan kesejahteraan atau kehidupan yang lebih layak. Salah satu indikatornya adalah peningkatan kemampuan atau daya beli masyarakat (pengeluaran per kapita disesuaikan). Tahun 2023, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Katingan sebesar Rp11.399 ribu. Diharapkan angka tersebut naik menjadi Rp11.810 ribu di tahun 2025. Peningkatan ini ditargetkan terus terjadi sebesar 9,3 persen setiap lima tahunnya hingga mencapai Rp16.286 ribu pada tahun 2045. Peningkatan daya beli ini sekaligus juga menggambarkan membaiknya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat.



Tabel 3.6 Kondisi Ideal Pembangunan Ekonomi Kabupaten Katingan, 2022-2045

Indikator	Tahun dasar	2025	2030	2035	2040	2045
Pengeluaran per kapita (ribu/orang/tahun)	11.399 (2023)	11.810	12.903	14.097	15.401	16.826
Indeks Gini	0,26 (2023)	0,217	0,137	0,087	0,055	0,035
Persentase penduduk miskin (%)	4,99 (2023)	4,93	4,78	4,64	4,51	4,37
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,62 (2022)	0,527	0,350	0,233	0,155	0,103
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,11 (2022)	0,100	0,077	0,053	0,029	0,005
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	64,42 (2023)	64,50	64,70	64,90	65,10	65,31
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,96 (2022)	4,66	3,98	3,40	3,08	3,03

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Selain mendorong peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan ekonomi juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antarpenduduk. Rasio gini Kabupaten Katingan tahun 2023 sebesar 0,26 dan ditargetkan turun menjadi 0,217 pada 2025. Angka ini diharapkan turun secara konsisten sebesar 36,7 persen setiap lima tahun, hingga mencapai 0,035 pada tahun 2045. Angka ini mengindikasikan bahwa 20 tahun mendatang diharapkan ketimpangan pendapatan antarpenduduk hampir tidak ditemukan lagi di Kabupaten Katingan atau pendapatan penduduk Katingan semakin merata.

Upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat diharapkan dapat mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan. Ditargetkan, angka kemiskinan dari 4,99 persen pada 2023 turun menjadi 4,93 persen pada 2025. Selanjutnya, pembangunan ekonomi ke depannya diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan sebesar 3 persen setiap periode lima tahun hingga mencapai 4,37 persen pada tahun 2045. Penurunan angka kemiskinan ini juga diikuti dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). P1 diharapkan turun secara konsisten sebesar 33,5 persen setiap lima tahun hingga mencapai 0,103 pada 2045. Demikian halnya dengan P2 yang juga diharapkan turun hingga angka 0,005 pada 2045 dengan tingkat penurunan yang variatif setiap lima tahunnya.

Salah satu bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah aspek ketenagakerjaan. Sebagaimana ditampilkan Tabel 3.6, pada 2023, TPAK Kabupaten Katingan sebesar 64,42 persen dan diharapkan meningkat menjadi 64,50 persen pada 2025. Angka ini ditargetkan meningkat sebesar 0,3 persen setiap lima tahunnya. Tahun 2045, TPAK Kabupaten Katingan ditargetkan mencapai 65,31 persen. Tabel 3.6 juga menunjukkan tren tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang diharapkan. Pada 2023, TPT Kabupaten Katingan sebesar 4,96 persen dan diharapkan turun menjadi 4,66 persen pada tahun 2025. Angka ini diharapkan mengalami penurunan sebesar 14,5 persen menjadi 3,98 persen pada 2030 dan turun lagi menjadi 3,40 persen pada 2035. Pada 2040, diharapkan terjadi penurunan TPT sebesar 9,6 persen atau berada pada angka 3,08. Di tahun 2045, diharapkan TPT Kabupaten Katingan sebesar 3,93 persen. Artinya, tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat terjaga pada tingkat *natural unemployment rate* (3-4 persen) atau berada pada tingkat pengangguran terendah. Pada posisi ini, hampir seluruh penduduk usia kerja terserap pada pasar kerja.

Upaya untuk mencapai berbagai target pembangunan pendidikan, kesehatan, perlu memperhatikan potensi dan dampak yang dapat muncul dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk Kabupaten Katingan.

1. Jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah angkatan kerja usia produktif yang meningkat memerlukan investasi yang cukup memadai untuk meningkatkan pemerataan dan memperluas akses sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Perubahan sosial-budaya masyarakat karena keterbukaan informasi dan perbaikan infrastruktur meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas.
3. Peningkatan usia harapan hidup menuntut peningkatan standar hidup, pendidikan yang lebih baik, gaya hidup yang lebih sehat, serta akses yang lebih besar terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Semakin meningkatnya usia harapan hidup ini akan berpotensi pada semakin tingginya populasi lansia di masa depan. Lansia yang memiliki kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi akan berdampak pada semakin bertambahnya beban keluarganya dan lingkungan. Hal ini perlu didukung oleh sistem kesehatan yang lebih memadai dan holistik, termasuk juga peningkatan infrastruktur yang ramah lansia.
4. Jumlah penduduk yang bertambah akan meningkatkan tekanan pada daya dukung lingkungan, ketahanan pangan, serta kondisi gizi dan kesehatan. Hal ini mendorong perlunya inovasi dalam pemenuhan layanan kebutuhan dasar kesehatan dan gizi yang lebih baik.
5. Perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan jumlah penduduk dewasa dan lansia yang meningkat akan berdampak pada terjadinya transisi epidemiologi di masa depan, yaitu peningkatan penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif. Hal ini mendorong inovasi dalam layanan kesehatan lansia, baik dalam perawatan maupun pemenuhan gizi penduduk lanjut usia; serta inovasi dalam penanganan penyakit tidak menular dan degeneratif.
6. Peningkatan layanan pendidikan berdampak pada semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, yang juga berdampak pada pasar kerja. Saat ini, angkatan kerja Kabupaten Katingan didominasi oleh lulusan perguruan tinggi (TPAK lulusan perguruan tinggi mencapai 87,07 persen). Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, serta peningkatan produktivitas dan daya saing akan menjadi modal dasar bagi perekonomian daerah untuk terus tumbuh dan maju dalam jangka panjang. Dalam hal ini, dituntut kapasitas pemerintah daerah bersama-sama dengan swasta untuk dapat memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, efektif, dan efisien.
7. Sejalan dengan transisi demografi dan perubahan struktur ekonomi, kemajuan dan perkembangan teknologi berpengaruh besar terhadap aspek ketenagakerjaan. Penerapan otomatisasi dan revolusi teknologi akan berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Untuk merespons hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan kelompok swasta.

3.3 Pembangunan Keluarga

Tabel 3.7 menampilkan kondisi ideal dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Katingan. Target capaian ini sekaligus menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan ke depan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merujuk pada peran

aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang mencakup keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif dan profesional serta kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga. IDG yang tinggi merupakan salah satu indikator berhasilnya upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Selain itu, IDG juga menunjukkan semakin meluasnya kesempatan perempuan di dunia kerja, sehingga perempuan bisa memberikan sumbangan bagi keuangan keluarga. Diharapkan, IDG di Katingan menunjukkan kenaikan yang konsisten. Secara ideal, kenaikan IDG ini akan disertai dengan semakin banyaknya jumlah anggota DPRD perempuan, jumlah perempuan yang berpartisipasi di ranah profesional dan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Tabel 3.7 Kondisi Ideal Pembangunan Keluarga, 2022-2045

Indikator	Tahun dasar	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,60 (2023)	86,75	87,49	88,23	88,97	89,70
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,80 (2023)	67,69	69,96	72,31	74,74	77,25
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,6 (2022)	0,52	0,44	0,36	0,27	0,19
Cakupan keluarga dalam pembinaan Tri Bina	67,04 (2022)	68,73	71,55	74,37	77,18	80,00
Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK)	63,09 (2022)	65,30	68,97	72,65	76,32	80,00
iBangga	53,57 (2020)	55,33	57,63	59,94	62,24	64,54

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Semakin kecil IKG, semakin kecil pula kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi tersebut. IKG di Katingan cenderung menurun dari tahun ke tahun, dan ini merupakan hal yang positif. Akan tetapi, apabila dimensi IDG dan IKG disandingkan, tampaklah bahwa pemerintah Kabupaten Katingan dan berbagai pemangku kebijakan yang lain masih harus bekerja keras untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan meningkatkan akses perempuan ke lapangan pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan pencapaian perempuan di berbagai bidang ini membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Berbagai Organisasi Perangkat Daerah di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan, pengendalian penduduk, dan ketenagakerjaan, harus bahu membahu untuk mencapai tujuan yang sama.

Selain IDG dan IKG, cakupan keluarga dalam pembinaan Tri Bina merupakan unsur yang penting dalam pilar pembangunan keluarga. Tri Bina merepresentasikan pendekatan siklus hidup manusia karena Tri Bina merangkum berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan balita, remaja dan kelompok lanjut usia. Semakin tinggi cakupan pembinaan Tri Bina, berarti kemampuan keluarga untuk merawat dan mendampingi balita, remaja, dan lansia semakin baik. Dengan demikian, kualitas keluarga pun akan meningkat. Balita dan remaja merupakan komponen penduduk yang akan sangat menentukan ketahanan keluarga di Katingan. Kemampuan untuk mengasuh balita akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang balita sehingga balita terhindar dari berbagai masalah, termasuk *stunting*. Sementara itu, remaja yang sehat secara fisik dan mental

9
G
M

mempunyai potensi besar untuk menjadi penduduk yang produktif. Hal ini akan berpengaruh positif bagi bonus demografi di Kabupaten Katingan. Penduduk usia muda tidak saja akan bertambah secara kuantitas, akan tetapi mereka juga berkembang baik secara kualitas. Sementara itu, Bina Keluarga Lansia membuka kesempatan bagi keluarga untuk mempelajari berbagai keterampilan guna mewujudkan lansia tangguh. Tujuan penyuluhan di kelompok Bina Lansia adalah.

1. Mewujudkan pembangunan keluarga lansia tangguh berdasarkan tujuh dimensi lansia tangguh
2. Lansia yang tergabung dalam kelompok BKL diharapkan tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif.

Lansia tangguh adalah seseorang atau sekelompok lansia yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas dan mampu menyesuaikan diri dengan proses secara penuaan dengan positif. Dengan demikian, mereka mampu menjadi lansia yang berdaya bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Ketangguhan lansia bisa diukur melalui tujuh indikator, yaitu dimensi spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesi vokasional, dan dimensi lingkungan.²⁰

Selain lansia, anggota keluarga remaja juga perlu didampingi dengan baik. Masa remaja sering disebut sebagai masa yang penuh tantangan. Periode ini diwarnai dengan perubahan besar secara fisik, intelektual, dan emosional yang memunculkan berkurangnya kontrol sosial dan meningkatnya sensitivitas remaja. Dalam buku lama yang populer, Hall (1904) menyebut masa remaja sebagai masa topan badai dan tekanan²¹. PIK atau Pusat Informasi Konseling remaja merupakan kegiatan yang dikelola dari dan untuk remaja. Tujuan PIK adalah untuk memberi pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi dan persiapan kehidupan keluarga. PIK merupakan wadah bagi remaja untuk bersama-sama belajar tentang dampak negatif seks pranikah, pernikahan dini, narkoba dan zat adiktif lainnya. PIK mempersiapkan remaja untuk menjadi remaja tangguh yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan²². Idealnya, PIK bisa tersebar secara merata di semua daerah di Katingan. Apabila hal ini bisa menjadi kenyataan, maka pernikahan dini, perceraian dan pemakaian narkoba dan zat adiktif lainnya mempunyai potensi untuk menurun.

Kualitas keluarga juga bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga. iBangga merupakan indeks pengukuran keluarga dengan melihat dimensi ketenteraman, kemandirian dan keluarga bahagia. iBangga merupakan data yang bisa dipakai sebagai ukuran kinerja pemerintah. Data-data itu merupakan dasar bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan atau program yang berbasis bukti. Selain itu iBangga juga bisa dipakai untuk menentukan peringkat pembangunan keluarga di suatu wilayah. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan²³. Proyeksi iBangga di Kabupaten Katingan menunjukkan peningkatan yang konsisten. Ini merupakan hal yang menggembirakan. Akan tetapi akan lebih baik lagi apabila pemerintah kabupaten Katingan bisa memetakan keluarga di wilayah Katingan menjadi keluarga tangguh, berkembang dan rentan. Pemetaan semacam ini akan memudahkan pemerintah

²⁰ <https://golantang.bkkbn.go.id/menjadi-lansia-tangguh-dengan-menerapkan-7-nilai-dimensi-lansia-tangguh-dan-mengenal-apa-itu-bina-keluarga-lansia-bkl>

²¹ Hall, SG. 1904. *Adolescence: its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education*. Appleton and Company

²² <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/17894/intervensi/721461/kegiatan-pusat-informasi-dan-konseling-remaja-pik-r>

²³ BKKBN. 2020. *Buku saku pengenalan indeks pembangunan keluarga*.

daerah untuk merencanakan kebijakan dan program untuk meningkatkan status keluarga dari berkembang dan rentan menjadi tangguh.

3.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Kabupaten Katingan diproyeksikan akan mengalami peningkatan tren migrasi internal. Banyak penduduk dari daerah pedesaan akan pindah ke pusat-pusat perkotaan dalam kabupaten atau ke kota-kota besar di provinsi lainnya. Hal ini didorong oleh pencarian peluang kerja, akses pendidikan yang lebih baik, dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Misalnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sekitar 15 persen penduduk Kabupaten Katingan tinggal di daerah perkotaan, meningkat dari 12 persen pada tahun 2015. Tren ini diproyeksikan akan terus meningkat, dengan perkiraan bahwa 20 persen penduduk akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2030. Daerah-daerah yang mengalami perkembangan ekonomi cepat, terutama di sektor pertanian dan industri kecil, akan menarik migrasi masuk dari daerah lain. Sebaliknya, daerah dengan peluang ekonomi yang menurun mungkin mengalami migrasi keluar.

Kabupaten Katingan juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan migrasi tenaga kerja internasional yang didorong oleh meningkatnya permintaan tenaga kerja di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja asal Kalimantan Tengah yang bekerja di luar negeri meningkat sebesar 10% setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Migran internasional ini biasanya bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, dan jasa. Peningkatan migrasi tenaga kerja internasional akan berkontribusi pada peningkatan remitansi yang dikirim kembali ke Kabupaten Katingan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa remitansi yang diterima oleh keluarga di Kalimantan Tengah mencapai Rp 150 miliar pada tahun 2020, yang dapat berdampak positif pada ekonomi lokal.

Namun demikian, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tren mobilitas penduduk di Katingan dapat dilakukan dengan pilihan skenario optimis, moderat, dan pesimis. Dalam skenario optimis, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan meningkat pesat dengan investasi yang signifikan dalam sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Tingkat pengangguran menurun dan pendapatan per kapita meningkat. Misalnya, jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun dan investasi di sektor-sektor utama meningkat 50 persen, maka migrasi keluar akan berkurang dan migrasi masuk meningkat. Akses dan kualitas pendidikan juga meningkat dengan pembangunan sekolah-sekolah baru dan peningkatan kualitas guru. Infrastruktur transportasi diperbaiki dengan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi umum. Lingkungan dijaga dengan kebijakan lingkungan yang kuat untuk mengurangi deforestasi dan polusi. Dalam skenario ini, migrasi masuk meningkat, terutama dari daerah-daerah lain yang kurang berkembang, sementara migrasi keluar menurun karena peluang kerja dan kualitas hidup yang lebih baik di Kabupaten Katingan.

Dalam skenario moderat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan stabil dengan beberapa investasi dalam sektor-sektor utama. Tingkat pengangguran stabil dan pendapatan per kapita meningkat perlahan. Akses pendidikan membaik dengan pembangunan beberapa sekolah baru dan pelatihan guru. Infrastruktur transportasi ditingkatkan secara bertahap dengan proyek-proyek kecil dan menengah. Lingkungan dilindungi dengan kebijakan yang moderat dan beberapa inisiatif untuk mengurangi polusi dan deforestasi. Dalam skenario ini, migrasi masuk dan keluar seimbang, dengan sedikit peningkatan migrasi masuk karena peluang kerja yang lebih baik.

Dalam skenario pesimis, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan melambat atau stagnan dengan sedikit investasi dalam sektor-sektor utama. Tingkat pengangguran tetap tinggi dan pendapatan per kapita menurun. Akses dan kualitas pendidikan tetap rendah dengan sedikit pembangunan sekolah baru dan pelatihan guru. Infrastruktur transportasi tidak memadai dengan sedikit pembangunan baru dan pemeliharaan yang buruk. Lingkungan terus terdegradasi dengan deforestasi dan polusi yang meningkat. Dalam skenario ini, migrasi keluar meningkat karena kurangnya peluang kerja dan penurunan kualitas hidup, sementara migrasi masuk menurun.

Tabel. 3.8 Kondisi Ideal Mobilitas di Kabupaten Katingan, 2024-2045

Indikator	Tahun dasar	2025	2030	2035	2040	2045
Migrasi Netto	2023 = negatif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dengan skenario optimis, Kabupaten Katingan dapat menarik migrasi masuk yang signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika tantangan-tantangan tidak diatasi, skenario pesimis dapat menyebabkan peningkatan migrasi keluar, yang berdampak negatif pada pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengelola mobilitas penduduk dengan baik, termasuk meningkatkan ekonomi lokal, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan melindungi lingkungan. Hal ini akan memastikan bahwa mobilitas penduduk memberikan manfaat optimal bagi Kabupaten Katingan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

3.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Dalam hal data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, Kabupaten Katingan menginginkan agar pengelolaannya semakin baik dan terintegrasi. Hal ini berarti bahwa administrasi kependudukan harus berjalan dengan lancar, sehingga layanan pengadministrasian kependudukan adalah prioritas. Peristiwa kematian, kelahiran, perpindahan harus tercatat dengan benar dan termutakhirkan. Administrasi penduduk tersebut akan menjadi sumber data bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Katingan. Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan proses administrasi penduduk adalah persentase kepemilikan KTP elektronik, kartu identitas anak, akta kelahiran. Ketiga dokumen tersebut merupakan dokumen yang dapat menunjukkan identitas diri seseorang.

Indikator pertama adalah kepemilikan KTP elektronik, Kabupaten Katingan menargetkannya 100 persen di tahun 2045. Target tersebut mendasarkan pada capaian dan tren penduduk yang telah memiliki KTP elektronik yang memang sudah sangat tinggi. Di tahun 2023 misalnya, persentase penduduk yang telah memiliki KTP elektronik tercatat lebih dari 98 persen sehingga untuk indikator ini

Katingan optimis dapat mencapai 100 persen di 2045. Indikator selanjutnya adalah kepemilikan akta kelahiran khususnya pada penduduk umur 0-18 tahun, Katingan menginginkan agar capaiannya terus meningkat hingga 100 persen di 2045. Target optimis ini sejalan dengan program layanan penerbitan akta kelahiran yang berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan dan dengan dinas pendidikan. Oleh karenanya, bayi yang baru lahir akan tercatat di fasilitas kesehatan dan segera mendapatkan dokumen akta kelahiran, sedangkan anak di usia sekolah yang belum memiliki akta akan difasilitasi oleh sekolah.

Tabel 3.8 Target Indikator Administrasi dan Data Kependudukan, 2023-2045

Indikator	Tahun dasar	2025	2030	2035	2040	2045
Kepemilikan KTP elektronik (e-KTP)	98,90 (2023)	99,03	99,26	99,49	99,72	100,00
Kepemilikan akta kelahiran (penduduk umur 0-18 tahun)	98,10 (2023)	98,27	98,68	99,09	99,50	100,00
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	58,60 (2023)	60,44	65,10	69,76	74,41	80,00
Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	99,70 (2023)	99,72	99,78	99,85	99,92	100,00
Sistem informasi data kependudukan yang terintegrasi	Belum tersedia			Tersedia		

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Indikator berikutnya adalah kepemilikan kartu identitas anak yang ditargetkan terus meningkat capaiannya dari 60,44 persen di tahun 2025 menjadi 80,0 persen di 2045. Selanjutnya Kabupaten Katingan juga menargetkan seluruh keluarga untuk memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga. Kepemilikan dokumen kartu keluarga akan memberi manfaat bagi anggota untuk mendapatkan hak kewarganegaraannya.

Di luar indikator-indikator tersebut, Kabupaten Katingan juga menginginkan agar data penduduk yang tercatat sebagai hasil registrasi penduduk menjadi sumber rujukan bagi perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, data hasil registrasi harus dikelola secara memadai sehingga menghasilkan informasi yang akurat melalui sistem informasi kependudukan. Dalam konteks ini, Kabupaten Katingan menginginkan agar di masa depan terbangun sistem informasi kependudukan yang terintegrasi antarsektor. Sistem informasi memungkinkan untuk menyediakan data yang dapat diakses untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.

Data dan sistem informasi kependudukan juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Apabila partisipasi masyarakat baik, maka kependudukan juga akan semakin berkualitas. Dari sisi ini, Kabupaten Katingan menginginkan agar ke depannya, partisipasi masyarakat semakin baik, khususnya dalam mencatatkan peristiwa kematian, perpindahan tempat tinggal, dan perceraian. Data-data tentang peristiwa kependudukan tersebut tidak hanya bermanfaat dalam penyediaan data kependudukan, tetapi juga dapat merekam tingkat persoalan kekerasan dalam rumah tangga sekaligus pemberdayaan perempuan. Khususnya pada data akta perceraian, informasi mengenai alasan atau penyebab perceraian akan teridentifikasi. Latar belakang perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi informasi penting dalam melakukan intervensi program penguatan pemberdayaan keluarga. Tidak hanya itu, akta perceraian juga dapat menyediakan informasi tentang sumber yang mengajukan perceraian, maka diidentifikasi tingkat/kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Di negara-negara maju, perceraian yang diajukan oleh perempuan cenderung lebih tinggi karena perempuan memiliki kemampuan dan kebebasan yang tinggi untuk memutuskan kehidupannya. Di negara maju, perceraian atas permintaan perempuan memiliki arti setara dengan tingkat kekerasan yang rendah. Di negara maju, perempuan dapat mengambil keputusan untuk berpisah daripada berdiam dibalik kultur dan nilai-nilai tradisional, sehingga tingkat kekerasan terhadap perempuan menjadi rendah.

Dengan kondisi ideal yang diharapkan tersebut, maka Kabupaten Katingan akan menghadapi beberapa potensi dan dampak yang ditimbulkan antara lain.

1. Tersedianya data kependudukan yang termutakhirkan berdasarkan hasil registrasi penduduk untuk perencanaan pembangunan. Hal ini akan sangat menguntungkan karena intervensi program lebih tepat sasaran.
2. Tersedianya basis data kependudukan yang valid, terkini (mutakhir), dan dapat diintegrasikan dengan sektor lain sehingga menunjang pemberian pelayanan publik yang efektif dan efisien, misalnya pendidikan, kesehatan, perbankan, bantuan sosial, jaminan sosial kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.
3. Kebutuhan terhadap penyediaan sarana prasarana pendukung yang memadai. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam hidupnya harus didukung oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Di masa mendatang, teknologi dan sistem informasi akan berkembang semakin maju. Hal ini harus dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil secara *online*.
4. Sebagai konsekuensi dari upaya untuk penyediaan data dan sistem informasi kependudukan yang akurat, maka tuntutan terhadap perlindungan dan keamanan data juga akan semakin tinggi. Sistem informasi data kependudukan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan keamanan data untuk menjaga kepercayaan publik.

Bab 4

Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan

4.1 Visi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan

Visi pembangunan kependudukan Kabupaten Katingan didasari oleh visi Indonesia 2045, visi Kalimantan Tengah 2045, dan visi Katingan 2045. Visi Indonesia 2045 (Bappenas, 2019²⁴) adalah berdaulat, maju, adil dan makmur. Melalui visi ini diharapkan dapat mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia, serta pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan. Pencapaian visi tersebut dibangun melalui empat pilar, yaitu (1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan, (3) pemerataan pembangunan, serta (4) pemantapan ketahanan nasional. Mengacu pada Pilar 1, pembangunan kependudukan Indonesia tahun 2045 diarahkan pada (1) pengendalian kuantitas penduduk yang berkelanjutan, (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (3) pembangunan keluarga dan perlindungan sosial berkelanjutan, (4) penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan (5) penguatan tata kelola administrasi kependudukan dan *database* kependudukan (Ichettiarto, 2023²⁵).

Visi Provinsi Kalimantan Tengah 2045 adalah Kalimantan Tengah menuju provinsi tangguh yang bangkit, melaju, terarah, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan pengejawantahan cita-cita dan harapan masyarakat Kalimantan Tengah yang tangguh dan pantang menyerah di masa depan.

Visi Katingan 2045 adalah Kabupaten Katingan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Visi ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas

²⁴ Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

²⁵ Ichettiarto, Bonivasius Prasetya. 2023. "Arah dan Kebijakan Pengendalian Penduduk di Masa yang Akan Datang." *Materi Seminar Isu dan Kebijakan Kependudukan Menyongsong Indonesia Emas: Menyikapi Hasil Sensus Penduduk 2020*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM, 20 Februari 2023.

lingkungan hidup²⁶. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan delapan misi pembangunan Kabupaten Katingan, yaitu (1) mengembangkan SDM yang berbudaya dan berdaya saing, (2) mengakselerasi transformasi ekonomi hijau yang inklusif, (3) mengembangkan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan, (4) meningkatkan keberlanjutan konservasi lingkungan hidup, (5) meningkatkan kondusifitas dalam kehidupan bermasyarakat, (6) mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif.

Berdasarkan visi Indonesia 2045, visi Provinsi Kalimantan Tengah 2045, dan visi Katingan 2045, maka dirumuskan visi *grand design* pembangunan kependudukan Kabupaten Katingan, yaitu “terwujudnya penduduk tumbuh seimbang, berkualitas, berlandaskan keluarga berketahanan yang didukung oleh data dan sistem informasi kependudukan terpercaya”.

- Tumbuh seimbang. Pembangunan kependudukan Kabupaten Katingan diarahkan untuk mencapai penduduk tanpa pertumbuhan. Situasi ini akan memudahkan Kabupaten Katingan untuk mengoptimalkan pembangunan di semua sektor. Di Tingkat teknis, penduduk tanpa pertumbuhan didorong melalui pencapaian angka kelahiran total 2,1, pendewasaan usia kawin pertama serta peningkatan dan perluasan akses layanan kontrasepsi. Selain itu penduduk tumbuh seimbang juga diupayakan melalui penataan dan mengarahkan mobilitas dengan memerhatikan pemenuhan hak, kesejahteraan, dan lingkungan yang berkelanjutan.
- Berkualitas. Visi ini mengandung arti menjadikan kualitas penduduk Kabupaten Katingan semakin meningkat dan mampu bersaing dalam berbagai aspek, tidak hanya di level daerah kabupaten, tapi juga hingga tingkat nasional, bahkan global. Pembangunan Katingan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki pilihan lebih luas untuk menikmati hidup lebih lama, lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih sejahtera.
- Berlandaskan keluarga yang berketahanan mengandung arti bahwa pembangunan bertumpu pada keluarga. Kabupaten Katingan mengupayakan terbentuknya keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menjalankan fungsi agama, cinta kasih, reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan. Pembangunan berlandaskan keluarga dimaknai sebagai peletakan keluarga sebagai pendekatan utama program. Setiap kehidupan memiliki tahap penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Hal ini menjadi prasyarat bagi terbentuknya keluarga berketahanan.

²⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan. Tanpa Tahun. *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2025 – 2045*.

- Data dan sistem informasi kependudukan terpercaya. Pembangunan kependudukan di Kabupaten Katingan harus didasarkan pada data kependudukan yang terkini (*update*) dan valid. Kabupaten Katingan membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencatatan peristiwa kependudukan, menjamin keamanan data yang diberikan, dan mengintegrasikannya dengan data sektoral ataupun data berbasis keluarga sehingga bermanfaat bagi perencanaan pembangunan.

Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut melalui lima pilar pembangunan kependudukan, yaitu pengendalian (pengelolaan) kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

4.2 Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan

4.2.1 Kuantitas Penduduk

Dalam rangka mencapai visi yang dicita-citakan, Kabupaten Katingan perlu memperhatikan isu-isu strategis berikut.

a. Penurunan angka kelahiran dan komitmen politik

Angka kelahiran diharapkan terus menurun hingga berada pada kisaran 2,1 sangat ditentukan oleh komitmen kebijakan dan politik untuk terus mengupayakannya. Kebijakan dan program pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga yang dilakukan secara konsisten dan kontinu tentu akan berdampak pada pencapaian target *replacement level*. Namun, isu masa pembangunan daerah (termasuk di Katingan) lima tahun akan memengaruhi arah kebijakan pengendalian penduduk di setiap periodenya. Hal pentingnya adalah menjaga keberlanjutan komitmen antarpemimpin daerah untuk terus mengawal urgensi penurunan angka kelahiran di 2,1.

b. Pertumbuhan penduduk

Angka kelahiran yang menurun turut berkontribusi pada tingkat pertumbuhan penduduk. Apabila terjadi penurunan angka kelahiran, maka pertumbuhan penduduk akan terkendali. Namun demikian, angka kelahiran bukan satu-satunya komponen penentu pertumbuhan penduduk. Masih ada komponen lainnya, yaitu kematian dan migrasi. Ini mengindikasikan bahwa penurunan angka kelahiran harus terjadi secara beriringan dengan penurunan kematian dan migrasi yang terkontrol. Apabila penurunan angka kelahiran tidak diiringi oleh terkontrolnya

komponen lain, maka berpotensi menimbulkan tantangan. Salah satunya adalah tekanan dan persaingan antara penduduk Katingan dengan pendatang manakala penurunan kelahiran diiringi migrasi yang tinggi. Tantangan akan semakin nyata ketika penduduk pendatang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih baik. Mereka berpotensi untuk mengisi peluang ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih menguntungkan.

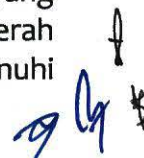
c. **Bonus Demografi**

Tren rasio ketergantungan di Kabupaten Katingan tampak menurun dari 46,86 persen di tahun 2020 menjadi 45,9 persen di tahun 2023. Sayangnya penurunan adalah puncak terendahnya dan kemudian akan berangsur meningkat hingga di tahun 2045 akan berada di kisaran 49,21. Peningkatan itu menunjukkan bahwa Katingan akan meninggalkan fase bonus demografi, sehingga Katingan perlu mengupayakan agar bonus demografi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan waktu yang tersisa, bonus demografi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan keterampilan penduduk usia produktif, membuka akses dan kesempatan investasi bagi penyerapan tenaga kerja, mendorong usaha mandiri dan kewiraswastaan di kalangan remaja. Upaya-upaya tersebut perlu memperhatikan perkembangan pasar kerja yang saat ini dan ke depan akan mengarah pada padat modal serta berbasis teknologi dan informasi.

Bonus demografi yang tidak dimanfaatkan akan menguap begitu saja dan pembangunan akan kembali dihadapkan pada persoalan ekonomi. Pembangunan harus menanggung pembiayaan yang besar untuk menjamin kehidupan sosial dan kesejahteraan penduduk usia lanjut. Oleh karenanya, selama masih berada dalam fase bonus demografi, penyiapan-penyiapan perlu dilakukan dengan tepat, termasuk mengoptimalkan penduduk usia produktif untuk aktif secara ekonomi. Keterlibatan dan partisipasinya di dunia kerja harus didorong dengan berbagai skema agar beban negara menjadi lebih ringan. Apabila penduduk usia produktif aktif secara ekonomi, maka mereka akan dapat menjamin kesejahteraan hidup keluarganya, menginvestasikan pendapatannya untuk hal-hal positif yang memberi manfaat bagi masa depan.

d. **Akses layanan keluarga berencana**

Perluasan akses layanan kontrasepsi di pusat layanan kesehatan terdekat hingga rumah sakit adalah hal yang krusial untuk mendukung penurunan angka kelahiran. Terlebih pada pasangan yang tinggal di desa dan di kecamatan yang jauh dari pusat kegiatan kabupaten. Tanpa akses yang memadai, maka besar kemungkinan pasangan yang tinggal di daerah pedesaan, daerah terjauh, dan daerah terluar akan kesulitan memenuhi



kebutuhan kontrasepsinya. Apabila hal itu terjadi, maka dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan angka kelahiran dan tidak terpenuhinya kebutuhan kontrasepsi (*unmet need*).

e. **Pemakaian kontrasepsi jangka panjang**

Memperhatikan tingkat pemakaian kontrasepsi jangka panjang yang masih kurang dari 20 persen, Katingan berpotensi menghadapi tantangan berupa tingkat putus pakai yang tinggi. Drop out pemakaian kontrasepsi dapat membahayakan pencapaian target penduduk tumbuh seimbang. Terlebih apabila drop out terjadi pada pasangan rentan, yakni di usia awal reproduksi, pasangan yang tinggal di daerah terluar dan terjauh, serta pasangan yang hidup dalam kemiskinan.

f. **Pendewasaan usia kawin pertama**

Usia kawin pertama menjadi salah satu komponen yang penyumbang angka kelahiran. Meski pemerintah telah menentukan batas minimal usia perkawinan, namun praktik pernikahan dini masih ditemukan. Pernikahan dini harus terus ditekan karena berisiko memunculkan persoalan sosial ekonomi, baik dari sisi pasangan ataupun anak yang dilahirkan. Pendewasaan usia kawin pertama akan menjadi solusi yang diutamakan untuk mencegah rentetan persoalan yang ditimbulkan, seperti kematian ibu, kematian bayi, kekerasan dan konflik dalam rumah tangga, penelantaran anak, tumbuh kembang anak, *stunting*, hingga kemiskinan struktural.

4.2.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk dalam GDPK ini diidentifikasi sebagai fungsi dari tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ketiga komponen tersebut bekerja bersama-sama untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas, yakni terdidik, terampil, dan berdaya saing serta sehat sehingga memiliki akses dan kesempatan yang lebih luas untuk mencapai kesejahteraan.

a. **Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat**

Pemerintah Kabupaten Katingan telah berupaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dasar. Salah satunya adalah tersedianya fasilitas pendidikan dasar, dari TK hingga SMP, di semua kecamatan. Pada jenjang usia dini, terdapat 111 sekolah TK pada tahun 2021/2022 (negeri maupun swasta) dan 7 sekolah raudatul athfal (RA) pada 2022/2023. Untuk tingkat sekolah dasar (SD), pada 2023/2024 terdapat 214 sekolah (negeri dan swasta) yang tersebar di 13 kecamatan, dan 7 sekolah madrasah ibtidaiyah yang ada di 3 kecamatan. Di jenjang sekolah menengah pertama (SMP),

pada 2023/2024 terdapat 84 sekolah (negeri dan swasta) yang tersebar di 13 kecamatan, dan 9 madrasah tsanawiyah yang ada di 4 kecamatan.

Namun penyediaan fasilitas pendidikan ini belum cukup berhasil meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Pertama, dilihat dari rata-rata lama sekolah. Hingga tahun 2023, rata-rata lama sekolah penduduk Katingan yang berusia 15 tahun ke atas masih cukup rendah, yaitu 8,85 tahun atau setara dengan SMP kelas 2. Artinya, pendidikan Katingan belum dapat memenuhi standar pendidikan dasar sembilan tahun. Indikator kedua adalah angka partisipasi murni. Meskipun trennya meningkat, namun angka partisipasi murni SMP pada tahun 2023 sebesar 78,14 persen. Angka ini lebih rendah dari angka nasional (81,35 persen) dan angka provinsi (79,07 persen). Ketiga, masih dijumpai kasus putus sekolah di Kabupaten Katingan, baik di tingkat SD maupun SMP. Kasus putus sekolah ini banyak dialami oleh siswa didik yang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat rawan melanjutkan pendidikan (RMP).

b. Kesenjangan layanan pendidikan

Kesenjangan dalam penyediaan layanan pendidikan, dapat dilihat dari adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam hal rasio guru terhadap siswa, khususnya pada jenjang pendidikan SMP (BPS). Tahun 2023, terdapat 5 kecamatan dengan rasio di bawah angka kabupaten (11,2). Delapan kecamatan lainnya memiliki rasio lebih dari angka kabupaten, bahkan 1 kecamatan memiliki rasio sebesar 21,3. Data ini juga mengindikasikan ketidakmerataan distribusi tenaga pengajar penuh waktu. Dalam hal infrastruktur, distribusi sarana prasarana pendukung layanan pendidikan juga belum merata. Sarana prasarana sekolah di wilayah pinggiran masih minim. Kesenjangan layanan pendidikan ini akan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan pendidikan yang kemudian akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia di Katingan.

c. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat

Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat Katingan dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, masih rendahnya usia harapan hidup penduduk Katingan, berada di bawah angka provinsi dan nasional. Hal ini tidak lepas dari faktor kondisi lingkungan, ketersediaan pangan, serta tingkat pendidikan. Kedua, masih adanya kasus kematian ibu dan bayi; bahkan angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Katingan sejak 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan. Pada 2023, AKI berada pada angka 176,0 dan AKB berada pada angka 12,69. Ketiga, masih rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang aman. Akses terhadap air minum dan sanitasi aman masih menjadi tantangan pembangunan. Hal

ini karena perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, cakupan pelayanan yang masih rendah, dan pencemaran air yang semakin tinggi. Keterbatasan dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang aman juga dapat disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat.

d. Masih adanya kasus *stunting*

Kabupaten Katingan masih menghadapi permasalahan gizi, baik *wasting* maupun *stunting*. Dua tahun pertama kehidupan seorang anak adalah periode emas untuk mencegah kemungkinan terjadinya *wasting* dan *stunting*. Kedua kondisi ini saling terkait; anak dengan *wasting* yang tidak ditangani dengan baik akan berisiko menjadi *stunting*, demikian sebaliknya²⁷. Pencegahan serta pengobatan dan perawatan yang tepat terhadap anak dengan *wasting* akan membantu mereka bertahan hidup serta mengejar pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga mencegah terjadinya *stunting*.

Meskipun tiga tahun terakhir mengalami penurunan, namun prevalensi *stunting* Kabupaten Katingan masih berada pada angka 17,6 persen pada 2023. Apabila tidak ditangani dengan tepat, *stunting* akan berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas hidup penduduk di masa depan, yaitu miskin, kurang sehat dan rentan terhadap penyakit, serta menurunnya kemampuan kognitif.

e. Terjadinya transisi epidemiologi

Penyakit tidak menular, seperti DM (diabetes melitus), hipertensi, kanker, dan gangguan kesehatan mental menjadi ancaman pembangunan kesehatan di masa depan. Penyakit tidak menular ini banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan dan olah raga. Semakin tingginya angka harapan hidup juga berdampak pada meningkatnya potensi penyakit degeneratif di masa depan.

f. Masih rendahnya standar hidup masyarakat

Rendahnya standar hidup tergambar dari kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli yang rendah akan menyulitkan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya secara layak, yang berdampak pada menurunnya standar hidup masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Meskipun trennya terus meningkat, tetapi pengeluaran per kapita penduduk Katingan relatif masih di bawah angka kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah (berada pada posisi 9 dari 14 kabupaten/kota yang ada). Pada 2023, berada pada angka Rp11.878 ribu per tahun.

9 11.878

²⁷ <https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi/artikel/stunting-wasting-sama-atau-beda>

Selama ini, pemerintah memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jumlah keluarga penerima PKH di Kabupaten Katingan selalu bertambah setiap tahunnya. Penambahan sangat signifikan terjadi pada kurun 2021-2022 (bertambah sekitar 132 persen), yaitu dari 3.517 keluarga pada 2021 menjadi 8.162 keluarga pada 2022. Jumlah ini bertambah sekitar 2 persen menjadi 8.328 keluarga pada 2023. Semakin banyaknya penerima PKH ini juga sekaligus mengindikasikan masih rendahnya standar hidup penduduk Katingan.

g. Ketimpangan akses terhadap pasar kerja

Ketimpangan ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk berdasarkan gender. TPAK laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan perempuan. Sementara, tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada 2023, TPT perempuan sebesar 6,20 persen dan TPT laki-laki sebesar 4,41 persen.

4.2.3 Pembangunan Keluarga

Visi Kabupaten Katingan 2045 adalah Kabupaten Katingan yang Mandiri, Berdaya dan Berkelanjutan. Sementara itu, misi Katingan 2045 terdiri dari empat pilar, yaitu:

- 1) Pilar ekonomi: mengakselerasi transformasi ekonomi hijau yang inklusif.
- 2) Pilar sosial:
 - Mengembangkan SDM yang berbudaya dan berdaya saing.
 - Meningkatkan kondusivitas dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Pilar lingkungan:
 - Pengembangan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.
 - Meningkatkan keberlanjutan konservasi lingkungan hidup.
- 4) Pilar tata kelola: mengembangkan tata kelola yang adaptif dan inovatif.²⁸

Isu strategis yang dikulik oleh pemerintah Katingan berdasarkan kondisi lokal meliputi:

1. Optimalisasi potensi ekonomi dan investasi hijau.

²⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan. Ibid.

2. Kualitas SDM dan bonus demografi. Isu ini memunculkan kebutuhan untuk mengoptimalkan bonus demografi melalui pengelolaan sumber daya manusia di kalangan usia dini, anak dan remaja.
3. Perlindungan sosial dan penguatan budaya lokal.
4. Ketimpangan wilayah dan pemerataan infrastruktur.
5. Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
6. Tata kelola pemerintahan adaptif dan inovatif. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat memunculkan pelayanan publik yang semakin kompleks. Pelayanan publik diharapkan untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kolaborasi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan menjadi sebuah keniscayaan.²⁹

Dari keenam isu strategis di atas, maka isu nomor 2 dan 6 sangat relevan dengan pembangunan keluarga.

Tabel 4.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan, 2018-2023

Provinsi/Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Tengah	77,03	83,20	82,41	82,08	81,98	79,99
Katingan	73,32	66,57	66,36	67,66	66,80	68,19

Sumber: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/40/896/2/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>

Data dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa IDG di Katingan menurun di antara tahun 2018 dan 2019. Sejak itu IDG di Katingan relatif konstan. Sejak tahun 2018 sampai 2023, IDG di Katingan menunjukkan angka yang lebih rendah dari IDG di provinsi Kalimantan Tengah.

↑
9 17 12

²⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan. Ibid.

Tabel 4.2 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan, 2018-2023

Provinsi/Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Tengah	24,44	35,56	33,33	33,33	33,33	28,89
Katingan	24,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Sumber: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/40/897/2/persentase-keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>

Tabel 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan, 2018-2023

Provinsi/Kabupaten	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kalimantan Tengah	84,70	85,17	84,85	51,12	47,68	48,13
Katingan	84,11	86,33	85,74	42,25	43,11	41,32

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>

Tabel 4.4 Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan, 2018-2023

Provinsi/Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Tengah	44,24	45,35	46,12	47,36	43,80	50,86
Katingan	42,15	38,61	38,55	47,81	41,15	50,40

Sumber: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/40/898/2/persentase-perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

Tenaga profesional dalam Tabel 4.4 merujuk pada manajer, profesional, administrator atau teknisi. IDG terdiri dari partisipasi perempuan dalam parlemen, angkatan kerja, dan dalam ranah pekerjaan profesional. Data menunjukkan bahwa persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen dan partisipasi angkatan kerja perempuan di Katingan relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan statistik di tingkat provinsi. Sementara itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara persentase perempuan sebagai tenaga profesional di provinsi Kalimantan Tengah dan di Katingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan IDG yang kurang signifikan di Katingan adalah terbatasnya representasi perempuan di parlemen dan kurang tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Untuk meningkatkan IDG di Kabupaten Katingan, upaya untuk memperdalam pemahaman tentang

9 12

pengarusutamaan gender perlu ditingkatkan. Kesadaran tentang pengarusutamaan gender sangat penting bagi partai politik, sektor publik dan swasta untuk memperluas struktur kesempatan bagi perempuan. Payung hukum yang sudah lama dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah akan kurang bermakna bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender tanpa kesadaran kognitif dan etis tentang perlunya membuka kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan di sektor politik, sosial dan ekonomi.

Ada beberapa kendala bagi upaya untuk mewujudkan struktur kesempatan yang lebih inklusif. Pertama, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kabupaten Katingan masih belum optimal. Kedua, terbatasnya anggaran program untuk mendukung pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran responsif gender.³⁰ Tambahan pula, kapasitas aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan masih belum optimal. Kondisi yang belum ideal ini sangat relevan untuk disandingkan dengan isu strategis yang ke-enam, yaitu tata kelola yang strategis dan adaptif yang membuka ruang partisipasi bagi berbagai pemangku kebijakan, termasuk di dalamnya masyarakat sipil. Hal ini merujuk pada pergeseran paradigma dari *government* menjadi *governance*. *Government* merupakan sektor publik yang biasa disebut sebagai pemerintah. Tugas pemerintah meliputi merumuskan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, serta menyelenggarakan pelayanan publik. Konsep pemerintah ini mengalami pergeseran di tahun 1990-an menjadi *governance*. Berdasarkan konsep *governance*, pemerintah bukan merupakan satu-satunya pihak yang memonopoli pemerintahan karena pemerintah harus berbagi peran dengan sektor swasta maupun dengan masyarakat. Perubahan ini terjadi sejalan dengan pergeseran hubungan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat ke arah egalitarianisme dan demokrasi.³¹ Pelibatan sektor swasta dan masyarakat, terutama masyarakat di akar rumput, akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi lokal. Selain itu, partisipasi sektor swasta dan masyarakat lokal mempunyai potensi untuk menutup kesenjangan pelayanan (*service gap*) yang ada karena kemampuan finansial dan teknis pemerintah daerah yang belum optimal.

Isu strategis tentang SDM di Katingan berkaitan erat dengan cakupan keluarga dalam kegiatan Tri Bina, cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) dan berbagai aktivitas yang merupakan indikator iBangga. Keberadaan kegiatan Tri Bina dan PIK ini perlu dilengkapi dengan data tentang persebaran kegiatan ini. Secara geografis, Kabupaten Katingan didominasi oleh hutan dan kebun. Sebagai akibatnya, distribusi sarana dan prasarana, termasuk pendidikan dan kesehatan, menjadi terkendala. Berbagai sarana dan prasarana

³⁰ DP3AP2KB Kabupaten Katingan. Renstra 2024-2026.

³¹ Haris, S. 1019. *Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintah*. *Sosfilkom*, Volume XIII No 01, Jan – Juni, 2019 hal 33-47.

terkumpul di pusat kecamatan dan kabupaten³². Pemerintah Kabupaten Katingan perlu meyakinkan agar akses ke kegiatan Tri Bina, PIK, dan aktivitas yang berkaitan dengan iBangga relatif merata. Oleh sebab itu data tentang persebaran kegiatan-kegiatan ini sangat penting untuk mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di kabupaten Katingan.

4.2.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Terdapat lima isu strategis berkaitan dengan mobilitas penduduk di Kabupaten Katingan.

- a. Tren migrasi penduduk desa ke kota perlu diantisipasi dengan mengeliminasi dampak negatif yang ditimbulkan, dan mengeskalasi dampak positif, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Pengelolaan migrasi dari desa ke kota yang berkelanjutan untuk menghindari over-urbanisasi dan memastikan pembangunan pedesaan yang inklusif. Ini mencakup pengembangan ekonomi di pedesaan untuk mengurangi tekanan migrasi ke kota. Kabupaten Katingan memiliki wilayah yang luas dengan sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Sumber daya alam yang melimpah serta potensi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang besar seharusnya menjadi modal untuk pembangunan ekonomi yang inklusif. Namun, seperti banyak daerah lain di Indonesia, Katingan menghadapi tantangan dalam hal distribusi penduduk dan ketimpangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan.

Migrasi desa-kota di Katingan dipicu oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan cukup di pedesaan. Sektor pertanian yang mendominasi ekonomi pedesaan sering kali tidak memberikan pendapatan yang stabil dan memadai. Faktor lain adalah keterbatasan akses terhadap layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar di pedesaan. Hal ini mendorong penduduk desa untuk pindah ke kota yang menawarkan layanan publik yang lebih baik. Selain itu, kota menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas, termasuk pekerjaan di sektor formal dan informal, yang menjadi daya tarik bagi penduduk desa. Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga disebabkan oleh faktor sosial dan budaya berupa pengaruh dari keluarga atau komunitas yang sudah lebih dulu bermigrasi ke kota.

Migrasi desa-kota memiliki dua sisi; positif dan negatif. Dampak positif berupa peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi

³² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan. Ibid.

penduduk desa untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, di kota. Penduduk yang bermigrasi ke kota sering kali memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang dapat meningkatkan kapasitas mereka dan berkontribusi lebih besar pada pembangunan ekonomi. Juga, migran yang sukses sering mengirimkan uang kembali ke keluarga mereka di desa, yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi hidup dan investasi di daerah asal.

Namun, migrasi desa-kota juga memiliki dampak negatif. Urbanisasi berlebihan tanpa perencanaan yang baik dapat mengakibatkan pertumbuhan permukiman kumuh, peningkatan kemiskinan perkotaan, dan tekanan pada infrastruktur kota. Juga, urbanisasi dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan, jika tidak disertai upaya untuk memperbaiki kondisi di pedesaan. Dampak negatif lainnya adalah degradasi sosial dan keluarga sebagai akibat migrasi kepala keluarga atau anggota keluarga.

Urbanisasi yang cepat dapat menyebabkan pertumbuhan permukiman kumuh di daerah perkotaan. Ini terjadi ketika pembangunan perumahan tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, sehingga penduduk yang berpenghasilan rendah terpaksa tinggal di kawasan kumuh dengan kondisi sanitasi yang buruk dan akses terbatas terhadap layanan dasar. Terhadap hal ini pemerintah perlu mengembangkan program perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan untuk penduduk berpenghasilan rendah. Ini termasuk pembangunan perumahan rakyat, renovasi kawasan kumuh, dan pemberian bantuan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk pencemaran udara dan air, penurunan kualitas tanah, dan hilangnya ruang hijau. Ini berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Implementasi kebijakan dan praktik pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dari urbanisasi. Penghijauan kota, pengelolaan limbah yang efektif, dan penggunaan energi terbarukan harus menjadi prioritas.

Urbanisasi dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Penduduk yang bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan akses ke layanan dasar. Program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial harus diimplementasikan untuk mendukung integrasi penduduk migran. Pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha kecil, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan harus ditingkatkan.

- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi dan pelayanan publik karena berdampak langsung terhadap mobilitas penduduk, keterisolasian wilayah, dan ketimpangan desa dan kota.

Infrastruktur transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial di suatu wilayah. Kabupaten Katingan memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan infrastruktur transportasi mengingat kondisi geografis yang beragam, termasuk hutan, sungai, dan lahan gambut, memerlukan strategi khusus untuk mengembangkan infrastruktur transportasi yang efektif dan berkelanjutan.

Infrastruktur transportasi yang memadai memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai fasilitas dan layanan, termasuk pendidikan, kesehatan, pasar, dan tempat kerja. Ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Infrastruktur transportasi yang baik mendukung perdagangan dan distribusi barang serta jasa, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akses yang lebih baik ke pasar memungkinkan petani dan produsen lokal untuk menjual produk mereka dengan lebih efisien. Transportasi yang efisien menghubungkan berbagai wilayah dalam kabupaten, meningkatkan integrasi dan kerja sama antarwilayah. Ini penting untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan antardaerah. Akses transportasi yang baik juga mendukung sektor pariwisata dengan memudahkan wisatawan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Katingan. Potensi pariwisata yang besar dapat dimanfaatkan dengan adanya infrastruktur transportasi yang memadai.

Namun demikian, Kabupaten Katingan menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan infrastruktur transportasi, berupa kondisi geografis yang sulit, keterbatasan anggaran, dan kerusakan akibat bencana alam. Kabupaten Katingan memiliki kondisi geografis yang beragam, termasuk hutan lebat, lahan gambut, dan sungai-sungai besar. Hal ini menyulitkan pembangunan jalan dan jembatan, serta menambah biaya konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur transportasi memerlukan investasi yang besar, sementara ketersediaan anggaran terbatas, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, Kabupaten Katingan rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang dapat merusak infrastruktur transportasi. Ini menambah beban biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. Akibatnya, beberapa wilayah di Kabupaten Katingan masih terisolasi karena minimnya infrastruktur transportasi yang memadai dan menyulitkan mobilitas penduduk dan akses terhadap layanan dasar.

Handwritten initials: a, b, c

- c. Keterbatasan peluang kerja di daerah menyebabkan penduduk mencari pekerjaan di luar daerah atau bahkan ke luar negeri, yang berpotensi menyebabkan *brain-drain*.

Migrasi tenaga kerja merupakan fenomena penting dalam dinamika kependudukan yang berimplikasi besar pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya suatu daerah. Kabupaten Katingan mengalami migrasi tenaga kerja, baik dari dalam maupun ke luar daerah. Pengelolaan yang baik terhadap migrasi tenaga kerja sangat diperlukan untuk memastikan bahwa migrasi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.

Migrasi tenaga kerja menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan dampak positifnya bagi daerah asal dan tujuan. Migrasi tenaga kerja ke luar daerah dapat berakibat *brain drain* (eksodus tenaga terampil), yaitu tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi berpindah ke daerah atau negara lain sehingga berakibat kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Katingan. Hal ini dapat menghambat pembangunan lokal dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mempertahankan tenaga kerja terampil dengan menyediakan peluang kerja yang menarik, peningkatan fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta insentif untuk tetap tinggal dan bekerja di daerah.

- d. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan menghambat mobilitas sosial dan ekonomi penduduk. Pendidikan dan keterampilan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Kabupaten Katingan, upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun pendidikan dan keterampilan sangat penting, Kabupaten Katingan menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta keterampilan. Pertama, problem keterbatasan Akses ke Pendidikan. Banyak daerah di Kabupaten Katingan yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga akses ke fasilitas pendidikan sangat terbatas. Ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi sekolah dan tingginya angka putus sekolah. Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan meningkatkan akses transportasi untuk siswa. Selain itu, pengembangan program pendidikan jarak jauh dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan geografis. Kedua, kualitas pendidikan di Kabupaten Katingan masih rendah dibandingkan dengan standar nasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, rendahnya kualitas guru, dan kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah perlu

meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, serta mengembangkan kurikulum yang relevan dan berorientasi pada keterampilan. Ketiga, tingkat partisipasi di pendidikan tinggi di Kabupaten Katingan masih rendah. Banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena alasan ekonomi atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi. Pemerintah dapat memberikan beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan tinggi perlu ditingkatkan.

- e. Pengelolaan dampak lingkungan dari mobilitas penduduk, terutama di daerah perkotaan yang padat, melalui kebijakan dan program yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan dampak lingkungan adalah aspek krusial dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan ekosistem sensitif seperti Kabupaten Katingan. Kabupaten ini memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk hutan tropis, lahan gambut, dan berbagai sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Namun, pembangunan yang tidak terkendali dapat mengancam keseimbangan ekologis, mengurangi kualitas hidup, dan menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Oleh karena itu, pengelolaan dampak lingkungan harus menjadi prioritas dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Katingan.

Pengelolaan dampak lingkungan memiliki beberapa tujuan penting yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kabupaten Katingan memiliki ekosistem yang beragam dan keanekaragaman hayati yang kaya. Perlindungan lingkungan memastikan bahwa flora dan fauna, serta ekosistem yang mendukung kehidupan mereka, tetap terjaga. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Pengelolaan limbah, kualitas udara, dan air bersih berperan penting dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Sumber daya alam yang dikelola dengan baik dapat mendukung keberlanjutan ekonomi. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata sangat bergantung pada lingkungan yang sehat. Lingkungan yang terjaga dengan baik dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan.

Namun demikian, Kabupaten Katingan menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dampak lingkungan yang timbul dari pembangunan dan aktivitas manusia. Penebangan hutan yang tidak terkendali untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan yang signifikan. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan penegakan hukum

f
g
h

terhadap aktivitas penebangan liar. Pengembangan kebijakan yang mendorong praktik pertanian dan perkebunan berkelanjutan juga penting untuk mengurangi tekanan terhadap hutan. Kebakaran hutan dan lahan gambut sering terjadi, terutama pada musim kemarau, yang menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi udara, dan masalah kesehatan masyarakat. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan program pencegahan kebakaran hutan perlu ditingkatkan. Ini mencakup patroli rutin, pembuatan kanal-kanal untuk menjaga kelembaban lahan gambut, dan kampanye kesadaran tentang bahaya kebakaran.

4.2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Dalam hal data dan sistem informasi kependudukan serta administrasi data kependudukan teridentifikasi beberapa isu strategis, di antaranya.

1. Kepemilikan kartu identitas anak yang masih perlu terus ditingkatkan. Saat ini, meski capaiannya sudah di atas 40 persen, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya seperti kepemilikan KTP elektronik, akta kelahiran ataupun kartu keluarga.
2. Partisipasi masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan, khususnya kematian, perkawinan, dan perpisahan perlu terus didorong.
3. Akses layanan untuk pengadministrasian data kependudukan perlu diperluas dan dipermudah. Hak ini berarti bahwa semua penduduk di mana pun tempat tinggalnya, baik di daerah pusat perkotaan maupun di daerah perdesaan dan terpencil harus memiliki hak yang sama, termasuk akses ke layanan pengadministrasian data kependudukan.
4. Saat ini, teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat dan sistem informasi kependudukan harus dapat mengadopsi secara dinamis dan berubahannya. Salah satu isu utama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi adalah keamanan. Sistem informasi data kependudukan juga harus mampu menjamin kepercayaan masyarakat yang memberikan data-datanya melalui jaminan perlindungan data.

93

Bab 5

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan

Bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan lima pilar kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada lima pilar pembangunan kependudukan.

5.1 Kuantitas Penduduk

Kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Katingan dalam pembangunan kependudukan, sebagaimana ditunjukkan oleh angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang semakin menurun perlu terus dikuatkan. Perhatian dan fokus pada penurunan angka kelahiran untuk mencapai *replacement level* yang ditandai oleh angka TFR sama dengan 2,1 harus diikuti oleh membaiknya komponen lain, seperti tingkat pemakaian kontrasepsi, pemenuhan kebutuhan kontrasepsi, dan akses pasangan usia subur terhadap layanan obat serta alat kontrasepsi. Hingga saat ini, kontrasepsi merupakan salah satu faktor penting yang secara langsung berpengaruh pada tingkat kelahiran. Kontrasepsi dapat mencegah terjadinya konsepsi, sehingga sangat disarankan penggunaannya untuk perencanaan keluarga. Melalui pemakaian kontrasepsi, pasangan dapat menentukan waktu untuk hamil dan melahirkan. Pengaturan usia pada saat hamil dan melahirkan serta jarak antarkehamilan tidak hanya memiliki tujuan kuantitatif (mengatur dan menjarangkan kehamilan), tetapi juga bermanfaat pada status kesehatan ibu dan bayi. Kehamilan dan kelahiran yang terjadi pada usia dewasa dengan jarak kehamilan terkontrol, yakni tidak terlalu sering dapat menekan risiko terjadinya persoalan kehamilan. Demikian pula dengan kehamilan dan kelahiran yang terjadi di usia yang tidak terlalu tua akan mengurangi risiko gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, pendarahan, kematian ibu, dan kematian bayi.

Faktor risiko yang mungkin ditimbulkan dari kehamilan dan kelahiran di usia yang terlalu muda maupun terlalu tua serta intensitasnya terlalu sering dapat memengaruhi pertumbuhan penduduk. Hal itu terjadi apabila kehamilan pada kondisi tersebut diiringi oleh kematian ibu dan kematian bayi. Oleh karenanya, pemakaian kontrasepsi sangat penting untuk menekan angka kelahiran dan kematian yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan penduduk di Katingan. Dalam jangka panjang, pemakaian kontrasepsi akan menciptakan struktur penduduk yang semakin stabil di masa depan. Bekerjanya kontrasepsi dengan

memengaruhi kehamilan ataupun kelahiran manakala diikuti oleh situasi kesehatan yang semakin baik, maka penduduk yang terlahir akan mampu bertahan hidup lebih lama. Mereka akan menempati dan kelompok umur tertentu dan menggantikan kelompok umur yang berganti pada kelompok umur berikutnya. Sebagai contoh, dengan kondisi kesehatan yang semakin baik kelompok umur 0-4 tahun akan terus bertahan hidup dan mengisi serta menambah jumlah kelompok 5-9 tahun. Begitu seterusnya proses ini akan terjadi, sehingga membentuk struktur penduduk yang stabil. Identifikasinya dapat terlihat dari piramida penduduk yang menyerupai sarang tawon, yakni menyempit di bagian bawah dan melebar di bagian tengah sebagai akibat dari menurunnya angka kelahiran dan kematian.

Struktur penduduk yang menggelembung di bagian tengah menandakan tingginya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Kondisi ini menjadi capaian pembangunan kependudukan jangka panjang yang diidam-idamkan karena berpotensi meningkatkan kesejahteraan. Hal itu dapat terjadi apabila penduduk usia produktif berpendidikan, sehat, berketerampilan, berdaya saing, dan bahkan mampu menciptakan peluang atau kesempatan kerja. Oleh karenanya keberadaan penduduk usia produktif harus dioptimalkan agar dapat mendorong investasi di masa depan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Optimalisasi dapat dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan aktor, termasuk sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, teknologi dan informasi, industri dan pariwisata, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM serta pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk. Terkait sektor yang terakhir, yakni pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk kerja sama dan kolaborasinya dibutuhkan untuk menghindari terjadinya pernikahan di usia dini. Tanpa kolaborasi yang baik, potensi penduduk usia produktif tidak dapat dioptimalkan dengan baik.

Menilik pada capaian dan potensi risiko yang ditimbulkan dari aspek penduduk tersebut, maka kebijakan dalam hal kuantitas penduduk diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan kuantitas melalui pencapaian penduduk tumbuh seimbang dan optimalisasi bonus demografi.

- a. Pencapaian penduduk tumbuh seimbang dengan angka kelahiran atau TFR 2,1 melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara berkelanjutan. Pencapaian penduduk tumbuh seimbang dapat dilakukan dengan cara (a) mendewasakan usia perkawinan pertama, (b) mengatur jarak antarkehamilan, (c) merencanakan jumlah anak ideal, (d) meningkatkan akses layanan kontrasepsi bagi semua pasangan usia subur di seluruh wilayah kecamatan (e) meningkatkan layanan kontrasepsi, khususnya kontrasepsi modern dan jangka panjang, dan (f) menurunkan persentase pasangan usia subur yang kebutuhan kontrasepsinya tidak terpenuhi (*unmet need*).

99 +

- b. Menurunkan angka kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang, terutama kematian yang terjadi pada (a) masa ibu hamil, melahirkan dan nifas, (b) bayi, balita, dan anak. Upaya menurunkan angka kelahiran bayi, balita, dan anak dapat difokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko kematian, seperti infeksi virus dan bakteri. Sementara itu, upaya menurunkan angka kematian secara umum dapat dilakukan dengan memberantas penyakit menular dan penyebarannya melalui imunisasi. Adapun kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular dan kecelakaan dapat diupayakan melalui penyadaran dan penerapan pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Penduduk tumbuh seimbang juga dapat dicapai dengan mempertahankan bonus demografi. Kondisi bonus demografi yang ditandai oleh rasio antara penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia anak (<14 tahun) dan penduduk usia lanjut (65+ tahun) dapat dioptimalkan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang. Salah satu caranya adalah dengan menjaga agar migrasi terus positif.
- d. Mempertahankan dan mengoptimalkan pencapaian bonus demografi. Cita-cita untuk Saat ini hingga beberapa tahun ke depan, Kabupaten Katingan akan berada di tahap bonus demografi. Secara ekonomi, bonus demografi dapat mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan penduduk usia produktif di pasar kerja. Apabila periode bonus demografi dapat dipertahankan selama mungkin, maka Katingan dapat mengoptimalkannya untuk lebih meningkatkan kualitas kesejahteraan penduduknya.

Strategi untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang dan optimalisasi bonus demografi antara lain.

- a. Memperkuat komitmen politik pemerintah Kabupaten Katingan untuk menjalankan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara berkelanjutan.
- b. Memperkuat organisasi yang membawahi fungsi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Penguatan organisasi diarahkan untuk fungsi koordinator atau *leader sector* dalam pengelolaan kuantitas penduduk.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan dalam konteks kependudukan, pengelolaan kuantitas, perencanaan keluarga, dan kesehatan.
- d. Mendorong kerja sama dan kemitraan yang melibatkan lintas sektor untuk mendukung program pengelolaan penduduk, termasuk perguruan tinggi, swasta, komunitas, masyarakat, media massa dan komunikasi.

- e. Menjadikan keluarga dan siklus kehidupan sebagai pendekatan utama dalam menjalankan kebijakan kependudukan.
- f. Memfokuskan program keluarga berencana pada kelompok-kelompok rentan, seperti pasangan usia subur miskin, yang tinggal di daerah perdesaan ataupun pedalaman.
- g. Menjadikan bonus demografi sebagai agenda kebijakan program yang saling terkait dan terintegrasi.
- h. Membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta utamanya untuk mengembangkan bisnis, investasi masa depan, peningkatan keterampilan, *up grading* pengetahuan dan keterampilan kelompok umur produktif.
- i. Membuka dan memperluas akses pasangan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi.
- j. Memberikan perhatian pada pemberian layanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi kepada kelompok tertentu (memiliki risiko kehamilan), yaitu kelompok *unmet need*, remaja dan calon pengantin, dan pasangan usia muda.

5.2 Kualitas Penduduk

Pembangunan kependudukan pada sektor pendidikan diarahkan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing. Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut.

- i. Peningkatan akses dan partisipasi pendidikan. Seluruh penduduk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan tanpa diskriminasi. Rata-rata lama sekolah bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas terus meningkat hingga mencapai 12 tahun atau setara dengan kelas 3 SMA/SMK. Harapan lama sekolah yang menunjukkan terbukanya kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terus meningkat pada tahun 2045, hingga rata-rata mencapai jenjang Diploma 3. Penduduk dengan tingkat pendidikan kurang dari sekolah dasar semakin menurun, seiring dengan peningkatan penduduk yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi. Meningkatnya akses kelompok usia produktif mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan mereka masuk dalam pasar kerja.
- ii. Pemerataan layanan pendidikan (*equity of access to education*). Seluruh penduduk usia sekolah mendapatkan akses pendidikan sesuai dengan jenjangnya tanpa kendala geografis ataupun biaya. Satuan pendidikan

terbangun hingga tingkat kecamatan dan desa secara memadai, dengan distribusi tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana secara merata, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pemerataan layanan pendidikan yang menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin melalui pemberian bantuan pendidikan, utamanya bagi siswa didik yang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat rawan melanjutkan pendidikan (RMP). Peningkatan penyelenggaraan pendidikan nonformal, baik secara kuantitas maupun kualitas.

- iii. Peningkatan kualitas guru dan tenaga pengajar. Kompetensi profesional dan pedagogi guru merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan secara berkala. Fasilitasi forum ilmiah bagi para guru dan tenaga pengajar. Dalam hal ini, termasuk juga peningkatan kualitas pengajar bagi lembaga pendidikan nonformal.
- iv. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Program bantuan pendidikan yang melibatkan kelompok swasta dan organisasi kemasyarakatan. Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat dan sektor swasta sehingga semakin memperluas kesempatan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, tidak hanya pendidikan formal tapi juga nonformal.

Pada aspek kesehatan, pembangunan kependudukan diarahkan untuk peningkatan layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh penduduk tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu penduduk yang memiliki harapan hidup tinggi, tidak ada yang mengalami kekurangan gizi, serta tingkat kematian dan kesakitan rendah. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan dan strategi berikut.

- i. Peningkatan usia harapan hidup. Usia harapan hidup penduduk Katingan terus meningkat, yaitu 72,71 tahun pada 2045. Peningkatan program kesehatan (termasuk peningkatan gizi), diikuti dengan peningkatan program kesehatan lingkungan dan program sosial, termasuk program pengentasan kemiskinan. Selain oleh pemerintah, upaya ini juga melibatkan peran aktif keluarga dan komunitas.
- ii. Penurunan angka kematian ibu dan anak. Penyelenggaraan layanan kesehatan maternal dan neonatal yang holistik dan komprehensif untuk merespons penyebab-penyebab kematian yang *avoidable*, sehingga dapat menghindari bayi lahir prematur atau BBLR, juga pendarahan atau eklamsia saat ibu melahirkan.
- iii. Penghilangan segala bentuk kekurangan gizi dan pengurangan morbiditas. Upaya menghilangkan kekurangan gizi, khususnya *stunting*

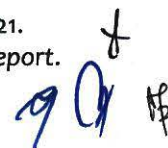
dilakukan secara holistik dan komprehensif serta mengikuti siklus kehidupan dengan identifikasi penyebab secara cermat, dan menysasar kepada kelompok miskin dan rentan miskin. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit tidak menular akibat perilaku dan gaya hidup. Pencegahan penyakit degeneratif bagi penduduk usia muda. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut secara holistik dengan melibatkan keluarga dan komunitas.

- iv. Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Seluruh penduduk, tanpa kecuali, memiliki jaminan pelayanan kesehatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan seluruh penduduk Katingan mendapatkan manfaat secara komprehensif, mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Terjadinya transisi epidemiologi di masa depan juga dapat diantisipasi dengan adanya jaminan kesehatan nasional yang lebih baik.

Pada aspek ekonomi, pembangunan kependudukan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat atau kehidupan yang layak dan berkeadilan. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan dan strategi berikut.

- i. Peningkatan dan pemerataan pendapatan. Peningkatan pengeluaran perkapita terus didorong hingga mencapai Rp16.826 ribu/tahun dan tidak lagi dijumpai ketimpangan pendapatan antarpenduduk Katingan. Peningkatan akses masyarakat terhadap perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Pengembangan program bantuan kepada masyarakat yang bersifat pemberdayaan dan berkelanjutan. Pengembangan UMK (usaha mikro kecil) di antaranya melalui pemberian subsidi bunga bank bagi UMK, fasilitasi permodalan dan pemasaran, serta peningkatan keterampilan usaha.
- ii. Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan berusaha yang lebih merata. Hampir seluruh penduduk usia kerja dapat terserap pada pasar kerja. Peningkatan TPAK sekaligus mengurangi TPT kelompok perempuan di antaranya melalui (a) pengurangan beban kerja perawatan yang selama ini banyak dilakukan oleh perempuan,³³ (b) pengembangan ekonomi digital yang inklusif sehingga lebih memberikan peluang bagi perempuan untuk bekerja di sektor informal. Inovasi penciptaan lapangan kerja mandiri untuk merespons semakin meningkatnya potensi penduduk angkatan kerja (tenaga kerja terdidik). Dalam hal ini perlu dukungan anggaran untuk mengoptimalkan bonus demografi. Penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai bagi dunia usaha.

³³ Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM). 2021. "Women's Role in Family Surviveal amidst the COVID-19 Pandemic Research". *Final Report*. Yogyakarta: PSKK UGM, tidak diterbitkan.



- iii. Perluasan cakupan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang ketenagakerjaan. Melalui SJSN ini akan memberikan jaminan atau perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan minimal. Sistem ini juga memberikan kepastian keberlangsungan penerimaan penghasilan keluarga apabila sebagian atau seluruh penghasilan hilang.

5.3 Pembangunan Keluarga

Idealnya kebijakan dibuat berdasarkan bukti. Sekalipun demikian, pada kenyataannya banyak kebijakan yang dibuat berdasarkan “intuisi, pemahaman umum, pengalaman, ideologi, opini publik...”³⁴ Perencanaan kebijakan dan program tidak bisa dilakukan tanpa bukti yang lengkap. Sebenarnya apakah bukti itu? Kantor Kabinet Pemerintah Inggris yang dikutip of Marston and Watts mendefinisikan bukti secara luas. Menurut definisi ini, bukti bisa berupa “pengetahuan pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, statistik yang ada, konsultasi dengan pemangku kepentingan, evaluasi-evaluasi kebijakan sebelumnya, internet, hasil-hasil dari konsultasi, hitungan opsi-opsi kebijakan, dan keluaran dari pemodelan ekonomi dan statistik”.³⁵

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi di Katingan dalam kaitannya dengan bukti. Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengumpulkan data statistik untuk mendukung kegiatan mereka. Sering kali OPD tidak saling berbagi data tentang hal yang sama. Sebagai konsekuensinya, terkadang muncul lebih dari satu data tentang hal yang sama. Hal ini bisa memunculkan kebingungan bagi pembuat kebijakan. Dalam upaya mendukung pembangunan keluarga di Katingan, diperlukan kolaborasi lintas OPD dalam pengelolaan data. Dengan demikian, tidak akan muncul pertanyaan tentang data siapa yang paling mencerminkan kondisi lokal. Tambahan pula, masih ada yang belum dipilah berdasarkan gender. Padahal data pilah gender ini sangat penting bagi upaya pengarusutamaan gender.

Bukti yang berupa data statistik bisa dipakai untuk mengamati kondisi saat ini, tren dan proyeksi pembangunan keluarga. Akan tetapi, data statistik tidak bisa menjelaskan, misalnya, mengapa tren partisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun ke tahun cenderung stagnan. Pemahaman tentang kecenderungan ini bisa dipahami lewat bukti berupa penelitian kualitatif atau konsultasi dengan ahli tentang peran berbasis gender yang diharapkan dari perempuan. Barangkali secara kultural, perempuan diharapkan untuk menjalankan peran

³⁴ Bachtiar, PP. Tanpa Tahun. *Menghasilkan bukti sebagai informasi bagi proses penyusunan kebijakan di Indonesia: tantangan pada sisi penawaran (Producing Evidence to inform policy proces in Indonesia: the challenges on the supply side)*. Smeru Institute.

³⁵ Martson, G dan Rob Watts. 2003. *Tampering with Evidence: A Critical Appraisal of Evidence-Based Policy Making. The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs*. 3 (3) Maret, 2003, halaman 143-163. ISSN 1443-8607.

sebagai ibu rumah tangga sehingga persentase perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja di Katingan belum terlalu tinggi. Perilaku gender juga berpengaruh terhadap representasi perempuan dalam dunia politik. Bagaimana pandangan kebanyakan orang tentang peran perempuan di ranah politik? Apakah perilaku gender yang ada mendukung kehadiran pemimpin perempuan? Jawaban atas pertanyaan ini dapat diperoleh dari kajian yang sistematis tentang pandangan masyarakat tentang peran ideal laki-laki dan perempuan. Pemahaman tentang pemikiran masyarakat tentang hal ini bisa juga dikulik dari pengetahuan pakar. Hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan adalah mencatat bukti yang diterima dari berbagai sumber dan mengunggahnya di internet sehingga bukti itu bisa diakses oleh pembuat kebijakan dan pemangku kebijakan lainnya.

Peningkatan kesejahteraan keluarga bisa dilakukan dengan kebijakan yang berbasis bukti. Cara lain untuk mengubah kondisi keluarga adalah memperluas wawasan berbagai pihak, termasuk keluarga, dengan memperkenalkan berbagai perangkat hukum yang disiapkan oleh pemerintah. Misalnya, upaya untuk mencegah pernikahan dini bisa dilakukan dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuan sosialisasi kebijakan adalah agar hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan terjamin³⁶ Salah satu tujuan sosialisasi adalah untuk menciptakan perubahan perilaku. Selama ini ada asumsi bahwa perubahan sikap dan keyakinan akan memunculkan perubahan perilaku. Pada kenyataannya hal itu tidak selalu terjadi. Banyak pemangku kepentingan dari sektor publik maupun masyarakat sipil yang melakukan upaya peningkatan kesadaran selama bertahun-tahun. Inisiatif ini menambah kesadaran tentang berbagai hal secara signifikan. Misalnya, dalam kaitannya dengan pembangunan keluarga, upaya peningkatan kesadaran telah membuat orang paham tentang perlunya pendidikan bagi anak perempuan. Pendidikan bagi anak perempuan akan mengurangi pernikahan dini dan menaikkan angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Akan tetapi, peningkatan kesadaran yang tinggi ini tidak diikuti dengan perilaku yang sesuai dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Angka putus sekolah di kalangan anak perempuan tetap tinggi, pernikahan dini tidak berkurang dan angka partisipasi angkatan kerja perempuan relatif stagnan. Oleh karena itu, meskipun kampanye tentang pendidikan anak perempuan dan peningkatan kesadaran sangat penting, namun hal tersebut tidak cukup untuk memastikan perubahan perilaku yang positif. Kesenjangan antara “tahu” (*knowing*) dan “melakukan sesuatu” (*doing*) itu bisa dijembatani dengan menciptakan hubungan emosional dengan perilaku yang ingin diubah. Hal ini bisa dilakukan

³⁶ Satispi, E, Andriyani, L, Gunanto, D, Andiani, D. 2021. The Collaboration in Socializing Policies of Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*. 11 (1). Januari–Juni. 2021. Halaman 180-196. p-ISSN: 2086-6364, e-ISSN: 2549-7499. Homepage: <http://ojs.unm.ac.id/iap>.

dengan mengidentifikasi nilai dan motivasi yang melatar belakangi perilaku tertentu.³⁷ Misalnya, mengapa orang tua membiarkan, atau mungkin bahkan mendorong, anak perempuan untuk putus sekolah? Barangkali mereka menginginkan agar anak perempuan mereka memberikan sumbangan ekonomi kepada keluarga pada saat ini. Motivasi ini bisa digeser dengan melihat sumbangan anak yang berpendidikan di masa yang akan datang. Pendidikan memang tidak selalu berbanding positif dengan jenis pekerjaan yang lebih baik, atau gaji yang lebih tinggi. Akan tetapi pendidikan akan membuat anak perempuan lebih matang secara emosional dan kognitif. Kedua hal ini penting bagi pembuatan keputusan yang rasional dan aman bagi mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesudah ada sosialisasi kebijakan, perlu diadakan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat luas. Idealnya peningkatan kesadaran ini dilakukan di tingkat akar rumput agar bisa menjangkau lebih banyak orang. Agar upaya untuk menjembatani celah antara *knowing* dan *doing* secara lebih efektif, maka peningkatan kesadaran akan lebih baik bila dilakukan oleh orang-orang yang paham tentang nilai dan motivasi perilaku tertentu, misalnya tokoh adat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat lokal. Dengan demikian mereka mampu aspek emosional dari perilaku yang ingin mereka ubah. Hal ini berkaitan dengan moda komunikasi yang harus diterapkan. Moda komunikasi satu arah, di mana nara sumber memberikan materi dan peserta inisiatif peningkatan kesadaran mendengarkan pemaparan nara sumber mungkin kurang efektif untuk membangkitkan kesadaran kritis peserta. Pemberi pelatihan perlu menggali moda komunikasi yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi peserta, misalnya dengan memanfaatkan budaya lokal, misalnya drama.

Secara ringkas, strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembangunan keluarga adalah:

1. Kolaborasi dalam pengumpulan data dan saling berbagi data (*data sharing*) antar-OPD yang mempunyai fokus yang sama. Dengan demikian OPD yang berkaitan mempunyai kesepakatan tentang data mana yang tepat dipakai untuk menjelaskan hal-hal tertentu. Idealnya, data tentang pembangunan keluarga dan tentang semua pilar GDPK harus dikeluarkan oleh satu pintu.
2. Semua kebijakan harus berbasis bukti untuk menghindari subjektivitas pembuat kebijakan.
3. Statistik tidak cukup untuk memahami mengapa seseorang atau sekelompok orang berperilaku tertentu. Pemahaman ini bisa diperoleh dari studi kualitatif, konsultasi dengan ahli atau dengan pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Katingan hendaknya melakukan

³⁷ <https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/2/experts-take-to-change-peoples-behaviour-connect-with-them-first>.



lebih banyak kajian atau konsultasi dengan masyarakat luas, pemimpin adat, pemimpin agama dan masyarakat sipil untuk memahami lebih dalam tentang berbagai masalah pembangunan keluarga.

4. Sosialisasi peraturan pemerintah merupakan langkah awal yang bagus untuk memperkenalkan kerangka hukum kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham tentang hak dan kewajiban mereka terkait hal-hal tertentu, misalnya pernikahan dini, kekerasan berbasis gender, dll.
5. Sosialisasi saja tidak cukup untuk mengubah perilaku. Pemerintah daerah perlu melakukan inisiatif perubahan kesadaran yang mampu menjembatani *knowing* dan *doing*.
6. Karena inisiatif perubahan kesadaran semacam ini membutuhkan pemahaman tentang nilai dan motivasi yang mendasari perilaku tertentu, pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat sipil dalam upaya perubahan kesadaran.
7. Perubahan yang mendukung pilar pembangunan keluarga, misalnya IDG, IKG, iBangga membutuhkan pemahaman tentang peran gender yang ideal dan yang riil. Sementara itu program Pengarusutamaan Gender di Katingan terkendala oleh biaya dan personil. Oleh karena itu program ini harus dilakukan secara lintas OPD dan lintas sektor (publik dan masyarakat sipil).

5.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pokok-pokok kebijakan:

1. Mengelola migrasi penduduk desa ke kota dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mengelola migrasi ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif yang mencakup pemberdayaan ekonomi pedesaan, peningkatan akses layanan publik, peningkatan keterampilan dan pelatihan, pengembangan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan, serta kerja sama dan koordinasi antarlembaga. Dengan strategi yang tepat, migrasi desa-kota dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi Kabupaten Katingan.
2. Mengembangkan infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan, serta memperluas moda transportasi sungai. Transportasi Sungai dapat menjadi alternatif yang efektif mengingat banyaknya sungai di Kabupaten Katingan. Mengembangkan infrastruktur transportasi di Kabupaten



Katingan merupakan elemen kunci untuk meningkatkan mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan membuka aksesibilitas yang lebih luas, memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan integrasi wilayah, dan mendukung sektor pariwisata, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih inklusif dan merata. Fokus pada pembangunan jalan baru dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada, terutama jalan-jalan penghubung antardesa dan kecamatan. Penggunaan material yang tahan lama dan teknik konstruksi yang sesuai dengan kondisi geografis setempat perlu diterapkan.

3. Mengelola migrasi tenaga kerja melalui penguatan pelatihan dan Pendidikan Keterampilan.
4. Mengelola Dampak Lingkungan dengan mengelola Hutan dan Lahan Gambut yang Berkelanjutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Strategi

1. Untuk mengelola migrasi dari desa ke kota dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan potensi ekonomi pedesaan melalui program pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan untuk mengurangi arus migrasi ke kota. Desa dapat mengembangkan potensi pariwisata dan industri kreatif untuk menciptakan lapangan kerja baru.
 - b. Mendorong investasi di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif di pedesaan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - c. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui penerapan teknologi pertanian.
 - d. Memperluas akses penduduk pedesaan ke layanan keuangan, termasuk kredit usaha kecil dan mikro, untuk mendukung kegiatan ekonomi.
 - e. Meningkatkan akses layanan publik di pedesaan dengan membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan dan pendidikan di pedesaan. Penyediaan tenaga kesehatan dan guru yang berkualitas serta peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan sangat penting.



2. Untuk membangun infrastruktur transportasi dan pelayanan dapat dilakukan dengan strategi kemitraan sektor swasta melalui skema *public-private partnership* (PPP). Sektor swasta dapat berkontribusi dalam pembiayaan, teknologi, dan manajemen proyek. Serta, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan dan keberterimaan proyek.
3. Mengelola tenaga kerja dengan strategi berikut:
 - a. Mengembangkan program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, nasional, dan internasional melalui kerja sama dengan sektor industri dan perusahaan untuk menyediakan program magang dan pelatihan yang berbasis kebutuhan industri.
 - b. Mendirikan pusat informasi migrasi yang menyediakan layanan informasi lengkap tentang peluang kerja, persyaratan kerja, hak-hak pekerja, dan prosedur migrasi.
 - c. Menyediakan layanan bantuan hukum dan sosial bagi tenaga kerja migran, baik yang sedang berada di luar negeri maupun yang sudah kembali ke daerah asal. Mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi yang melindungi hak-hak tenaga kerja migran, termasuk upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan sosial.
 - d. Melakukan edukasi keuangan bagi keluarga tenaga kerja migran tentang cara mengelola remitansi secara bijak untuk kebutuhan jangka panjang, seperti investasi, pendidikan, dan kesehatan. Mengembangkan program yang mendorong penggunaan remitansi untuk investasi produktif di bidang usaha kecil dan menengah (UKM), pertanian, dan usaha lainnya yang dapat meningkatkan ekonomi lokal.
4. Mengelola dampak lingkungan dilakukan dengan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Ini mencakup pembangunan infrastruktur tahan bencana, konservasi sumber daya alam, dan diversifikasi mata pencaharian.

5.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Secara umum, kebijakan tentang data dan sistem informasi kependudukan diarahkan pada pengelolaan administrasi data kependudukan secara berkualitas. Pengelolaan ini mengindikasikan pada pentingnya pencatatan

9 13 14

peristiwa kependudukan, yang mencakup kelahiran, kematian, perpindahan. Peristiwa kependudukan yang tercatat dengan baik akan sangat berguna dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan (kebijakan tertentu). Oleh karenanya, apabila administrasi kependudukan terkelola dengan baik, maka kebijakan diarahkan pada pengembangan sistem informasi data kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System (DSS)*. Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, dan sistem kelembagaan yang kuat.

Pemutakhiran *database* kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara regular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP. Terbangunnya *database* kependudukan berbasis NIK akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. *Database* kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. *Database* kependudukan juga dapat digunakan untuk kepentingan pemilu dan pemilukada (pemilu kepala daerah), baik itu melalui data kependudukan yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi dengan biometrik dalam program e-KTP.

Strategi penting yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem informasi kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System (DSS)* adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat kualitas layanan prima adminduk dan pencatatan sipil.
2. Menjadikan basis data kependudukan sebagai acuan perencanaan pembangunan di semua sektor.
3. Mendorong pemanfaatan basis data kependudukan di berbagai bidang.
4. Mengembangkan sistem informasi kependudukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang terintegratif.
5. Menjamin keamanan data-data kependudukan.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Bab 6

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan 2024-2045

Bab ini menjelaskan tentang peta jalan atau *road map* Pembangunan kependudukan di Kabupaten Katingan selama periode 2024-2045. Peta jalan menggambarkan tahapan Pembangunan yang dirinci setiap lima tahunan menurut lima pilar, yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga, serta data dan informasi kependudukan. Peta jalan disusun dengan memperhatikan situasi yang terjadi, kondisi ideal yang diharapkan dan isu strategis yang dihadapi, sehingga peta jalan akan menjadi petunjuk untuk mengarahkan kebijakan Pembangunan kependudukan. Peta jalan akan memandu para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi dan program untuk mencapai target dan sasaran Pembangunan kependudukan secara sistematis dan terencana.

6.1 Peta Jalan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kebijakan terkait kuantitas penduduk di Kabupaten Katingan yang diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan kuantitas untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang dan pemanfaatan bonus demografi. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka ada tahap-tahap yang perlu dilalui, yaitu.

- Tahap 1 (2024-2025): percepatan pencapaian penduduk tumbuh seimbang
- Tahap 2 (2025-2030): percepatan pencapaian penduduk tumbuh seimbang
- Tahap 3 (2030-2035): pemantapan pencapaian penduduk tumbuh seimbang dan pemanfaatan bonus demografi
- Tahap 4 (2035-2040): tercapainya penduduk tumbuh seimbang pemanfaatan bonus demografi
- Tahap 5 (2040-2045): pemanfaatan bonus demografi untuk peningkatan kesejahteraan

Di tahap pertama tahun 2024-2025 dan tahap berikutnya 2025-2030 Kabupaten Katingan menargetkan untuk percepatan pencapaian penduduk tumbuh. Situasi Kabupaten Katingan saat ini (di tahun 2023-2024) sedang akan menuju *replacement level* dan hal itu perlu dipercepat agar pertumbuhan penduduk

†
9 11 AP
R

Katingan dapat terkontrol. Pada situasi penduduk tanpa pertumbuhan, optimalisasi pengalokasian sumber daya untuk mendorong pembangunan di sektor lain, seperti ekonomi dan ketenagakerjaan, perluasan jaringan jalan dan transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pemberian jaminan sosial dan kesehatan, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Katingan dapat mengalihkan perhatian dari fokus pengendalian penduduk ke arah pengelolaan kuantitas. Sumber daya dan anggaran dapat lebih dioptimalkan pada aspek lainnya karena pertumbuhan penduduk sudah terkendali.

Untuk mendukung tercapainya penduduk tanpa pertumbuhan pada periode 2020-2030, maka Kabupaten Katingan menargetkan penambahan penduduknya menjadi sebesar 221.185 jiwa. Target tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi Kabupaten Katingan yaitu harus fokus pada indikator-indikator pembentuk, yakni seperti angka kelahiran, pemakaian kontrasepsi khususnya jangka panjang, median usia kawin pertama, dan kelahiran yang terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun. Indikator-indikator tersebut harus terkontrol dan diupayakan untuk berada pada *track* yang diskenariokan agar tidak berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk.

Di tahap berikutnya, apabila ciri penduduk tanpa pertumbuhan mulai terlihat yang ditandai oleh angka kelahiran berkisar antara 2,2 hingga 2,0 maka Kabupaten Katingan akan memantapkan langkah. Pemantapan pencapaian penduduk tumbuh seimbang mengartikan bahwa Kabupaten Katingan akan mempertahankan situasi yang ada agar tidak terjadi kenaikan. Situasi ini membutuhkan kehati-hatian dan cenderung lebih sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan percepatan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Di sini, sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang harus memiliki kadar kualitas dan kuantitas yang semakin baik.

Sejalan dengan mulai masuknya angka kelahiran yang semakin rendah yang diharapkan terjadi di periode 2035-2045, Kabupaten Katingan akan telah memiliki angka rasio ketergantungan yang rendah. Pada saat itu Katingan memiliki penduduk usia produktif yang tinggi, sehingga persiapan untuk pemanfaatannya harus telah direncanakan sebaik mungkin. Pemanfaatan penduduk usia produktif yang tepat dan benar akan memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan. Asumsi ini didasarkan pada beban tanggungan penduduk usia produktif yang masih rendah. Mereka dapat mengoptimalkan sumber daya dan pendapatannya di sektor ekonomi untuk investasi di masa depan. Kesempatan itu harus dimaksimalkan karena jika tidak dimanfaatkan akan berlalu begitu saja. Bahkan dikhawatirkan dapat menjadi beban di kemudian hari, yakni ditandai oleh penduduk usia produktif yang tidak semakin membaik kesejahteraannya, ditambah dengan tanggungan anak dan



orang tua yang semakin besar. Situasi ini akan menjadikan penduduk terperangkap dalam kemiskinan struktural yang sulit untuk dientaskan.

Tabel 6.1 Road Map Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk

Indikator	Tahun Dasar	Target				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	162.300	174.330	186.160	196.820	209.767	221.185
Total Fertility Rate (TFR)	2,38	2,35	2,34	2,27	2,2	2,13
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	10	10,15	12,61	15,08	17,54	20,0
Median Usia Kawin Pertama (tahun)	19,4	20,08	20,78	21,48	22,18	22,88
Kelahiran kelompok umur 15-19 tahun (ASFR) per 1.000 kelahiran	55,2	53	47,5	44,2	36,5	31,0
Rasio ketergantungan	46,86	44,87	45,94	48,26	48,80	49,21

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Selanjutnya, selama pertumbuhan penduduk di Kabupaten Katingan terkontrol, Katingan akan memiliki peluang yang besar untuk dapat memanfaatkan bonus demografi. Katingan akan memperoleh keuntungan pada saat kondisi demografinya didominasi oleh penduduk usia produktif. Oleh karenanya pemanfaatan bonus demografi harus menjadi fokus kebijakan pembangunan di Katingan.

Tahapan pembangunan dari sisi kuantitas tersebut dapat dikontrol melalui sejumlah indikator, yaitu angka kelahiran total, prevalensi kontrasepsi, median usia kawin pertama, tingkat kelahiran kelompok umur 15-19 tahun dan angka rasio ketergantungan. Dalam hal angka kelahiran (TFR) di tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,35 dan 2,34 di tahun 2030. Di tahun 2035 angka kelahiran ditargetkan mengalami penurunan dan menjadi 2,27 serta di tahun 2040 ditargetkan 2,2. Pada 2045 angka kelahiran di Katingan akan berada pada angka 2,13.

Indikator selanjutnya adalah prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka panjang. Persentase pemakaian kontrasepsi ditargetkan meningkat dari 10 persen di 2023 menjadi 10,15 di tahun 2025. Periode lima tahun pertama, yaitu 2025-2035 prevalensi kontrasepsi diarahkan menjadi 12,61 persen dan meningkat menjadi 15,08 persen pada periode kedua. Pada periode ketiga, menjadi 17,54 persen dan di akhir periode diharapkan angka ini meningkat menjadi 20 persen.

Selain pemakaian alat kontrasepsi, upaya untuk mengendalikan tingkat kelahiran adalah melalui pendewasaan usia kawin. Salah satu indikatornya adalah median usia kawin pertama (MUKP). Pada tahun 2025, diarahkan agar

MUKP di usia 20,08 tahun dan meningkat menjadi 20,78 tahun pada periode 2025-2030. Di periode berikutnya, MUKP diharapkan pada usia 21,48 tahun, sedangkan di periode 2035-2040 dan di akhir periode MUKP akan berada pada angka 22,18 tahun dan 22,88 tahun.

Pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran juga harus memerhatikan kelahiran yang terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun. Untuk indikator ini diharapkan agar terus menurun dari 55,2 di tahun 2023 menjadi 53 di tahun 2025. Pada periode 2025-2030 kelahiran kelompok umur 15-19 tahun ditargetkan sebesar 47,5, sedangkan di periode 2035-2035 ditargetkan sebesar 44,2. Periode 2035-3040 dan di akhir periode angka kelahiran diharapkan masing-masing sebesar 36,5 dan 31,0 per 1.000 kelahiran.

Tahap berikutnya, setelah Kabupaten Katingan mencapai penduduk tumbuh seimbang diarahkan untuk tetap mempertahankannya. Oleh karenanya Kabupaten Katingan akan fokus pada langkah-langkah untuk dapat menahan angka kelahiran tetap pada kondisi ideal, sehingga menciptakan struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok umur 15-64 tahun. Pada tahun 2025 angka ketergantungan 44,87 persen dan meningkat pada periode 2025-2030, 2030-2035 dan 2035-2040, berturut-turut adalah menjadi 45,94 persen, 48,26 persen, dan 48,80 persen. Hingga tahun 2045, rasio ketergantungan diperkirakan akan semakin meningkat pada angka 49,21 persen.

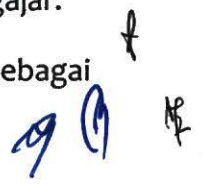
6.2 Peta Jalan Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas pendudukan sangat penting dalam menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Katingan dan seluruh elemen perlu untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera untuk mengisi bonus demografi. Ada tiga aspek dalam upaya peningkatan kualitas penduduk ini, yaitu kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

6.2.1 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menjadi indikator penting dalam pembangunan. Jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah angkatan kerja usia produktif di Kabupaten Katingan yang semakin meningkat memerlukan investasi yang cukup memadai untuk meningkatkan pemerataan dan memperluas akses sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk terwujudnya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, pemerataan layanan pendidikan, peningkatan peran serta masyarakat, dan peningkatan kualitas guru dan tenaga pengajar.

Penahapan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah sebagai berikut.



- Tahap 1 (2024-2025): peningkatan partisipasi sekolah dan pemerataan akses/layanan pendidikan, baik dari sisi kewilayahan maupun aspek demografi dan sosial ekonomi penduduk
- Tahap 2 (2025-2030): peningkatan partisipasi sekolah dan pemerataan akses/layanan pendidikan, baik dari sisi kewilayahan maupun aspek demografi dan sosial ekonomi penduduk
- Tahap 3 (2030-2035): peningkatan kualitas pelayanan pendidikan formal dan nonformal, termasuk lembaga pelatihan, baik dari sisi materi, tenaga pengajar, maupun infrastruktur
- Tahap 4 (2035-2040): peningkatan kualitas pelayanan pendidikan formal dan nonformal, termasuk lembaga pelatihan, baik dari sisi materi, tenaga pengajar, maupun infrastruktur (dengan tetap memperhatikan pemerataan akses)
- Tahap 5 (2040-2045): pengembangan sistem pendidikan terintegrasi dan inklusif

Tabel 6.2 Road Map Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Indikator	Tahun dasar (2023)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,85	9,20	9,90	10,60	11,30	12,00
Harapan lama sekolah (tahun)	12,98	13,16	13,62	14,07	14,53	14,98
Angka partisipasi murni sekolah dasar (%)	98,88	99,00	99,30	99,60	99,90	100,00
Angka partisipasi murni sekolah menengah pertama (%)	78,14	78,26	78,57	78,88	79,19	79,51
Jumlah siswa putus sekolah	195 (SD) 146 (SMP)	menurun	menurun	menurun	menurun	tidak ada

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Road map pembangunan pendidikan Kabupaten Katingan tampak Tabel 6.2. Pada tahun 2045 nanti, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Katingan telah mencapai 12 tahun. Kondisi ini memberikan jaminan bahwa usia produktif yang tersedia telah memiliki pendidikan minimal sekolah menengah atas (SLTA). Target capaian ini sangat realistis untuk dicapai di masa mendatang.

Pada 2045, meningkatnya anak-anak usia sekolah untuk mengakses jenjang pendidikan yang sesuai. Di jenjang SD ditargetkan 100 persen, dan SMP ditargetkan 79,51 persen. Peningkatan akses pendidikan ini juga tampak dari sudah tidak adanya anak yang mengalami putus sekolah. Program bantuan pendidikan sangat diperlukan untuk menghapus angka putus sekolah di

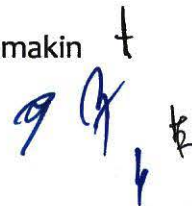
Kabupaten Katingan tersebut. Selain partisipasi sekolah formal, diharapkan semua penduduk usia produktif yang akan masuk di dunia kerja mendapatkan akses layanan pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan mereka masuk dalam pasar kerja.

Kebutuhan pendidikan yang lebih tinggi sangat diperlukan agar sumber daya manusianya memiliki daya saing dalam dunia kerja. Oleh karena itu, pada 2045 ditargetkan harapan lama sekolah penduduk Katingan adalah 14,98 tahun, yaitu setara dengan Diploma 3. Agar lebih siap memasuki dunia kerja, selain pengetahuan, penduduk usia produktif mendapatkan pembekalan berupa keterampilan, terutama penguasaan teknologi digital. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Harapannya mereka lebih mandiri dan berdaya saing.

6.2.2 Peningkatan Kualitas Kesehatan

Upaya peningkatan kualitas penduduk sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas kesehatan. Untuk mencetak penduduk yang mandiri dan berdaya saing, mensyaratkan penduduk yang sehat jasmani dan rohani. Kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan diarahkan untuk meningkatkan usia harapan hidup, menurunkan angka kematian, menghapus segala bentuk kekurangan gizi dan morbiditas, serta keberlangsungan jaminan kesehatan nasional.

- Tahap 1 (2024-2025): penguatan fondasi pembangunan kesehatan
- Tahap 2 (2025-2030): peningkatan akses layanan kesehatan yang semakin luas dan bermutu, peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat tentang perilaku hidup sehat
- Tahap 3 (2030-2035): peningkatan akses layanan kesehatan yang semakin luas dan bermutu, peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat tentang perilaku hidup sehat, cakupan jaminan kesehatan nasional yang lebih luas
- Tahap 4 (2035-2040): peningkatan akses layanan kesehatan yang semakin luas dan bermutu, baik tenaga kesehatan maupun infrastruktur, cakupan jaminan kesehatan nasional yang lebih luas
- Tahap 5 (2040-2045): peningkatan akses layanan kesehatan yang semakin luas dan bermutu, baik tenaga kesehatan maupun infrastruktur



Tabel 6.3 Road Map Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

Indikator	Tahun dasar	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Usia harapan hidup (tahun)	66,40 (2022)	67,65	68,88	70,13	71,41	72,71
Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH	12,69 (2023)	11,5	9,0	7,1	5,6	4,4
Angka kematian ibu per 100.000 KH	176 (2023)	169	163	157	151	145
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	83,7 (2022)	85,2	88,9	92,6	96,3	100,0
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin (%)	61,3 (2022)	63,0	67,3	71,5	75,8	80,0
Cakupan pelayanan ibu nifas (%)	79,0 (2022)	80,0	82,5	85,0	87,5	90,0
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	78,5 (2022)	79,6	82,2	84,8	87,4	90,0
Cakupan pelayanan kesehatan balita (%)	62,9 (2022)	64,5	68,3	72,2	76,1	80,0
Persentase balita wasting (%)	7,00 (2023)	6,56	5,58	4,75	4,04	3,44
Prevalensi balita stunting (%)	17,6 (2023)	15,63	11,63	9,40	8,57	7,74
Jumlah kasus penyakit menular	2.401 (2023)	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun
Jumlah kasus penyakit tidak menular	74.177 (2023)	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun
Persentase rumah tangga dengan fasilitas air minum bersih	62,20 (2022)	63,74	67,59	71,44	75,29	79,14
Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama dengan tangki septik	72,34 (2022)	74,00	76,76	79,52	82,82	85,04

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Indikator-indikator kualitas kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam penyusunan peta jalan (*road map*) menuju Indonesia Emas 2045 karena tujuan utama pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan secara produktif. Dalam *road map* yang disajikan pada Tabel 6.3, Pemerintah Kabupaten Katingan bertekad untuk meningkatkan usia harapan hidup menjadi 72,71 tahun pada 2045. Guna mewujudkan target capaian ini maka memerlukan dukungan penanganan kesehatan yang kondusif.

996

Pertama, penguatan pelayanan maternal dan neonatal. Cakupan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal diharapkan terus meningkat. Pada 2045, seluruh ibu hamil (100 persen) mendapatkan pelayanan yang memadai, sebanyak 80 persen ibu bersalin terlayani dengan baik, dan 90 persen ibu nifas mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan target cakupan pelayanan bagi bayi baru lahir pada 2045 adalah 90 persen dan 80 persen balita terlayani dengan baik. Dengan cakupan layanan yang semakin meningkat ini maka akan mengurangi angka kematian bayi menjadi 4,4 pada 2045 dan angka kematian ibu menjadi 145 pada 2045. Dengan adanya penguatan layanan maternal dan antenatal ini juga akan mengurangi angka kekurangan gizi, baik *wasting* maupun *stunting*. Anak terpantau kondisi gizinya, dimana harus terpenuhi nutrisinya yang dimulai dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi dilahirkan. Ditargetkan pada tahun 2045, prevalensi *wasting* sebesar 3,44 persen dan *stunting* sebesar 7,74 persen.

Kedua, penguatan layanan preventif, promotif, dan kuratif, secara tepat dan komprehensif. Hal ini didasari dari perhatian pemerintah terhadap berbagai gangguan kesehatan masyarakat, baik karena endemi, pandemi, maupun penyakit degeneratif yang mengalami perkembangan sangat signifikan saat ini. Upaya preventif dan promotif tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat. Ditargetkan pada 2045, persentase rumah tangga dengan fasilitas air minum bersih sebesar 79,14 persen dan persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama dengan tangki septik sebesar 85,04 persen. Dengan pelayanan kesehatan secara holistik, komprehensif, dan inklusif, yang dibarengi dengan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan cara hidup dan lingkungan yang sehat, maka pada tahun 2045, diharapkan jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular semakin rendah.

6.2.3 Peningkatan Kualitas Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan langsung dirasakan dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, pembangunan kualitas penduduk berkaitan erat dengan capaian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

- Tahap 1 (2024-2025): optimalisasi sektor UMK serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; peningkatan kualitas tenaga kerja; peningkatan akses masyarakat terhadap perlindungan sosial
- Tahap 2 (2025-2030): peningkatan iklim investasi; membangun jaringan dengan usaha menengah dan besar serta perbankan untuk memfasilitasi pengembangan sektor UMK; membangun kerja sama dengan dunia usaha dalam peningkatan kompetensi dan akses tenaga kerja; peningkatan akses masyarakat terhadap perlindungan sosial

- Tahap 3 (2030-2035): pengembangan sistem perlindungan sosial yang bersifat pemberdayaan dan inklusif: pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan; pengembangan pusat kegiatan ekonomi baru dengan melibatkan lebih banyak sektor UMK; peningkatan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pemantapan kompetensi tenaga kerja; pengembangan kerja sama dengan dunia usaha yang berkelanjutan
- Tahap 4 (2035-2040): peningkatan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan; pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan sektor perbankan yang berkelanjutan (untuk peningkatan akses dan kualitas tenaga kerja maupun pengembangan sektor UMK); perluasan cakupan SJSN Ketenagakerjaan
- Tahap 5 (2040-2045): pemantapan sistem pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berdaya saing; pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan sektor perbankan yang berkelanjutan (untuk peningkatan akses dan kualitas tenaga kerja maupun pengembangan sektor UMK); perluasan cakupan SJSN Ketenagakerjaan

Tabel 6.4 Road Map Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Indikator	Tahun dasar	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pengeluaran per kapita (ribu/orang/tahun)	11.399 (2023)	11.810	12.903	14.097	15.401	16.826
Indeks Gini	0,26 (2023)	0,217	0,137	0,087	0,055	0,035
Persentase penduduk miskin (%)	4,99 (2023)	4,93	4,78	4,64	4,51	4,37
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,62 (2022)	0,527	0,350	0,233	0,155	0,103
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,11 (2022)	0,100	0,077	0,053	0,029	0,005
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	64,42 (2023)	64,50	64,70	64,90	65,10	65,31
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,96 (2022)	4,66	3,98	3,40	3,08	3,03

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dalam indeks pembangunan manusia, keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dari pengeluaran per kapita. Pembangunan ekonomi Kabupaten Katingan diarahkan untuk meningkatkan pengeluaran per kapita. Pada tahun 2045, ditargetkan mencapai Rp16.826.000 per tahun atau Rp1.402.166 per

bulan. Peningkatan pengeluaran per kapita ini menunjukkan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Artinya, kehidupan masyarakat diarahkan untuk semakin sejahtera, penduduk miskin semakin berkurang. Beberapa indikator kemiskinan diarahkan untuk terus menurun. Pada 2045, ditargetkan persentase penduduk miskin sebesar 4,35 persen, P1 sebesar 0,103, dan P2 sebesar 0,005. Ke depan, tidak terjadi lagi kesenjangan ekonomi penduduk. Indeks gini Kabupaten Katingan pada 2045 ditargetkan sebesar 0,035.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan diharapkan terus meningkat hingga tahun 2045. Oleh karena itu, membutuhkan partisipasi angkatan kerja yang semakin meningkat. Diperkirakan tahun 2045, partisipasi angkatan kerja Kabupaten Katingan sebesar 65,31. Semakin banyaknya penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, maka mereka akan mampu mencapai tingkat produktivitas yang lebih memadai. Tentunya, peningkatan partisipasi angkatan kerja ini perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan mutu angkatan kerja, yang saat ini didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, sehingga mampu menjawab kebutuhan dan permintaan pasar kerja. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan swasta berupaya mengupayakan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan bagi para tenaga kerja.

Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk terus menekan angka pengangguran hingga mencapai 3,03 pada 2045. Artinya, hampir seluruh tenaga kerja di Kabupaten Katingan terserap dalam pangsa kerja (*natural unemployment*). Asumsinya, kondisi perekonomian Kabupaten Katingan berjalan baik dan sehat sehingga akan menarik lebih banyak investasi. Investasi dapat didorong bagi peningkatan nilai tambah dan daya saing pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan untuk mewujudkan ekonomi hijau.

6.3 Peta Jalan Pembangunan Keluarga

Berdasar paparan di atas maka peta jalan bagi implementasi pilar pembangunan keluarga bisa digambarkan sebagai berikut

Tabel 6.5 Penahapan dalam Pembangunan Keluarga

Tahun 1 (2024-2025)	Tahun 2 (2025-2030)	Tahun 3 (2030-2035)	Tahun 4 (2035-2040)	Tahun 5 (2040-2045)
Penataan data yang berkaitan dengan pembangunan keluarga Satu data untuk pembangunan keluarga Menentukan <i>bench mark</i> data sebagai rujukan (titik awal) perubahan	Pengumpulan bukti kualitatif (kajian, FGD dengan masyarakat sipil, konsultasi dengan ahli). Bukti diunggah di internet supaya bisa diakses oleh pengambil kebijakan dan masyarakat luas	Sosialisasi tentang berbagai peraturan pemerintah (nasional dan daerah) yang berkaitan dengan pembangunan keluarga Pelibatan masyarakat sipil dalam program sosialisasi	Inisiatif peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pilar pembangunan keluarga Pengurusutamaan gender (pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat akar rumput)	Satu data untuk pembangunan keluarga Bukti kualitatif yang bisa dikulik di internet

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.4 Peta Jalan Pengarahan Mobilitas

Aspek kependudukan yang penting dalam pembangunan adalah mobilitas. Aspek ini menjadi satu-satunya yang sulit untuk dipengaruhi oleh kebijakan dibandingkan dengan aspek lainnya seperti kelahiran dan kematian. Mobilitas melibatkan unsur personal, seperti hasrat dan keinginan untuk berpindah agar terpenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya, kebijakan tentang mobilitas lebih bersifat arahan, yakni mengarahkan pergerakan penduduk ke titik lokasi tertentu agar (1) tidak terjadi kelebihan penduduk yang menyebabkan kemampuan lahan menurun, (2) distribusi penduduk merata sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan, dan (3) tidak terjadi migrasi keluar yang menyebabkan migrasi *netto* negatif. Oleh karena itu, tahap-tahap pembangunan kependudukan dari sisi mobilitas diharapkan mengikuti berikut.

- Tahap 1 (2024-2025): mendorong migrasi masuk dengan menciptakan pusat pertumbuhan
- Tahap 2 (2025-2030): mendorong migrasi masuk dengan menciptakan pusat pertumbuhan
- Tahap 3 (2030-2035): keseimbangan distribusi penduduk antarwilayah
- Tahap 4 (2035-2040): keseimbangan penduduk dan daya dukung wilayah
- Tahap 5 (2040-2045): keseimbangan penduduk dan daya dukung wilayah

Di tahap awal, yaitu tahun 2024-2025 dan 2025-2030 mobilitas penduduk ke Katingan ditargetkan meningkat sehingga menciptakan migrasi positif. Upaya untuk mendorong migrasi masuk harus terus dilakukan agar tidak terjadi defisit penduduk usia produktif (yang ditandai oleh migrasi keluar lebih besar dibandingkan dengan migrasi masuk). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan pusat pertumbuhan untuk menjadi daya magnet bagi migran. Pusat pertumbuhan harus disusun dengan terencana dan sistematis, utamanya dengan mengandalkan pada potensi unggulan dan berdasarkan sektor basis. Sementara itu, pada pusat pertumbuhan lama (yang telah ada) perlu dilakukan upaya untuk menguatkannya agar mampu mendorong pertumbuhan desa/daerah di sekitarnya. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan jaringan dan akses transportasi antardesa dan kecamatan, jaringan dan akses air bersih, komunikasi, dan informasi.

Periode berikutnya 2030-2035 distribusi penduduk di Kabupaten Katingan diharapkan terjadi secara merata, sehingga di tahun-tahun mendatang akan terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung wilayah. Persebaran penduduk merata dapat diraih dengan dukungan ketersediaan fasilitas umum dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu juga didukung oleh sistem dan kegiatan ekonomi yang saling terkoneksi antardesa, kecamatan, dan antarwilayah. Situasi tersebut akan mampu menciptakan efek ganda, yaitu menahan penduduk desa untuk tetap tinggal di wilayahnya dan menarik penduduk luar untuk bermigrasi.

Mobilitas penduduk juga dapat diarahkan dengan mempertimbangkan peruntukan lahan, sehingga kesesuaian pemanfaatan ruang sangat penting. Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukannya dapat menekan dampak buruk degradasi lahan karena penggunaan yang berlebihan. Mobilitas penduduk juga sangat terkait dengan kondisi jalan. Mobilitas cenderung mengarah pada daerah yang memiliki aksesibilitas dan kondisi jalannya baik. Oleh karenanya aksesibilitas yang menghubungkan wilayah antarkecamatan dan kabupaten/kota diharapkan terpelihara dengan baik.

6.5 Peta Jalan Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan

Data dan informasi kependudukan merupakan sumber penting bagi perencanaan dan pembangunan kependudukan. Ketersediaan data yang valid dan akurat akan menentukan kualitas perencanaan kebijakan. Dari beragam sumber data kependudukan yang ada, data yang bersumber dari registrasi penduduk adalah yang utama karena data akan selalu termutakhirkan dan efisien. Dalam hal ini tidak dibutuhkan biaya yang tinggi untuk melakukan pendataan karena mengandalkan partisipasi penduduk. Oleh karena itu,

kebijakan terkait data kependudukan di Kabupaten Katingan diarahkan untuk mencapai target-target berikut.

- Tahap 1 (2024-2025): penguatan administrasi data kependudukan dan pengelolaan data kependudukan
- Tahap 2 (2025-2030): penguatan administrasi data kependudukan dan pengelolaan data kependudukan
- Tahap 3 (2030-2035): pengembangan sistem informasi data kependudukan
- Tahap 4 (2035-2040): integrasi data kependudukan untuk pengambilan kebijakan
- Tahap 5 (2040-2045): integrasi data kependudukan untuk pengambilan kebijakan

Hingga periode 2030, Kabupaten Katingan akan fokus pada penguatan administrasi kependudukan dan pengelolaan data kependudukan. Pengadministrasian data kependudukan yang sudah berjalan selama ini perlu terus dikuatkan, sehingga menjangkau seluruh wilayah desa dan kecamatan yang ada. Penguatan perlu didukung oleh keaktifan dan peran serta masyarakat untuk terus mencatatkan peristiwa demografi yang dialaminya. Sejalan dengan itu juga perlu didukung oleh akses dan layanan yang semakin berkualitas. Untuk mencapai itu, tidak sekedar berfokus pada sumber daya manusia yang akan memberi layanan dan mencatat peristiwa kependudukan yang terjadi, tetapi juga fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan untuk data kependudukan yang tersedia perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan. Beberapa pengelolaan data kependudukan yang dapat dilakukan adalah dalam bentuk profil perkembangan kependudukan, informasi estimasi kelahiran, data perkembangan bayi dan anak, data kematian, migrasi dan lain sebagainya.

Tabel 6.6 Road Map Data Kependudukan Katingan 2025-2045

Indikator	Tahun dasar 2023	Roadmap				
		2025	2030	2035	2040	2045
Perekaman KTP	98,9	99,03	99,26	99,49	99,72	100
Kepemilikan akta kelahiran	98,1	98,27	98,68	99,09	99,5	100
Kepemilikan kartu keluarga	99,7	99,72	99,78	99,85	99,92	100
Kepemilikan KIA	58,6	60,44	65,10	69,76	74,41	80

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Selanjutnya, di periode 2030-2035 ketika administrasi data kependudukan sudah berjalan dengan baik dan data-data terkelola secara memadai, maka Katingan diharapkan akan melangkah ke tahap pengembangan sistem informasi. Sistem informasi ini dikembangkan berdasarkan basis data kependudukan yang didapat dari hasil registrasi penduduk (administrasi data kependudukan). Sistem informasi akan dapat menyajikan data dasar yang dibutuhkan untuk perencanaan program.

Pada periode 2035-2040 dan 2040-2045 setelah tercipta sistem informasi data kependudukan, Katingan ditargetkan untuk mengintegrasikan data tersebut dengan data sektoral. Integrasi data kependudukan ini dapat dilakukan dengan mendasarkan data identitas tunggal (NIK), baik merujuk pada individu (personal) maupun merujuk pada keluarga (kartu keluarga). Manfaat yang didapat apabila merujuk pada individu adalah Katingan akan mendapatkan individu yang cocok dan tepat sesuai target program, seperti penanganan *stunting*, kematian bayi, kematian ibu, peningkatan kapasitas dan keterampilan remaja untuk memasuki dunia kerja, intervensi lansia tangguh, dan lain sebagainya. Sedangkan apabila merujuk pada keluarga, maka intervensi yang berbasis keluarga juga dapat dilakukan secara tepat sasaran, seperti penguatan keluarga, pembinaan keluarga sehat, pembinaan ekonomi keluarga, dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan untuk sasaran pengelolaan data dan sistem informasi kependudukan adalah perekaman KTP elektronik, kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan kartu keluarga, dan kepemilikan KIA. Masing-masing indikator diharapkan meningkat persentase di setiap periodenya. Untuk indikator perekaman KTP yaitu menggambarkan persentase penduduk yang telah memiliki KTP elektronik ditargetkan meningkat dari 99,03 persen di 2025 menjadi 99,26 persen di 2030, 99,49 di tahun 2035, 99,72 persen di tahun 2040 dan mencapai 100 persen di tahun 2045. Demikian juga dengan kepemilikan akta kelahiran, utamanya pada penduduk berumur 0-18 tahun ditargetkan sebesar 98,27 persen di 2025, 98,68 persen di 2030, 99,09 persen di tahun 2035, 99,5 persen di tahun 2040 dan 100 persen di tahun 2045. Adapun untuk indikator keluarga yang memiliki kartu keluarga ditargetkan meningkat dari 99,72 persen di 2025 menjadi 99,78 persen di 2030, 99,85 persen di 2035, 99,92 persen di 2040 dan 100 persen di 2045. Untuk indikator kepemilikan KIA diharapkan sebesar 60,44 persen di tahun 2025 dan meningkat menjadi 65,10 persen pada periode 2025-2030. Periode selanjutnya 2030-2035 ditargetkan sebesar 67,76 persen dan 74,41 persen di periode 2035-2040. Pada akhir periode persentase kepemilikan KIA diharapkan sebesar 80 persen.

Bab 7 Penutup

Grand design Pembangunan kependudukan Kabupaten Katingan terdiri dari lima pilar, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta data dan informasi kependudukan.

Pengendalian kuantitas dilakukan melalui pencapaian penduduk tumbuh seimbang dan optimalisasi bonus demografi. Pencapaian penduduk tumbuh seimbang dilaksanakan melalui pengaturan fertilitas (penguatan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga secara berkelanjutan), penurunan angka kematian dan kesakitan, serta mempertahankan bonus demografi. Optimalisasi bonus demografi dilakukan melalui pelibatan penduduk usia produktif dalam pasar kerja.

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Peningkatan taraf pendidikan dilakukan melalui peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, pemerataan layanan pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga pengajar, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan anak, penghilangan segala bentuk kekurangan gizi, pengurangan kesakitan, dan keberlangsungan jaminan kesehatan nasional secara merata. Di bidang ekonomi, dilakukan melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja dan lapangan berusaha yang lebih merata, serta perluasan cakupan sistem jaminan nasional ketenagakerjaan.


Untuk mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas dilakukan melalui Upaya strategis seperti kolaborasi dan sinergi berbagai OPD yang terkait, kebijakan yang berbasis bukti, pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, sosialisasi yang diikuti dengan fasilitasi untuk menjembatani *knowing* dan *doing* untuk dapat mengubah perilaku masyarakat. Dukungan anggaran dan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam Pembangunan keluarga, maka perlu kolaborasi dan sinergi yang bersifat lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat.

Pada aspek penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk di Katingan diarahkan untuk mengelola migrasi penduduk desa ke kota dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan, mengembangkan infrastruktur transportasi darat dan air secara memadai, penguatan pelatihan dan



pendidikan keterampilan bagi tenaga kerja. Di samping itu, juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan.

Pada aspek penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan diarahkan pada pengembangan sistem informasi data kependudukan yang integratif dan dapat dipercaya serta pemutakhiran *database* kependudukan. Untuk mewujudkan data yang dapat dipercaya, maka perlu peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan data kependudukan di berbagai bidang dan kepentingan secara optimal, pengembangan sistem informasi kependudukan, dan jaminan keamanan data.



Referensi

- Bachtiar, PP. Tanpa Tahun. *Menghasilkan bukti sebagai informasi bagi proses penyusunan kebijakan di Indonesia: tantangan pada sisi penawaran (Producing Evidence to inform policy proces in Indonesia: the challenges on the supply side)*. Smeru Institute.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2020. *Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar*. Jakarta: Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2020. *Buku saku pengenalan indeks pembangunan keluarga*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan. Tanpa Tahun. *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Katingan. 2024. *Kabupaten Katingan Dalam Angka 2024*. Katingan: BPS Kabupaten Katingan.
- De Jong, R. (2010). "Son Targeting and Fertility Behavior Some Consequences and Determinants". *Demography*, 47 (2), pp 521-536. DP3AP2KB Kabupaten Katingan. Renstra 2024-2026.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan. 2023. *Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026*. Katingan: Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Diener, E., Tay, L., & Oishi, S. 2013. Rising income and the subjective well-being of nations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 104, 267–276. doi:10.1037/a0030487.
- Haris, S. 1019. Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintah. *Sosfilkom*, Volume XIII No 01, Jan – Juni, 2019 hal 33-47.
- Hall, SG. 1904. *Adolescence: its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education*. Appleton and Company.
- Ichtiarto, Bonivasius Prasetya. 2023. "Arah dan Kebijakan Pengendalian Penduduk di Masa yang Akan Datang." *Materi Seminar Isu dan Kebijakan Kependudukan Menyongsong Indonesia Emas: Menyikapi Hasil Sensus Penduduk 2020*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM, 20 Februari 2023.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Layard, R. 2005. *Happiness: Lessons from a new science*. Penguin.
- Lucas, D. 2006. *The Beginning of Population Studies*. Australia: ANU
- Mantra, I.B. 2000. *Pengantar Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martson, G dan Rob Watts. 2003. Tampering with Evidence: A Critical Appraisal of Evidence-Based Policy Making. *The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs*. 3 (3) Maret, 2003, halaman 143-163. ISSN 1443-8607.

Ovaska, T., & Takashima, R. 2006. Economic policy and the level of self-perceived well-being: An international comparison. *The Journal of Socio-Economics*, 35, 308–325. doi:10.1016/j.socec.2005.11.054.

Peni, G., Lestari, R.M., Prasida, D.W. 2022. “Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja terhadap Kejadian Pernikahan Dini di Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai, Palangkaraya”. *Jurnal Surya Medika*. journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/jism.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM). 2021. “Women’s Role in Family Survival amidst the COVID-19 Pandemic Research”. *Final Report*. Yogyakarta: PSKK UGM, tidak diterbitkan.

Satsipi, E, Andriyani, L, Gunanto, D, Andiani, D. 2021. The Collaboration in Socializing Policies of Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*. 11 (1). Januari – Juni. 2021. Halaman 180-196. p-ISSN: 2086-6364, e-ISSN: 2549-7499.

Simanjutak, P. 2006. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI

Tukiran. 2014. *Kependudukan*. Universitas Terbuka

UNFPA. 2019. *Sexual and Reproductive Health and Rights, Background document for National Summit on ICPD25*. UNFPA

Sumber

<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/41537/upaya-dinas-p3appkb-prov-kalteng-tingkatkan-keterwakilan-perempuan-di-lembaga-legislatif-periode-2024-2029>

<https://exposkalteng.com/ketua-pengadilan-agama-kelas-ii-kasongan-awal-2023-permohonan-dispensasi-pernikahan-dini-di-katingan-tinggi/>

<https://www.antaranews.com/berita/2910769/perceraian-di-katingan-meningkat-hingga-30-persen-selama-pandemi>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi-2022.html>

<https://golantang.bkkbn.go.id/menjadi-lansia-tangguh-dengan-menerapkan-7-nilai-dimensi-lansia-tangguh-dan-mengenal-apa-itu-bina-keluarga-lansia-bkl>

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/17894/intervensi/721461/kegiatan-pusat-informasi-dan-konseling-remaja-pik-r>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi/artikel/stunting-wasting-sama-atau-beda>

Homepage: <http://ojs.unm.ac.id/iap>

<https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/2/experts-take-to-change-peoples-behaviour-connect-with-them-first>

